



# Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat



# RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  
**Kabupaten Seram Bagian Barat**

**Tahun 2025 - 2045**





BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

dan

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025-2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Provinsi adalah Provinsi Maluku.
7. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
8. Perangkar Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Perencanaan adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.
10. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
11. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur

pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

13. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
14. Penyelarasan adalah proses sinkronisasi muatan antara dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah agar tercapai sinergi pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional secara koheren.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode tahun 2025-2045.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Maluku untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Maluku adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Maluku untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Visi Indonesia Emas 2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
22. Misi Pembangunan Nasional adalah agenda pembangunan nasional yang merupakan upaya besar yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
23. Arah Pembangunan Nasional adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional jangka panjang.
24. Indonesia Emas adalah arah pembangunan dalam 20 tahun ke depan dengan menggunakan paradigma baru.
25. Permasalahan Pembangunan Daerah adalah kesenjangan antara realita/capaian pembangunan daerah dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
26. Isu Strategis Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

- 27.Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang selaras dengan visi nasional.
- 28.Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah dengan memperhatikan misi nasional.
- 29.Arah Kebijakan adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan visi daerah.
- 30.Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi daerah pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
- 31.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 32.Pelaku Pembangunan adalah pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 merupakan:

- a. penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk tahun 2025-2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045, RTRW Provinsi Maluku dan RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat.
- b. dokumen rencana pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Seram Bagian Barat bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat yang berkeadilan, sebagai upaya mendukung pencapaian RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudkan Indonesia Emas 2045.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 adalah penetapan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat.

- (2) Tujuan penetapan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 adalah penetapan dokumen rencana pembangunan daerah untuk:
- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
  - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antarruang, antarwaktu, serta antarfungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah;
  - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penanganan, pelaksanaan, dan pengawasan;
  - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
  - e. menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Sistematika RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 meliputi:

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis
- d. BAB IV Visi dan Misi Daerah
- e. BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
- f. BAB VI Penutup

### Pasal 5

Isi beserta uraian RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
  - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045;
  - b. konsistensi antara RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan RPJPN Tahun 2025-2045;
  - c. konsistensi antara RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045;

- d. konsistensi antara RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 dengan RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun .....; dan
  - e. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan
- (3) Pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan.

## BAB VI PERUBAHAN

### Pasal 7

- (1) Perubahan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. terjadi perubahan besar yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Perubahan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi penetapan Perubahan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru  
pada tanggal 23 April 2025

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd

ASRI ARMAN

diundangkan di Piru  
pada tanggal 24 April 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

LEVERNE ALVIN TUASUUN

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



DANIEL J. SOUKOTTA, SH  
Pembina / IV.a  
NIP. 196912102003121006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR  
196

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SERAM  
BAGIAN BARAT TAHUN 2025-2045

## I. UMUM

RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Seram Bagian Barat bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dengan tujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat yang berkeadilan, sebagai upaya mendukung pencapaian RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 dan pencapaian RPJPN Tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudan Indonesia Emas 2045.

RKJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk tahun 2025-2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045, dan RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat.

RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR  
0196



## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	.....	<b>1</b>
1.1.	Latar Belakang	.....	1
1.2.	Dasar Hukum	.....	3
1.3.	Hubungan Antara Dokumen	.....	5
1.4.	Maksud dan Tujuan	.....	7
1.5.	Sistematika Penulisan	.....	8
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	.....	<b>9</b>
2.1.	Aspek Geografi dan Demografi	.....	9
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	.....	35
2.3.	Aspek Daya Saing	.....	54
2.4.	Aspek Pelayanan Umum	.....	113
2.5.	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	.....	78
2.6.	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	.....	87
2.7.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	.....	104
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b>	.....	<b>107</b>
3.1.	Permasalahan	.....	107
3.2.	Isu Strategis Daerah	.....	130
<b>BAB IV</b>	<b>VISI MISI DAERAH</b>	.....	<b>138</b>
4.1.	Visi Pembangunan 2025-2045	.....	138
4.2.	Misi Pembangunan 2025-2045	.....	142
<b>BAB V</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK</b>	.....	<b>150</b>
5.1.	Arah Kebijakan	.....	150
5.2.	Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045	.....	162
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	.....	<b>188</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sistematika Dokumen RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045	8
Tabel 2.1.	Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Dusun di Kabupaten Seram Bagian Barat	10
Tabel 2.2.	Topografi Menurut Selang Ketinggian dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat	11
Tabel 2.3.	Kemiringan Lahan dan Karakteristik Morfologi Dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat	13
Tabel 2.4.	Kondisi Klimatologi Rata-Rata Tahun 2023 Kabupaten Seram Bagian Barat	16
Tabel 2.5.	Sebaran Curah Hujan Kabupaten Seram Bagian Barat	17
Tabel 2.6.	Sebaran Tutupan Lahan/Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat	18
Tabel 2.7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2023	20
Tabel 2.8.	Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2019-2023	24
Tabel 2.9.	Kajian Resiko Bencana Kabupaten Seram Bagian Barat pada Level Bencana Sedang dan Tinggi	26
Tabel 2.10.	Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023	28
Tabel 2.11.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Tahun 2023	28



Tabel 2.12.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022 dan 2023	31
Tabel 2.13.	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2023	31
Tabel 2.14.	Jumlah Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023	32
Tabel 2.15.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan Tertentu Tahun 2023	33
Tabel 2.16.	Data Sebaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan (Desil 1-4) di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024	40
Tabel 2.17.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu Tahun 2019-2023	41
Tabel 2.18.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023	42
Tabel 2.19.	Capaian Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Maluku Tahun 2020-2022	44
Tabel 2.20.	Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022	49
Tabel 2.21.	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2022	50
Tabel 2.22.	Dimensi Pembentukan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku dan Capaiannya Tahun 2019-2022	54
Tabel 2.23.	Laju Pertumbuhan Ril PDRB Kabupaten	55



Seram Bagian Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023		
Tabel 2.24.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	56
	Perkapita Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023	
Tabel 2.25.	Capaian Indikator Presentase PAD .....	58
	Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023	
Tabel 2.26.	Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun .....	58
	2022-2023	
Tabel 2.27.	Angka Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022-2023	62
Tabel 2.28.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu Tahun 2019-2023	64
Tabel 2.29.	Kondisi Jalan Status Jalan Kabupaten Tahun 2020-2023	66
Tabel 2.30.	Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023	68
Tabel 2.31.	Kondisi SPAM Jaringan Perpipaan Tahun 2020-2023	69
Tabel 2.32.	Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2023	70
Tabel 2.33.	Jumlah RTLH Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2023	70
Tabel 2.34.	Capaian Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2020-2023	71
Tabel 2.35.	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023	72
Tabel 2.36.	Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021-2023 .....	77
Tabel 2.37.	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	79



Tabel 2.38.	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD .....	80
	Kabupaten Seram Bagian Barat	
	Terhadap Sasaran Pokok pada Misi 1	
	RPJPD Tahun 2005-2025	
Tabel 2.39.	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD .....	81
	Kabupaten Seram Bagian Barat	
	Terhadap Sasaran Pokok pada Misi 2	
	RPJPD Tahun 2005-2025	
Tabel 2.40.	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD .....	82
	Kabupaten Seram Bagian Barat	
	Terhadap Sasaran Pokok pada Misi 3	
	RPJPD Tahun 2005-2025	
Tabel 2.41.	Capaian Indikator Kinerja Makro .....	85
	Pembangunan Kabupaten Seram Bagian	
	Barat Tahun 2005-2025	
Tabel 2.42.	Proyeksi Penduduk Kabupaten Seram .....	88
	Bagian Barat Tahun 2025-2045	
Tabel 2.43.	Parameter Hasil Proyeksi Penduduk .....	89
	Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun	
	2025-2045	
Tabel 2.44.	Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat .....	93
	Tinggal Kabupaten Seram Bagian Barat	
	Tahun 2025-2045	
Tabel 2.45.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum .....	95
	Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun	
	2025-2045 (dalam Milyar Liter)	
Tabel 2.46.	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten .....	96
	Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045	
	(dalam GWh)	
Tabel 2.47.	Proyeksi Kebutuhan Pengolahan .....	98
	Persampahan Kabupaten Seram Bagian	
	Barat Tahun 2025-2045	



Tabel 2.48.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045	100
Tabel 2.49.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045	103
Tabel 3.1.	Permasalahan SDM dan Sosial di Kabupaten Seram Bagian Barat	107
Tabel 3.2.	Permasalahan Ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Barat	108
Tabel 3.3.	Permasalahan Lingkungan di Kabupaten Seram Bagian Barat	109
Tabel 3.4.	Permasalahan Infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Barat	110
Tabel 3.5.	Permasalahan Tata Kelola di Kabupaten Seram Bagian Barat	111
Tabel 3.6.	Megatren Global	112
Tabel 3.7.	Rekomendasi Sasaran Pokok dan Strategi atas Penetapan Isu TPB KLHS RPJPD Tahun 2025-2045	126
Tabel 4.1.	Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045	141
Tabel 4.2.	Integrasi Misi Kabupaten Seram Bagian Barat Terhadap RPJPN dan RPJPD Provinsi Maluku	144
Tabel 5.1.	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045	151
Tabel 5.2.	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045	163
Tabel 5.3.	Arah Kebijakan Transformasi	171

---



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Seram Bagian Barat	.....	9
Gambar 2.2.	Gambaran Perkembangan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023 (jiwa)	.....	29
Gambar 2.3.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023	.....	30
Gambar 2.4.	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023	.....	35
Gambar 2.5.	Perkembangan Angka Indeks Gini Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023	.....	36
Gambar 2.6.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023	.....	37
Gambar 2.7.	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023	.....	38
Gambar 2.8.	Kualitas Kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023	.....	39
Gambar 2.9.	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2022	.....	51
Gambar 2.10.	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2022	.....	51



Gambar 2.11.	Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2022	52
Gambar 2.12.	Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2019-2022	53
Gambar 2.13.	PDRB Per Kapita Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023	57
Gambar 2.14.	Indeks Literasi Digital Provinsi Maluku Tahun 2019-2022	63
Gambar 2.15.	Indeks Demokrasi Wilayah Maluku Tahun 2019-2023	75
Gambar 2.16.	Piramida Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, Proyeksi Tahun 2025-2045	91
Gambar 4.1.	Sinergi Visi RPJP Seram Bagian Barat, Maluku, Indonesia	140
Gambar 4.2.	Sinergi Visi Misi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat	143
Gambar 5.1.	Tema Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2045	150



## BAB I

# PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat berjalan dinamis dan pesat. Berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah telah diraih, tetapi tidak luput juga dari permasalahan atau tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan periode RPJPD sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan jangka panjang yang dapat menjawab berbagai kendala yang sudah dan akan dihadapi dimasa depan dengan demikian Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Barat dua puluh tahun kedepan harus sebagai pedoman dalam mempertahankan keberhasilan yang telah diraih, merespon isu strategis, dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada periode perencanaan sebelumnya, proses pembangunan berjalan progresif yang ditunjukkan dengan berbagai capaian kinerja pembangunan makro. Pada aspek SDM yang ditandai dengan IPM mengalami peningkatan pada tahun 2005 sebesar 60,19 menjadi 66,67 pada tahun 2022 atau meningkat sebesar, yakni 6,48 persen dan tetap mempertahankan predikat baik. Sementara pada aspek kesejahteraan yang ditunjukkan dengan Tingkat kemiskinan, pengangguran dan pemerataan menunjukkan kinerja baik terutama kinerja penurunan kemiskinan dan pengangguran. Tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka mengalami penurunan. Saat ini, tingkat kemiskinan, yakni sebesar 22,25 persen pada tahun 2022 yang sebelumnya sebesar 26,7 persen pada tahun 2011, sementara TPT sebesar 5,56 persen pada tahun 2022 yang sebelumnya pada tahun 2011 sebesar 6,71 persen. Berbeda halnya dengan kinerja pemerataan daerah menunjukkan adanya peningkatan indeks gini dari 0,206 pada tahun 2005 menjadi 0,314 pada tahun 2022. Peningkatan tersebut menandakan bahwa adanya kenaikan ketimpangan pendapatan meskipun ketimpangannya masih dalam kategori rendah.

Pada aspek perekonomian menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini ditandai dengan kenaikan LPE dan pendapatan per kapita yang sangat signifikan. Pada tahun 2005, LPE Kabupaten Seram bagian Barat, yaitu sebesar 4,8 persen pada tahun 2011 meningkat menjadi 5,3 persen pada tahun 2022. Sementara PDRB per kapita juga mengalami peningkatan dari 2,14 juta/jiwa pada tahun 2005 menjadi 16,053 juta/jiwa

pada tahun 2022. Kondisi ini menandakan bahwa perekonomian daerah memiliki kinerja sangat baik dan harus dipertahankan.

Meskipun pembangunan daerah ditataran makro menunjukkan keberhasilan, tetapi juga masih menyisahkan persoalan di beberapa aspek. Pada aspek pembangunan SDM, masih menyisakan persoalan di sektor pendidikan terkait dengan keengganan penduduk usia sekolah untuk melanjutkan studi setelah lulus pendidikan menengah yang disebabkan oleh menikah muda, faktor ekonomi (membantu orang tua), dan adanya stigma bahwa Pendidikan tidak terlalu penting. Sementara di sektor kesehatan masih menyisakan persoalan terkait dengan masih adanya kematian bayi dan ibu yang disebabkan oleh kesadaran hidup sehat dan kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan masih rendah. Persoalan di sektor kesejahteraan terkait dengan penurunan kemiskinan masih menyisakan permasalahan terkait dengan program kemiskinan masih dilaksanakan secara parsial dan belum terintegrasi serta belum adanya penentuan prioritas wilayah kemiskinan sehingga berdampak terhadap pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran. Persoalan lain juga berkaitan dengan ketenagakerjaan yakni masih rendahnya kualifikasi tenaga kerja.

Berbagai persoalan di atas perlu direspon secara efektif, efisien, dan akuntabel sehingga mampu meminimalisir bahkan menyelesaiannya. Dalam konteks ini, perlu adanya perencanaan jangka panjang yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan program sehingga pembangunan daerah memiliki arah yang jelas ke depan. Selain itu, penyusunan dokumen tersebut juga sebagai bentuk menjabarkan dan melaksanakan kebijakan jangka panjang nasional, yakni RPJPN 2025-2045. RPJPN 2025-2045 memiliki visi "Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan". Transformasi menjadi tema utama dalam RPJPN. RPJPD Kabupaten Seram bagian Barat dalam rangka mencapai visi RPJPN akan menjabarkan upaya transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta memperkuat landasan transformasi dan menjalankan kerangka implementasi transformasi berupa pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan kesinambungan pembangunan. Penyusunan RPJPD Kabupaten Seram Bagian barat selain mengacu pada hasil evaluasi RPJPD tahun 2006-2026 dan RPJPN 2025-2045, juga mempertimbangkan berbagai dokumen sektoral, seperti RTRW, KLHS RPJPD, SDGs, dan dokumen sektoral lain.

Berangkat dari hal tersebut, RPJPD Kabupaten Seram bagian barat tahun 2025-2045 penting untuk disusun. Dokumen tersebut menjadi bagian dari sistem



perencanaan nasional dan akan memandu arah pembangunan Seram bagian Barat untuk 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, proses penyusunan RPJPD harus berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, dokumen RPJPD tersebut harus mampu menyajikan muatan yang mudah diterjemahkan dan dijabarkan ke dalam dokumen turunannya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan RPJPD Kabupaten Seram Bagian barat Tahun 2025-2045 mempertimbangkan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur ,Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 
- 
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 9);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2010-2030;
  15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

### **1.3 Hubungan Antara Dokumen**

RPJPD sebagai dokumen sangat strategis, dirumuskan dengan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, terutama RPJPN 2025-2045, RPJPD Provinsi Maluku dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Barat. Sinkronisasi dengan RPJPN diperlukan karena RPJPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Keselarasan antara RPJPD dengan RTRW diperlukan agar arah pembangunan yang termuat di dalam RPJPD selaras dengan tujuan perencanaan tata ruang dan guna menjaga prinsip pembangunan berkelanjutan.

#### **1.3.1 Keterkaitan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045**

Perumusan RPJPN 2025-2045 saat ini bertepatan dengan momentum 100 tahun Indonesia merdeka, sehingga memiliki visi besar untuk mencapai Indonesia Emas. Visi yang telah dirumuskan didalam Rancangan RPJPN, yaitu "Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Visi tersebut memiliki 5 sasaran utama, yaitu pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Visi dan sasaran utama tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 8 misi atau agenda pembangunan yang memiliki gagasan besar untuk mewujudkan transformasi Indonesia. Delapan (8) misi tersebut, yaitu:



*Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah)*

Misi atau agenda pembangunan yang membawa arah besar transformasi tersebut memiliki upaya superprioritas untuk mewujudkannya sebagai berikut:

Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai bagian dari Provinsi Maluku yang ada di kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki peran strategis dalam upaya mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Pembangunan wilayah Maluku untuk 20 tahun ke depan diarahkan sebagai "Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia" dengan koridor ekonomi yang difokuskan sebagai "Hub Ekonomi Biru Timur Indonesia" melalui pemanfaatan sumber daya laut dengan tetap mengoptimalkan sumberdaya lainnya berdasarkan prinsip berkelanjutan. Kebijakan kewilayahan ini diwujudkan melalui optimalisasi potensi unggulan dan potensial. RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat memuat kebijakan makro jangka panjang harus mampu menjabarkan dan mendukung keberhasilan transformasi Indonesia Emas 2045 melalui transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan didukung oleh SDM yang unggul, tata kelola yang berkualitas, dan infrastruktur yang memadai.

### **1.3.2 Keterkaitan RPJPD dengan RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat**

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2022-2042 beririsan dengan periode RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2025-2045, sehingga RPJPD harus membangun keselarasan dengan RTRW. RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki tujuan, yaitu mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan,

sebagai bagian dari gugusan kepulauan dengan pembangunan berbagai sektor dalam masyarakat berbudaya maluku yang luhur. Adapun kebijakan penataan ruang meliputi:

1. Peningkatan aksesibilitas di dalam dan antar wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan wilayah lain, dalam konteks wilayah sebagai bagian gugusan kepulauan;
2. Peningkatan fungsi-fungsi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya pada pusat-pusat kegiatan dan pelayanan;
3. Peningkatan produktivitas kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang didukung pengembangan industri pengolahan;
4. Pengembangan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Pemanfaatan sumber daya alam lainnya dengan berwawasan lingkungan;
6. Pemanfaatan dan peningkatan fungsi kawasan lindung; dan
7. Pengembangan khusus pada bagian wilayah yang relatif jauh di Kepulauan Lucipara.

### **1.3.3 Keterkaitan RPJPD dengan KLHS RPJPD tahun 2025-2045**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD tahun 2025-2045 merupakan dokumen penting yang memuat hasil analisis terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP). Dokumen ini penting sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 terutama dalam merespon isu pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya keselarasan antara kedua dokumen tersebut. Adapun isu strategis KLHS RPJPD yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Seram bagian barat tahun 2025-2045, sebagai berikut:

1. Infrastruktur Dasar (air dan sanitasi layak, transportasi dan komunikasi);
2. Layanan Dasar (kesehatan dan pendidikan);
3. Kebencanaan;
4. Pengelolaan sampah dan limbah;
5. Kesetaraan gender dan perlindungan anak;
6. Ekonomi; dan
7. Kelembagaan dan Tata Kelola.



## 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2025-2045 sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas yang disesuaikan dengan karakteristik dan kewenangan daerah. Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJPD, yaitu:

1. Menjadi pedoman bagi arah pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat untuk kurun waktu 20 tahun;
2. Menjadi pedoman bagi perumusan 4 (empat) kali periode RPJMD sehingga dapat tercipta pembangunan yang berkesinambungan antar setiap periode kepemimpinan kepala daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat kedepan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Sistematika Dokumen RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045**

Bab	Muatan
Bab 1 Pendahuluan	Gambaran umum RPJPD yang memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah	Gambaran kondisi existing daerah berbasis capaian kinerja pembangunan dan hasil evaluasi RPJPD. Selain itu, menyajikan proyeksi demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana serta memuat pusat pertumbuhan sesuai amanat regulasi dan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana RPJPN 2025-2045
Bab 3 Permasalahan dan Isu Strategis	Pemetaan masalah berbasis capaian kinerja dan perumusan isu strategis pembangunan jangka panjang.
Bab 4 Visi dan Misi	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah



Bab	Muatan
Bab 5 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok	Rumusan arah kebijakan sebagai tema makro dan penjabaran misi, serta rumusan sasaran pokok sebagai kinerja dan indikatornya yang akan dicapai.
Bab 6 Penutup	Memuat kaidah pelaksanaan RPJPD

*Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024*



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

## **2.1 Aspek Geografi dan Demografi**

#### A. Kondisi Geografi Wilayah

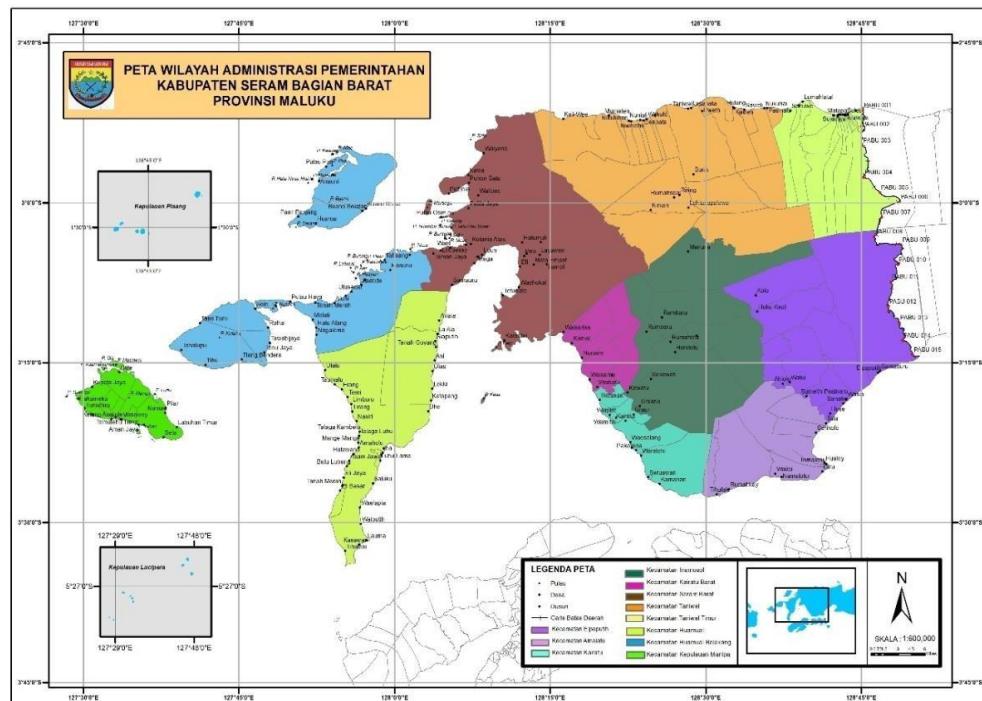
## **1) Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

### a) Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Kabupaten Seram Bagian Barat sebagian besar berada pada wilayah pulau Seram, secara geografis terletak diantara  $02^{\circ} 50' 00''$  –  $03^{\circ} 29' 38''$  LS dan  $127^{\circ} 28' 12''$  –  $128^{\circ} 50' 40''$  BT. Batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat digambarkan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Seram
  - Sebelah Timur : Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah
  - Sebelah Selatan : Laut Banda Kabupaten Maluku Tengah
  - Sebelah Barat : Laut Buru

## **Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Seram Bagian Barat**



Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama, Tahun 2023

Sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki luas sebesar 5.017,138 Km<sup>2</sup> atau sekitar 10,87% dari luas wilayah Provinsi Maluku seluas 46.158,267 Km<sup>2</sup>. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Seram Bagian Barat secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Dusun  
di Kabupaten Seram Bagian Barat**

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan (Desa)	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
1	Kairatu	Kairatu	7	15
2	Kairatu Barat	Kamal	6	-
3	Amalatu	Latu	7	2
4	Inamosol	Honitetu	5	6
5	Elpaputih	Elpaputih	7	2
6	Seram Barat	Piru	7	23
7	Huamual	Luhu	5	36
8	Huamual Belakang	Waesala	7	28
9	Kepulauan Manipa	Masawoy	7	13
10	Taniwel	Taniwel	19	3
11	Taniwel Timur	Uwen Pantai	15	-
<b>KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT</b>			<b>92</b>	<b>128</b>

*Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau*

Secara administratif Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas 11 Kecamatan, 92 Desa dan 128 Dusun. Dengan jumlah Desa terbanyak berada di wilayah Kecamatan Taniwel dengan total 19 Desa, sedangkan Kecamatan dengan total Desa terkecil ada di wilayah Kecamatan Huamual dan Kecamatan Inamosol. Namun jika dilihat dari jumlah Dusun, Kecamatan Huamual memiliki jumlah Dusun terbanyak yaitu sebanyak 36 Dusun.

### b) Topografi

Secara umum wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat didominasi oleh bentang lahan berketinggian 0-1.000 mdpl,



sedangkan ketinggian tempat di atas 1000 mdpl tidak terlalu banyak ditemui di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Secara topografi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki 67,58% dari luas wilayah berada pada ketinggian 0 – 1.000 mdpl dan 32,42% berada di atas 1.000 mdpl.

Dari semua klasifikasi ketinggian diperoleh proporsi lahan Kabupaten Seram Bagian Barat berada pada wilayah dataran rendah dengan selang topografi 0 -250 mdpl sebesar 24,26% atau seluas 120.519,20 Ha dengan sebaran di Kecamatan Seram Bagian Barat, Huamual Belakang dan Taniwel. Sedangkan daerah dengan dataran tinggi > 1000 mdpl dominasi berada di Kecamatan Elaputih, Taniwel, Inamosol dan Taniwel Timur. Adapun topografi menurut selang ketinggian dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2. Topografi Menurut Selang Ketinggian dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat**

No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Peta (dalam Ha)												Total	
		Topografi Dengan Selang Ketinggian m.d.p.l													
		0-250	250-500	500-750	750-1000	1000-1250	1250-1500	1500-1750	1750-2000	2000-2250	2250-2500	2500-2750	2750-3000		
1.	Kairatu	8.522,21	2.294,50	1.870,05	1.386,08	1.182,50	931,09	734,01	274,19	81,20	-	-	-	17.275,84	
2.	Kairatu Barat	4.913,05	4.840,25	3.733,99	1.967,63	1.383,18	694,39	67,81	-	-	-	-	-	17.600,31	
3.	Amalatu	8.919,71	5.917,02	5.299,72	3.828,04	2.332,92	1.808,55	1.699,92	1.225,12	483,80	242,71	12,94	-	31.770,47	
4.	Inamosol	3.921,07	8.291,35	9.491,91	9.014,06	10.350,09	7.698,92	5.394,89	2.355,25	503,42	108,35			57.129,31	
5.	Elaputih	8.740,07	9.768,44	9.809,32	12.356,24	12.650,68	8.880,59	6.732,52	4.065,59	2.422,53	1.236,93	387,49	42,98	77.093,38	



No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Peta (dalam Ha)												Total	
		Topografi Dengan Selang Ketinggian m.d.p.l													
		0-250	250-500	500-750	750-1000	1000-1250	1250-1500	1500-1750	1750-2000	2000-2250	2250-2500	2500-2750	2750-3000		
6.	Seram Barat	30.347, 70	16.192,5 8	8.223,27	5.654,18	5.233,96	4.244,31	3.398,16	901,04	15,11	-	-	-	74.210,31	
7	Huamual	8.196,5 5	8.001,55	7.706,52	5.979,98	4.616,86	3.543,21	1.821,77	495,67	20,43	-	-	-	40.382,54	
8.	Huamual Belakang	25.116, 81	9.539,45	6.384,76	4.186,65	2.506,94	1.111,98	235,58	69,63	-	-	-	-	49.151,80	
9.	Kepulauan Manipa	6.179,2 3	3.264,56	1.682,81	625,40	43,41	-	-	-	-	-	-	-	11.795,40	
10.	Taniwel	10.190, 85	9.665,46	13.676,2 9	11.849,92	9.043,14	8.350,90	7.580,16	5.703,59	2.203, 38	253,0 3	0,49	-	78.517,20	
11.	Taniwel Timur	5.471,9 5	3.973,72	4.317,55	4.407,22	3.692,56	4.230,83	3.921,87	4.460,92	4.540, 45	2.582, 69	246,8 7	-	41.846,62	
<b>Kab. Seram Bagian Barat</b>		<b>120.51 9,20</b>	<b>81.748, 89</b>	<b>72.196, 16</b>	<b>61.255,4 1</b>	<b>53.036, 23</b>	<b>41.494, 78</b>	<b>31.586, 70</b>	<b>19.551, 01</b>	<b>10.27 0,32</b>	<b>4.423 ,70</b>	<b>647,7 9</b>	<b>42,98</b>	<b>496.773, 18</b>	

Sumber: Dinas PUPR, Tahun 2023

### c) Kemiringan Lahan

Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat didominasi oleh kelas kemiringan lahan 25 - 40 %), yakni seluas 168.410,97 Ha atau 33,90% tersebar di Kecamatan Elpaputih, Taniwel, Inamosol, Huamual dan Seram Barat. Sedangkan kelas kemiringan lahan dominasi berikutnya pada kemiringan lereng 15-25% seluas 125.872,58 Ha atau 25,24% yang tersebar di Kecamatan Taniwel, Seram Barat, Inamosol dan Elpaputih.

Berdasarkan kelas klasifikasi lahan tersebut maka Kabupaten Seram Bagian Barat berada pada wilayah dengan morfologi berombak hingga berbukit pada bagian timur, barat dan selatan.



**Tabel 2.3. Kemiringan Lahan dan Karakteristik Morfologi Dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat**

No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Peta (dalam Ha)					<b>Total</b>	
		Kemiringan Lahan dengan Selang Persentase Kemiringan						
		<b>0,2%</b>	<b>2-15%</b>	<b>15-25%</b>	<b>25-40%</b>	<b>&gt;40%</b>		
1	Kairatu	2.987,48	5.058,86	2.824,98	4.016,64	2.387,90	17.275,84	
2	Kairatu Barat	1.018,62	6.366,27	5.002,94	4.557,53	654,94	17.600,30	
3	Amalatu	928,50	7.316,22	7.548,18	10.000,62	5.976,95	31.770,47	
4	Inamosol	245,71	14.326,24	18.056,03	20.230,21	4.271,13	57.129,31	
5	Elpaputih	1.232,33	12.916,04	18.019,12	35.178,04	9.747,86	77.093,38	
6	Seram Barat	6.185,74	28.801,22	19.854,74	16.834,93	2.533,68	74.210,31	
7	Huamual	844,77	6.060,96	9.519,97	18.137,90	5.818,95	40.382,54	
8	Huamual Belakang	4.151,80	16.631,00	12.230,87	12.194,31	3.943,82	49.151,80	
9	Kepulauan Manipa	775,94	3.789,44	4.050,26	2.950,43	229,33	11.795,40	
10	Taniwel	2.198,21	18.178,18	21.090,51	27.155,05	9.895,25	78.517,19	
11	Taniwel Timur	1.271,12	5.779,98	7.675,00	17.155,32	9.965,21	41.846,62	
<b>Kab. Seram Bagian Barat</b>		21.840,20	125.224,42	125.872,58	168.410,97	55.425,01	496.773,18	
<b>Persentase (%)</b>		4,40	25,21	25,34	33,90	11,16	100,00	
<b>Morfologi</b>		Datar	Berombak	Bergelombang	Berbukit	Bergunung	Datar	

*Sumber: Dinas PUPR, Tahun 2023*

#### d) Hidrologi

Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki sumberdaya air yang cukup melimpah, baik sumberdaya air permukaan maupun sumberdaya air bawah tanah. Dengan adanya curah hujan yang lebih besar 2000 mm/tahun dapat dipastikan bahwa semua sungai-sungai yang mengalir di daerah ini adalah bersifat permanen



atau selalu berair sepanjang tahunnya.

Sungai-sungai sebagai salah satu unsur geografi seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada umumnya membentuk pola alliran dendritik (mendaun) yang mengalir ke arah utara dan selatan, serta ke barat, sedangkan sungai-sungai yang mengalir di pulau Buano, Pulau Kelang dan Pulau Manipa cenderung radier (melingkar) keseluruh arah wilayah pulau-pulau tersebut. Adapun sungai-sungai yang mengalir di semenanjung Huamual adalah mengalir timur-barat, mengingat wilayah ini menjorok, melintang utara-selatan.

Wilayah tangkapan hujan dari pola aliran tersebut dapat dibagi menjadi:

- Pada daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, batas pemisah air morfologi ("*morphological water devided*") adalah berarah relatif Timur-Barat,
- Pola Semenanjung Huamual batas air pemisah morphologinya berarah Utara-Selatan.

Ketika pulau lainnya seperti Pulau Buano, Pulau Kelang, dan Pulau Manipa puncak air cenderung mengkerut di bagian tengah pulau-pulau tersebut.

Sumberdaya air disamping berfungsi untuk kehidupan sehari-hari juga berfungsi untuk berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia seperti pertanian, perikanan, perindustrian, pembangkit tenaga listrik dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan hidrologi yaitu curah hujan, tipe iklim dan sungai.

Kondisi hidrologi di Kabupaten Seram Bagian Barat, meliputi potensi air tanah dan potensi air sungai, dimana potensi air tanah di Kabupaten Seram Bagian Barat cukup baik. Terdapat 46 (empat puluh enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan DAS terluas DAS Tala seluas 77.296,69 Ha atau 15,56% dari luas wilayah mencakup wilayah Kecamatan Elpaputih, Inamosol, Seram Barat, Taniwel dan Taniwel dengan total luas Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu 496.774,24 Ha.



Dari jumlah sungai dan persebarannya yang mencakup keseluruhan wilayah maka Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki potensi air permukaan yang sangat besar, dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan domestik (air bersih dan air baku), serta untuk kegiatan pertanian (irigasi) untuk tanaman pangan lahan basah.

#### e) Batimetri

Kondisi Batimetri kelautan (Laut lepas, Selat dan Teluk) yang mengitari Kabupaten Seram Bagian Barat termasuk ketiga pulau-pulau terbesarnya dapat diuraikan seperti berikut:

- Berdasarkan kontur dapat diuraikan bahwa kondisi pantai Kabupaten Seram Bagian Barat bertipe pantai yang curam, karena kedalaman laut yang terdekat dengan pantai adalah 50-100 M, hal ini ditunjukan oleh warna laut biru tua.
- Demikian pula dengan Teluk Piru, Teluk Latira, Teluk Elputih (batas dengan Kabupaten Maluku Tengah), Teluk Hatuputih, Selat Buano, Selat Seram, dan Selat Kelang, serta Selat Manipa (batas dengan Kabupaten Buru) memiliki kedalaman diatas 100 M.

Demikian kondisi tersebut, maka desa-desa maupun dusun yang ada pada pesisir pantai dengan daya dukung sumberdaya alam potensial sebagai komoditas unggulan untuk di ekspor keluar daerah, maka sangat memungkinkan dapat dibangun pelabuhan-pelabuhan alam yang tidak terganggu oleh kedangkalan pantai. Disisi lain bahwa lipatan laut yang sangat luas yang mengelilingi Kabupaten Seram Bagian Barat dari utara-barat-selatan sampai ke timur adalah memendam sumberdaya hayati kelautan yang sangat besar untuk diolah sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat daerah ini.

#### f) Klimatologi

Parameter klimatologi Kabupaten Seram Bagian Barat adalah tipe iklim, curah hujan dan suhu udara. Kondisi iklim wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dan sekitarnya secara umum ditandai dengan hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi dan



sangat dipengaruhi oleh angin musim, dimana kondisi iklim Musim barat umumnya berlangsung pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret, sedangkan pada Bulan April merupakan masa transisi ke musim Timur. Musim Timur berlangsung pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober disusul oleh masa puncak pada bulan November yang merupakan transisi ke musim Barat.

Suhu tertinggi di kabupaten Seram Bagian Barat tercatat sebesar  $350^{\circ}\text{C}$  di bulan Februari dan April, untuk suhu terendah tercatat sebesar  $200^{\circ}\text{C}$  di bulan September dan Desember 2020. Di tahun 2020, curah hujan tertinggi ada di bulan Juni yaitu sebesar 621 mm dan curah hujan terendah ada di bulan Januari sebesar 52 mm. Curah hujan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan curah hujan 2000-3000 mm/tahun. Penyinaran Matahari rata-rata 60% dengan tekanan udara pertahun di bawah rata-rata dan kelembaban nisbi rata-rata 85%. Kecepatan angin rata-rata 2 knot dengan arah angin terbanyak dari arah Tenggara, sedangkan kecepatan angin terbesar terjadi pada Bulan Agustus sebesar 8 knot. Arah angin terbanyak pada saat kecepatan angin terbesar adalah dari arah Barat.

**Tabel 2.4. Kondisi Klimatologi Rata-Rata Tahun 2023  
Kabupaten Seram Bagian Barat**

Bulan	Suhu Udara ( $^{\circ}\text{C}$ )	Kelembaban Udara (%)	Tekanan Udara (mb)	Kecepatan Angin (Knot)	Penyinaran Matahari (%)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
Januari	28	79	1009,9	2	76	52	7
Februari	28	79	1010,8	2	70	57	8
Maret	27	85	1010,7	1	60	200	18
April	27	86	1010,8	2	69	67	19
Mei	27	88	1010,4	2	53	184	21
Juni	26	91	1010,8	2	19	621	29
Juli	25	91	1010,3	2	13	505	30
Agustus	25	90	1011,4	3	34	497	24
September	26	93	1010,7	3	34	451	27
Oktober	27	88	1010,0	3	59	251	19
November	28	86	1009,9	2	62	74	18
Desember	28	84	1008,6	2	60	188	20

*Sumber: Dinas PUPR, Tahun 2023*

**Tabel 2.5. Sebaran Curah Hujan  
Kabupaten Seram Bagian Barat**

No	Kecamatan	Curah Hujan (mm/tahun)		Luas (Ha)
		2000 - 2500 mm	2500 - 3000 mm	
1.	Elpaputih	24.746,39	52.346,86	77.093,25
2.	Huamual	-	44.301,80	44.301,80
3.	Huamual Belakang	13.142,13	36.009,68	49.151,81
4.	Inamosol	36.578,25	20.551,07	57.129,32
5.	Kairatu		17.275,84	17.275,84
6.	Kairatu Barat	14.802,91	2.797,39	17.600,31
7.	Kairatu Timur		31.770,46	31.770,46
8.	Pulau Manipa	8.894,45	2.900,95	11.795,40
9.	Seram Barat	73.455,62	754,67	74.210,30
10.	Taniwel	78.517,21		78.517,21
11.	Taniwel Timur	38.239,34	3.607,32	41.846,65
	Luas (Ha)	288.376,30	212.316,05	212.316,05
	Proporsi (%)	57,60	42,40	100,00s

*Sumber: Dinas PUPR, Tahun 2023*

### **g) Penggunaan Lahan**

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Seram Bagian Barat yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Barat dikelompokan menjadi 5 (lima) kawasan yaitu :

- Kawasan pertanian lahan basah meliputi kecamatan Kairatu (Desa Waimital dan Waihatu) dan Kecamatan Seram Barat (Desa Kawa). Kawasan Lahan kering meliputi hampir seluruh wilayah Kecamatan Seram Barat, Taniwel dan Kecamatan Kairatu.
- Kawasan Perikanan yaitu seluruh Kecamatan Waesala, Kecamatan Seram Barat (Eti, Kaibobo, Ariate) dan Kecamatan Huamual.
- Kawasan Pemukiman meliputi hamparan dari Piru-Eti dataran Huamual di Kecamatan Seram Barat dan Dataran Waeruapa di Kecamatan Kairatu yang menghubungkan Pulau Seram dan Kota Provinsi serta Pulau-pulau sekitarnya.

- Kawasan Pegunungan meliputi Kecamatan Kairatu dan Hunitetu (Desa Hunitetu, Rambatu, Rumberu, Manusa, Hukuanakota, Huku kecil, Watui, Abio, Buria, Riring dan Ahiolo, ohiasapalewa, Neniari, Rumahsoal, Laturake) yang merupakan potensi pengembangan komoditi dataran tinggi (Sayuran, buah-buahan).
- Kawasan Pantai yaitu meliputi hampir seluruh kecamatan dengan potensi budidaya Perikanan dan Pariwisata.

Penggunaan lahan/penutup lahan yang paling dominan di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Hutan Lahan Kering Sekunder, yaitu seluas lebih dari 50% dari luas Kabupaten Seram Bagian Barat, urutan luas berikutnya diikuti oleh Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak yakni seluas 23,87 % dari luas Kabupaten Seram Bagian Barat, sedangkan kawasan pemukiman mencakup 0,63 % dari luas Kabupaten Seram Bagian Barat. Kawasan pemukiman tercakup di dalamnya pemukiman pedesaan, pemukiman transmigrasi dan pemukiman perkotaan.

**Tabel 2.6. Sebaran Tutupan Lahan/Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat**

Kecamatan	Jenis Penutupan Lahan (dalam Ha)					
	Hutan Rimba	Hutan Bakau	Semak Belukar	Padang Rumput	Tanah Kosong	Perkeb/Kebun
1. Kairatu	8.586,21	13,69	3.138,10	84,05	-	1.471,76
2. Kairatu Barat	8.721,91	-	5.865,42	701,19	-	-
3. Amalatu	30.225,76	-	308,12	-	-	670,54
4. Inamosol	47.112,78	-	8.764,41	367,58	14,62	-
5. Elpaputih	72.206,73	-	1.372,42	-	23,44	2.767,58
6. Seram Barat	45.747,14	-	17.530,04	5.821,04	-	-
7. Huamual	27.902,07	-	10.221,02	1.504,74	-	-
8. Huamual Belakang	21.643,11	358,28	17.310,05	8.396,17	-	-
9. Kepulauan Manipa	8.988,07	-	2.006,04	733,76	-	-
10. Taniwel	61.512,94	-	14.961,09	370,30	1.053,72	-
11. Taniwel Timur	34.995,05	-	5.777,18	-	720,22	-

Kecamatan	Jenis Penutupan Lahan (dalam Ha)					
	Hutan Rimba	Hutan Bakau	Semak Belukar	Padang Rumput	Tanah Kosong	Perkeb/ Kebun
Kab. Seram Bagian Barat	367.641,77	371,97	87.253,88	17.978,83	1.812,01	4.909,88
Persentase (%)	74,01	0,07	17,56	3,62	0,36	0,99

Lanjutan

Kecamatan	Jenis Penutupan Lahan (dalam Ha)					
	Tegalan/ Ladang	Sawah	Permukiman/ Kegiatan	Sungai/ Perairan	Empang	Total
1. Kairatu	1.908,70	1.024,48	1.017,91	47,93	-	17.292,82
2. Kairatu Barat	1.468,84	152,48	700,24	8,15	4,46	17.622,70
3. Amalatu	-	-	350,79	215,25	-	31.770,46
4. Inamosol	604,64	-	114,52	110,79	-	57.089,34
5. Elpaputih	-	-	207,50	515,65	-	77.093,33
6. Seram Barat	3.749,00	75,94	1.083,24	201,37	-	74.207,76
7. Huamual	-	-	757,08	0,16	-	40.385,07
8. Huamual Belakang	879,21	-	450,51	114,47	-	49.151,80
9. Kepulauan Manipa	-	-	67,52	-	-	11.795,40
10. Taniwel	-	-	335,13	284,04	-	78.517,21
11. Taniwel Timur	-	-	172,05	182,18	-	41.846,67
Kab. Seram Bagian Barat	8.610,39	1.252,91	5.256,49	1.679,99	4,46	496.772,57
Persentase (%)	1,73	0,25	1,06	0,34	0,00	100,00

Sumber: Dinas PUPR, Tahun 2023

## h) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama

antara masyarakat dan peran pemerintah. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan ditujukan dengan beberapa indikator sebagai berikut:

**Tabel 2.7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2023**

No	Indikator	Capaian Indikator			
		2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Udara	90,41	93,33	93,07	92,22
2	Indeks Kualitas Air	55,67	55,56	54,72	50,49
3	Indeks Kualitas Lahan	88,40	87,85	87,85	87,85
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,50	79,80	77,29	77,95

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024*

Secara total Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023 berada pada level 77,95, dimana angka ini pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 masih tetap berada pada kategori Baik ( $70 < x < 90$ ). Capaian Indeks Kualitas Udara sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 berada pada kategori Sangat Baik ( $90 < x \leq 100$ ) dimana pada tahun 2023 mencatat angka 92,22. Sedangkan untuk Indeks Kualitas Air pada rentang tahun 2020-2023 berada pada kategori Sedang ( $50 < x < 70$ ) dimana tercatat tahun 2023 sebesar 50,49.

Permasalahan persampahan menjadi isu pokok dalam perkembangan lingkungan hidup saat ini. Sampah yang dikelola berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja, dan sampah spesifik), sampah sejenis sampah rumah tangga (berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya), dan sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik).

Sepanjang tahun 2023 sampah yang tertangani adalah berjumlah 2.761 Ton dari target 3.683 Ton yang ditetapkan atau mencapai 73,7%.



Capaian pengelolaan persampahan ini hanya terpusat pada 4 Desa di wilayah pusat pemerintahan kabupaten, dimana seluruh sampah dibuang pada 15 unit TPS dan 1 Unit TPA. Sedangkan terhadap 88 Desa lainnya masih mengolah sampah secara konvensional seperti dikumpulkan dikolam, ditampung pada lokasi sampah yang ditentukan oleh pemerintah desa, serta dibakar. Armada pengangkut sampah di Kabupaten Seram Bagian Barat masih sangat terbatas yaitu terdiri dari 5 unit mobil pengangkut sampah, 2 unit alat berat, dan 1 unit tronton. Sepanjang tahun 2023 telah tersedia 29 unit komposter sampah organik, dimana telah mengolah sebanyak 33,9 Ton sampah organik dan telah menghasilkan 6,7 Ton POC dan 20,3 Ton POP.

## **2) Potensi Sumber Daya Alam**

Potensi sumber daya alam Kabupaten Seram Bagian Barat meliputi mineral logam, non logam dan batuan, panas bumi, air permukaan, dan air tanah. Berdasarkan dari berbagai sumber penelitian, maka gambaran umum terhadap potensi sumber daya alam di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut:

### **a) Mineral Logam**

- Potensi Nikel pada zona anomali untuk nikel baik itu yang berasal dari pelapukan (lateritik) ataupun yang bersifat sulfida terletak di daerah Piru dan umumnya di zona tektonit dengan kandungan nikelnya Ni: 1,68%. Kandungan nikel sulfida yang dianalisis menunjukkan kadar yang cukup signifikan Ni(S): 3.02, dengan demikian nikel sulfida ini menjadi alternatif untuk menggantikan nikel laterit;
- Potensi Nikel di Desa Hualoy dan Seriholo (Kecamatan Kairatu) dengan kualitas Ni 0,21% - 0,94%;
- Potensi pasir besi berlokasi di Pantai Hunipopu, Desa Ariate Kecamatan Huamuaal dengan luas sebaran  $\pm$  1.401 Ha;
- Potensi Nikel di Kaibobu dan Supe dengan luas areal 40.000 Ha;
- Emas dan tembaga di Desa Neniari, Hukuanakota dengan luas areal 50.000 Ha.



### **b) Mineral Non Logam dan Batuan**

- Berdasarkan Hasil Inventarisasi Dan Evaluasi Mineral Non Logam di daerah Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Utara, Desember 2006 yang dilaksanakan oleh Pusat Sumber Daya Geologi diperoleh potensi bahan galian batuan ultrabasa, serpentinit, batugamping, lempung dan sirtu sungai;
- Berdasarkan Profil Pertambangan DPMPTSP, Prov. Maluku, 2012 terdapat potensi Marmer yang berlokasi di Gunung Nakele dan Gunung Kasieh, Kec. Taniwel; Gunung Anuena dan Gunung Keki, Pulau Buano. Memiliki cadangan masing-masing sebesar 3.733.000.000 ton, 1.047.600.000 ton, 412.799.999 ton, dan 11.200.000 ton;
- Potensi Marmer di W. Sapalewa dengan luas 25.000 Ha;
- Potensi Garnet di Pulau Kelang dengan luas 7.000 Ha.

### **c) Panas Bumi**

- Desa Elpaputih, P. Seram dengan potensi 25 Mwe;
- Panas Bumi Pohon Batu Desa Kawa Kecamatan Seram Barat dengan potensi panas bumi 15 Mwe.

### **d) Air Tanah**

Berdasarkan peta Cekungan Airtanah yang dikeluarkan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan (DTLGKP) di Wilayah Kabupaten Seram Barat terdapat 4 (empat) cekungan airtanah yaitu Boano, Kawa, Laela dan Waesamu dengan jumlah air tanah 301 juta m<sup>3</sup>/tahun.

### **e) Air Permukaan**

Terdapat 29 sungai yang terindikasi berair sepanjang tahun di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dilihat dari jumlah sungai dan persebarannya yang mencakup keseluruhan wilayah maka Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki potensi air permukaan yang sangat besar, dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan



domestik (air bersih dan air baku), serta untuk kegiatan pertanian (irigasi) untuk tanaman. Pemenuhan kebutuhan keperluan air bersih dan air baku teridentifikasi di Kecamatan Seram Bagian Barat (RISPAM Kab. Seram Bagian Barat 2014) untuk alternatif pengembangan SPAM Kota Piru, yaitu S. Amarale, S. Cabang Tiga, S. Waemeteng, S. Batuluhu dan S. Laiuen. Selain potensi yang sudah terindentifikasi potensi air bersih dan air baku pada wilayah yang lain akan menjadi prioritas pembangunan bagi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

### **3) Wilayah Rawan Bencana**

Undang Undang No. 24 tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Morfologi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Secara geografis, bentuk relief Kabupaten Seram yang terdiri dari pesisir dan perbukitan dengan jarak yang pendek antara keduanya, sehingga tingkat kelandaian lerengnya menjadi relatif curam dan pendek. Hal ini berakibat pada derasnya arus aliran sungai pada saat musim hujan, sehingga mengakibatkan banjir dan banjir bandang, terutama pada daerah aliran sungai yang berada di lahan gundul dan kritis.

Berdasarkan Data sejarah kejadian bencana di Kabupaten Seram Bagian Barat sejak 2019-2023, tampak bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat memang sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya banjir. Bencana-bencana tersebut terjadi setiap tahun dan berdampak kepada masyarakat karena kerusakan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, fasilitas umum maupun permukiman masyarakat.

Data mengenai bencana alam merupakan bahan informasi yang sangat penting dalam merumuskan Rencana Tata Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana bencana alam yang terjadi, seperti;

bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor serta tsunami dan abrasi pantai; untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjabaran berikut:

**Tabel 2.8. Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Daerah Rawan Bencana (Desa)					
2	Jumlah Penanggulangan Bencana (Kejadian)					
	- Gempa Bumi	-	-	-	-	-
	- Banjir	8	25	11	19	12
	- Tanah Longsor	3	1	3	1	4
	- Amblasan Tanah	1	-	1	-	6
	- Angin Kencang	1	4	2	4	1
	- Cuaca Ekstrim	1	-	-	-	4
	- Kebakaran Rumah	2	3	5	3	3
	- Genangan Air	1	-	-	-	1
	- Abrasi Pantai	1	-	-	-	1
	- Orang Hilang	1	5	-	4	1
	- Konflik Sosial	1	-	-	1	1
3	Jumlah Korban Jiwa (Orang)					
	- Gempa Bumi (Meninggal)	22	-	-	-	-
	- Banjir	-	-	-	-	-
	- Tanah Longsor	-	-	-	626	6
	- Amblasan Tanah	-	-	-	8	-
	- Angin Kencang	-	-	-	-	-
	- Cuaca Ekstrim	-	-	-	-	-
	- Kebakaran Rumah	-	-	-	-	-
	- Kebakaran Lahan	-	-	-	-	-
	- Abrasi Pantai	-	-	-	-	-
	- Orang Hilang	8	7	-	-	-
4	Jumlah Korban Luka-luka (Orang)					
	- Gempa Bumi	47	-	-	-	-
	- Banjir	-	-	-	-	-
	- Tanah Longsor	-	-	-	-	-
	- Kekeringan	-	-	-	-	-
	- Angin Kencang	-	-	-	-	-
	- Cuaca Ekstrim	-	-	-	-	-

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
5	Jumlah Pengungsi (Orang)					
-	Gempa Bumi	6.224	-	-	-	-
-	Banjir	113	54	1.003	2.579	2.215
-	Tanah Longsor	-	-	7	1.838	428
-	Kekeringan	-	-	-	-	-
-	Angin Kencang	146	-	37	25	7
-	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-	10
-	Kebakaran	30	-	40	12	20
6	Tempat Pengungsian (Jumlah Lokasi)	NA	NA	NA	NA	300
7	Bantuan Logistik Korban Bencana (Paket)					
8	Jumlah KK yang mendapatkan bantuan sosial tidak terencana	1.500	-	-	-	-
9	Jumlah Dana Penanggulangan/Penyaluran (Rupiah)	34.035.000.000	-	-	250.000.000	161.180.000

Sumber: BPBD, 2024

Perubahan dan perkembangan kejadian bencana tiap tahunnya dapat menjadi dasar dalam melakukan analisis kecenderungan kejadian. Untuk kejadian bencana yang tercatat pernah terjadi maupun yang berpotensi terjadi, perlu dilakukan analisa ulang terkait dengan kecenderungan untuk setiap jenis bahaya tersebut. Berdasarkan data sejarah kejadian kebencanaan daerah, penetapan kecenderungan dilakukan dengan kesepakatan bersama dari seluruh unsur stakeholders terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dari 10 jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat, terdapat 7 (tujuh) jenis bencana yang ditetapkan memiliki kecenderungan meningkat yaitu banjir, tanah longsor, amblasan tanah, angin kencang, cuaca ekstrim, orang hilang dan konflik sosial.

### a) Indeks Resiko Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menetapkan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai salah satu daerah rawan bencana

dimana Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) untuk Kabupaten Seram Bagian Barat untuk tahun 2022 ada pada angka 167,46 dengan kelas resiko tinggi. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko bencana. Sebagaimana data BNPB bahwa Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang dinilai dengan 71 indikator, terhadap resiko bencana untuk wilayah Maluku masih berada pada angka 0,283 dengan kelas kapasitas Rendah. Dimana untuk Kabupaten Seram Bagian Barat Indeks Kapasitas (salah satu komponen IRBI) untuk tahun 2023 berada pada angka 0,49 dengan kelas kapasitas sedang. Kondisi ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah belum sepenuhnya menerapkan seluruh komponen atau indikator yang diwajibkan oleh BNPB dari segi ketahanan daerah terhadap resiko bencana.

**Tabel 2.9. Kajian Resiko Bencana Kabupaten Seram Bagian Barat pada Level Bencana Sedang dan Tinggi**

No	Indikator	Sosial (jiwa)		Fisik(Juta Rupiah)		Ekonomi (Juta Rupiah)		Lingkungan (Ha)	
		Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
1	Kajian Resiko Multi Bencana	49.963	156.190	209.163	1.336.319	347.301	367.473	133.981	40.364
2	Kajian Resiko bencana gempah bumi	109.696	60.799	348.354	631.999	225.094	74.618	-	-
3	Kajian Resiko bencana Tsunami	10.111	34.101	29.261	346.513	1.046	22.690	2	25
4	Kajian Resiko Bencana Banjir	32.395	24.250	59.240	250.403	34.474	33.704	503	262
5	Kajian Resiko Bencana Tanah Longsor	17.802	10.916	128.692	255.513	253.866	143.891	32.409	2.038
6	Kajian Resiko Bencana kekeringan	212.302	-	-	-	530.359	-	11.547	-
7	Kajian Resiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	-	-	-	462.004	45.144	18.351	3.546

No	Indikator	Sosial (jiwa)		Fisik(Juta Rupiah)		Ekonomi (Juta Rupiah)		Lingkungan (Ha)	
		Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
8	Kajian Resiko Bencana Cuaca Extrrim	47.624	100.456	104.226	993.347	76.579	67.507	-	-
9	Kajian Resiko Bencana Gelombang extrim dan Abrasi	3.423	43.890	8.777	458.565	24.937	28.192	168	193
10	Kajian Resiko Bencana Banjir bandang	6.152	1.400	21.460	112.326	11.073	39.428	97	387
11	Kajian Resiko bencana Likuefaksi	116.432	187.559	360.064	2.021.196	436.932	382.437	134.829	40.497

Sumber: BNPB, 2024

### b) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks ketahanan pangan adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks Ketahanan Pangan meliputi beberapa indikator diantaranya adalah ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2023 adalah sebesar 59,5 atau naik 0,9 poin pada tahun 2022 yaitu sebesar 58,6.

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan salah satu indikator pendukung yang digunakan dalam menilai kualitas konsumsi pangan yang merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Dengan pendekatan PPH keadaan perencanaan penyediaan dan konsumsi penduduk diharapkan dapat memenuhi tidak hanya kecukupan gizi tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat dan daya beli masyarakat. Widya Karya

Nasional Pangan ditetapkan minimal 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 63 gram/kapita/hari untuk protein.

**Tabel 2.10. Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023**

Tahun	Skor Pola Pangan Harapan
2019	62
2020	65,6
2021	71,2
2022	72,7
2023	75,4

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2024*

Data di atas menunjukkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,68 point. Dimana pada tahun 2023 skornya mencapai angka 75,4 meningkat 2,7 point dari tahun 2022.

**Tabel 2.11 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Tahun 2023**

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita / Hari	Kkal/Kap	%	%KA E	Bobot	Skor Aktua I	Skor AKE	Skor Mak s	Skor PPH
1	Padi-padian	244,1	994	51,4	46,2	0,5	25,7	23,1	22	22
2	Umbi-Umbian	137,1	285	14,7	13,2	0,5	7,4	6,6	6	6
3	Pangan Hewani	108,2	138	7,2	6,4	2	14,3	12,9	24	12,9
4	Minyak dan Lemak	25,1	222	11,5	10,3	0,5	5,7	5,2	5	5
5	Buah/ Biji Berminyak	9,3	50	2,6	2,3	0,5	1,3	1,2	1	1
6	Kacang-Kacangan	6,8	21	1,1	1	2	2,2	1,9	10	1,9
7	Gula	26,4	97	5	4,5	0,5	2,5	2,3	2	2
8	Sayur dan Buah	189,8	106	5,5	4,9	5	27,3	24,5	30	24,5
9	Lain- lain	39,1	21	11	1	-	-	-	-	-
<b>Total</b>			<b>1.933</b>	<b>100</b>	<b>89,9</b>		<b>86,4</b>	<b>77,7</b>	<b>100</b>	<b>75,4</b>

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2024*

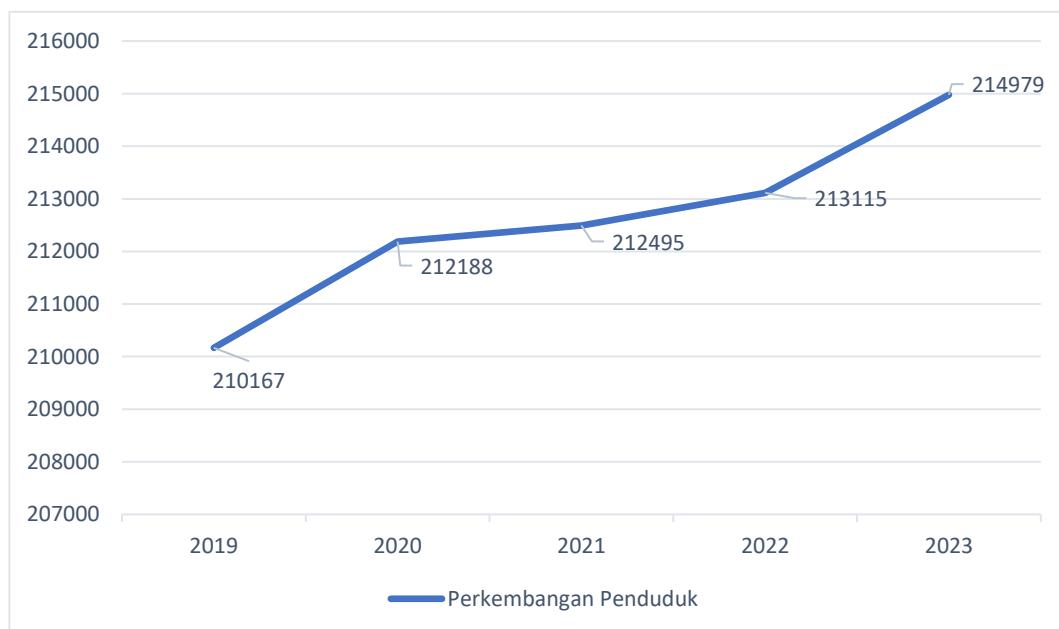


## B. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Terdapat beragam faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk. Misalnya, faktor usia, penyakit, kecelakaan dan bencana alam, maupun bencana non alam. Di lain pihak, ketabilan wilayah, peningkatan gizi, dan kesehatan dapat mengakibatkan jumlah penduduk cenderung naik. Fenomena bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu sehingga gejala dinamika penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kelahiran (fertilitas atau natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi).

Data jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat didasarkan pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 214.979 jiwa, dari sebelumnya pada tahun 2022 sebanyak 213.115 jiwa. Trend perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019-2023 disajikan pada grafik dibawah ini.

**Gambar 2.2. Gambaran Perkembangan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023 (jiwa)**



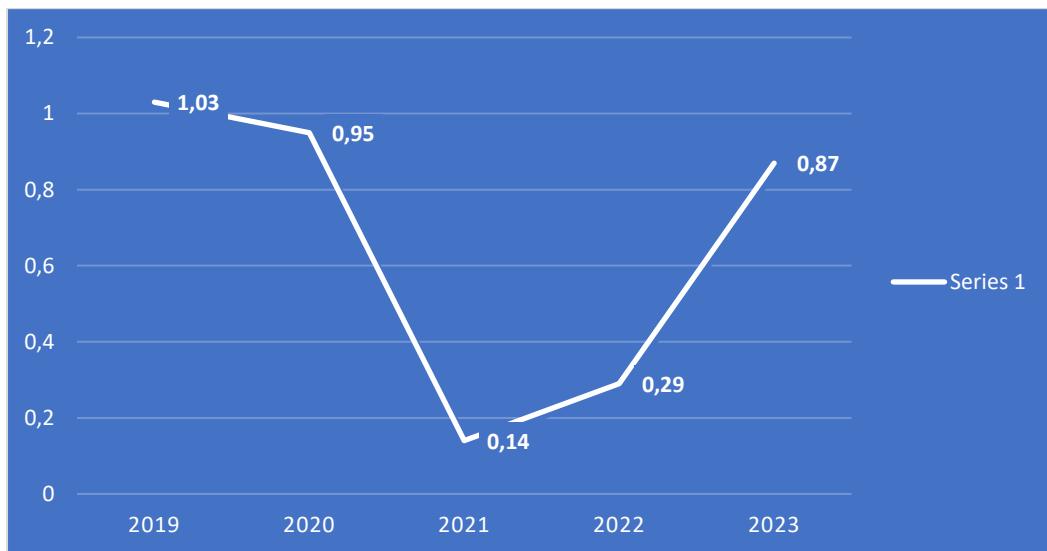
*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024*

Perkembangan penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat di atas sebagaimana Grafik di atas pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah

penduduk sebesar 1.864 jiwa dari tahun 2022. Perkembangan penduduk terbesar terjadi pada tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu meningkat sebesar 2.021 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023 sebesar 0,87% hal ini mengalami kenaikan sebesar 0,58 poin dibandingkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 sebesar 0,29%. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2019-2023 disajikan pada grafik dibawah ini.

**Gambar 2.3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023**



*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024*

Apabila dilihat secara terpisah, jumlah penduduk laki-laki dan penduduk Perempuan, selama periode 2019-2023, terdapat fakta bahwa penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk Perempuan. Pada tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 108.538 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 106.441 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per kecamatan tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022 dan 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022			Jumlah Penduduk Tahun 2023		
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Huamual	23.668	23.101	46.769	23.693	23.274	46.967
2	Seram Barat	17.810	17.448	35.258	17.891	17.707	35.598
3	Huamual Belakang	17.641	16.869	34.510	17.904	17.325	35.229
4	Kairatu	13.259	13.274	26.533	13.307	13.410	26.717
5	Taniwel	8.163	7.765	15.928	8.187	7.860	16.047
6	Kaitau Barat	7.275	7.034	14.309	7.187	6.973	14.160
7	Amalatu	6.529	6.438	12.967	6.596	6.535	13.131
8	Kepulauan Manipa	3.784	3.749	7.533	3.916	3.877	7.793
9	Taniwel Timur	4.719	3.619	7.338	3.765	3.690	7.455
10	Inamosol	3.479	3.302	6.781	3.487	3.290	6.777
11	Elpaputih	2.659	2.530	5.189	2.605	2.500	5.105
<b>Total</b>		<b>107.986</b>	<b>105.129</b>	<b>213.115</b>	<b>108.538</b>	<b>106.441</b>	<b>214.979</b>

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024*

Jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2022 meningkat 0,87% pada tahun 2023 atau sebanyak 1.864 Jiwa. Terkait dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan Perempuan lebih dinominasi oleh penduduk laki-laki dengan perbedaan jumlah jiwa sebesar 0,98%.

Selain jumlah penduduk, perlu diketahui juga jumlah keluarga. Pada tahun 2023, jumlah keluarga di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebanyak 58.301 keluarga dengan jumlah Kepala Keluarga adalah jenis kelamin laki-laki dengan total 46.454 KK.

**Tabel 2.13. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Huamual	9.940	2.522	12.462
2	Seram Barat	7.861	2.010	9.871
3	Huamual Belakang	7.313	1.616	8.929
4	Kairatu	6.146	1.719	7.865
5	Kairatu Barat	3.330	928	4.258

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
6	Taniwel	3.353	749	4.102
7	Amalatu	2.834	854	3.688
8	Taniwel Timur	1.622	448	2.070
9	Kepulauan Manipa	1.637	391	2.028
10	Inamosol	1.392	302	1.694
11	Elpaputih	1.026	308	1.334
<b>Total</b>		<b>46.454</b>	<b>11.847</b>	<b>58.301</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024

Sebagaimana Tabel di atas jumlah keluarga terbesar berada di Kecamatan Huamual sebesar 12.462 keluarga atau sebesar 21,38% dari total jumlah keluarga secara kabupaten, sedangkan jumlah keluarga terkecil berada di Kecamatan Elpaputih yaitu sebesar 1.334 keluarga atau sebesar 2,29% dari total jumlah keluarga secara kabupaten. Dari total 58.301 keluarga terdapat 11.847 keluarga atau 20,32% merupakan kepala keluarga perempuan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian terkait dengan ketahanan keluarga dan beban perempuan sebagai tulang punggung perekonomian keluarga, serta kemungkinan meningkatnya trend perempuan dewasa yang memilih untuk tidak menikah atau menjadi orangtua tunggal bagi anak-anaknya.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan terjadi pada penduduk kelompok umur 15-19 Tahun. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki terjadi pada penduduk kelompok umur 20-59 Tahun. Proporsi penduduk lanjut usia laki-laki terhadap penduduk laki-laki adalah sebesar 7,79%, sementara itu proporsi penduduk lanjut usia perempuan terhadap penduduk perempuan adalah 7,47%. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.14. Jumlah Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023**

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	00-04	7.581	7.151	14.732
2	05-09	11.720	11.197	22.917

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
3	10-14	12.184	11.421	23.605
4	15-19	12.557	11.959	24.516
5	20-24	11.248	11.398	22.646
6	25-29	8.574	8.614	17.188
7	30-34	7.076	7.203	14.279
8	35-39	7.543	7.585	15.128
9	40-44	7.044	7.300	14.344
10	45-49	5.691	5.805	11.496
11	50-54	5.011	4.890	9.901
12	55-59	3.852	3.967	7.819
13	60-64	3.210	3.163	6.373
14	65-69	2.164	2.023	4.187
15	70-74	1.343	1.295	2.638
16	>75	1.740	1.470	3.210
<b>Total</b>		<b>108.538</b>	<b>106.441</b>	<b>214.979</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024

Penduduk usia produktif secara ketenagakerjaan (usia 15-64 tahun) sebanyak 143.690 jiwa atau sebesar atau 66,84%, dimana jumlah penduduk usia produktif perempuan dan laki-laki hampir sama yaitu 71.806 jiwa laki-laki dan 71.884 jiwa perempuan.

Sebagaimana data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat hasil pendaftaran kependudukan berdasarkan kelompok pekerjaan tertentu. Kondisi pada tahun 2023 penduduk dengan status belum bekerja adalah sebanyak 66.545 jiwa, sedangkan penduduk dengan kelompok pekerjaan terbanyak adalah pada kelompok pekerjaan yang bekerja pada urusan pertanian/peternakan dengan total 33.054 jiwa. Distribusi penduduk berdasarkan kelompok pekerjaan tertentu disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan Tertentu Tahun 2023**

No	Kecamatan	Belum Bekerja	Pelajar/ Mahasiswa	Aparatur/ Pejabat Negara	Tenaga Pengajar	Wiraswasta
1	Kairatu	8.015	6.664	1.040	415	1.978
2	Seram Barat	11.626	8.804	1.745	424	1.787
3	Taniwel	4.960	4.716	265	282	374

No	Kecamatan	Belum Bekerja	Pelajar/Mahasiswa	Aparatur/Pejabat Negara	Tenaga Pengajar	Wiraswasta
4	Huamual Belakang	10.437	10.559	216	162	818
5	Amalatu	4.188	3.415	380	164	487
6	Inamosol	2.118	1.963	77	57	141
7	Kairatu Barat	3.900	3.621	405	158	1.174
8	Huamual	14.806	12.930	643	304	1.526
9	Kepulauan Manipa	2.391	2.213	56	42	199
10	Taniwel Timur	2.398	2.023	89	89	207
11	Elpaputih	1.706	1.472	44	40	131
<b>Total</b>		<b>66.545</b>	<b>58.380</b>	<b>4.960</b>	<b>2.137</b>	<b>8.822</b>

*lanjutan*

No	Kecamatan	Pertanian/Peternakan	Nelayan	Agama dan Kepercayaan	Tenaga Kesehatan	Pensiunian	Lainnya
1	Kairatu	3.444	162	46	30	165	4.758
2	Seram Barat	4.658	672	34	57	131	5.660
3	Taniwel	2.834	73	20	26	57	2.440
4	Huamual Belakang	5.675	1.183	5	17	13	6.144
5	Amalatu	2.064	22	9	11	58	2.333
6	Inamosol	1.245	1	11	2	25	1.137
7	Kairatu Barat	1.994	144	14	16	51	2.683
8	Huamual	7.726	903	8	19	43	8.059
9	Kepulauan Manipa	1.291	181	6	4	-	1.410
10	Taniwel Timur	1.235	72	6	11	35	1.290
11	Elpaputih	888	16	7	5	14	782
<b>Total</b>		<b>33.054</b>	<b>3.429</b>	<b>166</b>	<b>198</b>	<b>592</b>	<b>36.696</b>

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024*



## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

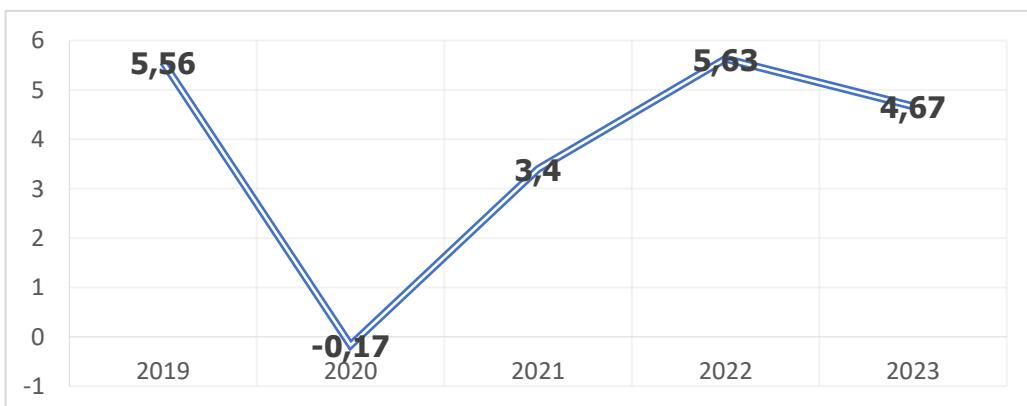
### A. Kesejahteraan Ekonomi

#### 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Tujuan utama adanya perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai patokan melihat gambaran kemajuan dan pembangunan ekonomi selama satu periode yang biasanya dihitung dalam setahun. Laju Pertumbuhan Ekonomi tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi diantaranya: sumber daya manusia; sumber daya alam; kemajuan IPTEK, tingkat inflasi dan suku bunga; tenaga manajerial dan organisasi produksi; aspek sosial budaya; produk domestic bruto; dan produk nasional bruto.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2019 berada pada angka 5,56%, dimana pada tahun 2020 mengingat adanya pandemi Covid-19 maka laju pertumbuhan ekonomi terjun di angka -0,17%. Pasca pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi berangsur-angsur membaik yaitu kondisi pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat berada di angka 4,67%.

**Gambar 2.4. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024

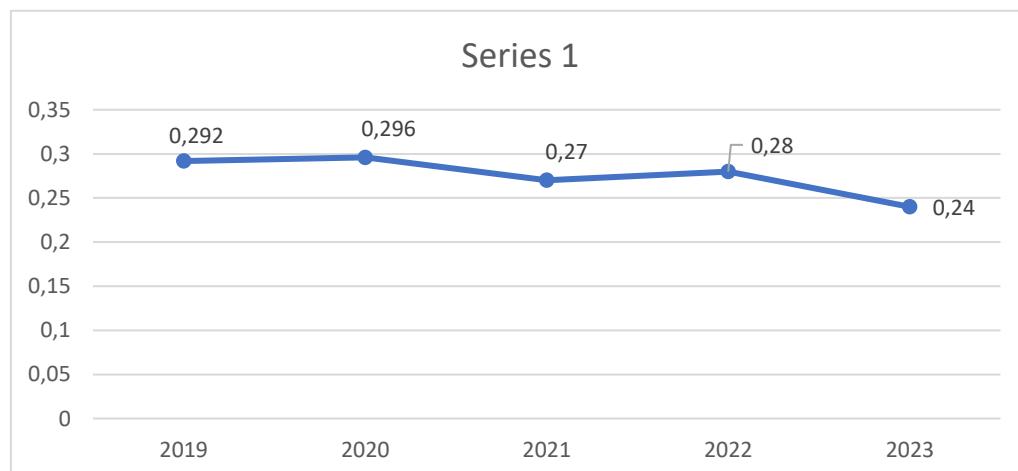


## 2) Indeks Gini

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (*gap*) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin menunjukkan kemiskinan yang semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau *Gini Ratio*. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah  $G < 0,30$  berarti ketimpangan rendah,  $0,30 \leq G \leq 0,50$  berarti ketimpangan sedang dan  $G > 0,50$  berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2019-2023 angka indeks gini di Kabupaten Seram Bagian Barat berkategori ketimpangan rendah bahkan belum mencapai angka 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesetaraan yang memadai, artinya pendapatan atau kekayaan didistribusikan dengan cara yang sesuai, namun dapat didistribusikan secara lebih merata. Perkembangan angka indeks gini dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

**Gambar 2.5. Perkembangan Angka Indeks Gini Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023**



*Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024*

Indeks gini di Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2019 tercatat di angka 0,292 poin, dan pada tahun 2023 berada di angka 0,240 poin, atau rata-rata selama 5 tahun terakhir indeks gini Kabupaten Seram Bagian Barat berada di angka 0,275 poin.



Indeks Gini di Kabupaten Seram Bagian Barat ini menjadi pemacu bagi Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Langkah ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat. Adapun faktor lain yang sulit dikendalikan adalah adanya faktor migrasi masuk penduduk dengan penghasilan menengah-atas serta belum meningkatnya pendapatan masyarakat golongan berpenghasilan rendah.

### 3) Kemiskinan

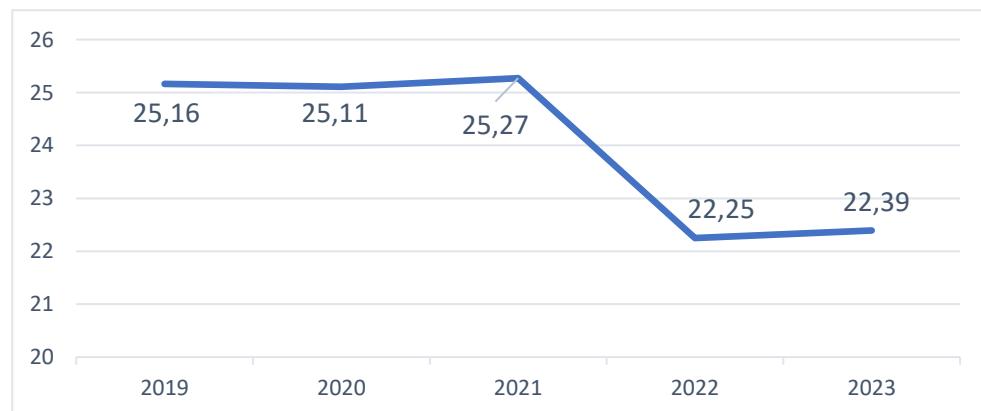
#### • Persentase Penduduk Miskin

Masalah kemiskinan bukan hanya menyangkut jumlahnya yang besar, tetapi juga masih terjadi disparitas yang lebar antar wilayah. Pola yang terjadi selama ini adalah, sejumlah besar penduduk akan tergolong miskin apabila terjadi sesuatu perubahan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, penduduk miskin akan bertambah apabila terjadi penyesuaian harga kebutuhan pokok, harga minyak dan gas, kenaikan harga bahan makanan, kenaikan tarif Listrik dan lain sebagainya. Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga penyumbang penduduk miskin terbanyak kedua setelah Kabupaten Maluku Tengah.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2023 adalah sebesar 22,39%, dimana angka ini naik sebesar 0,14 poin dari tahun 2022 dengan angka kemiskinan berada pada angka 22,25%.

**Gambar 2.6. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Seram**

**Bagian Barat Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024



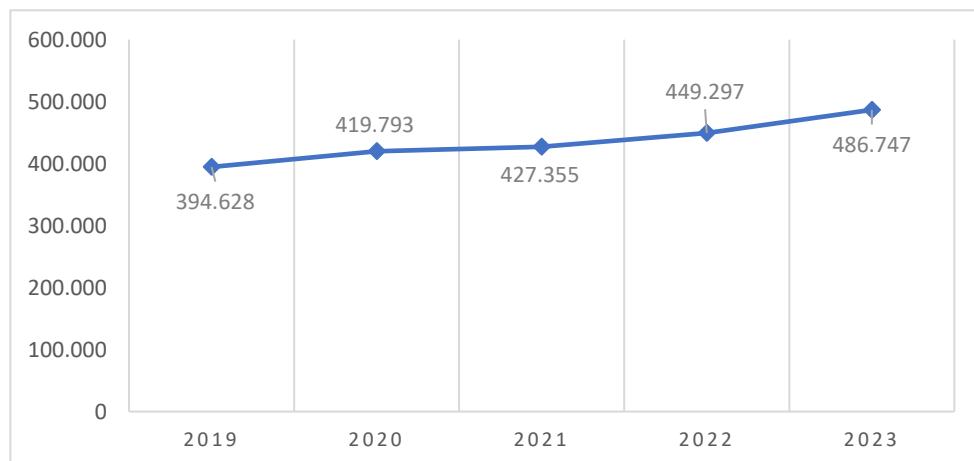
Presentase penduduk miskin di Kabupaten Seram Bagian Barat tentu masih sangat tinggi di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku, dimana hanya pada angka 19,84%. Tentunya pengawasan secara intensif dan menyeluruh terhadap pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan juga harus ditingkatkan sehingga program dapat tepat sasaran. Dengan demikian diharapkan penduduk miskin di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat terus berkurang sehingga pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dapat berjalan secara baik dan berkesinambungan.

- **Garis Kemiskinan**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan. Besaran nilai kebutuhan hidup minuman ditentukan dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita dan non makanan (Garis Kemiskinan non makanan) yang menggolongkan seseorang termasuk miskin atau tidak.

Garis kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023 adalah Rp.486.747,- per kapita per bulan. Artinya bila penduduk dengan pengeluaran dibawah Rp.486.747,- per bulan maka penduduk tersebut kategori penduduk miskin.

**Gambar 2.7. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023**

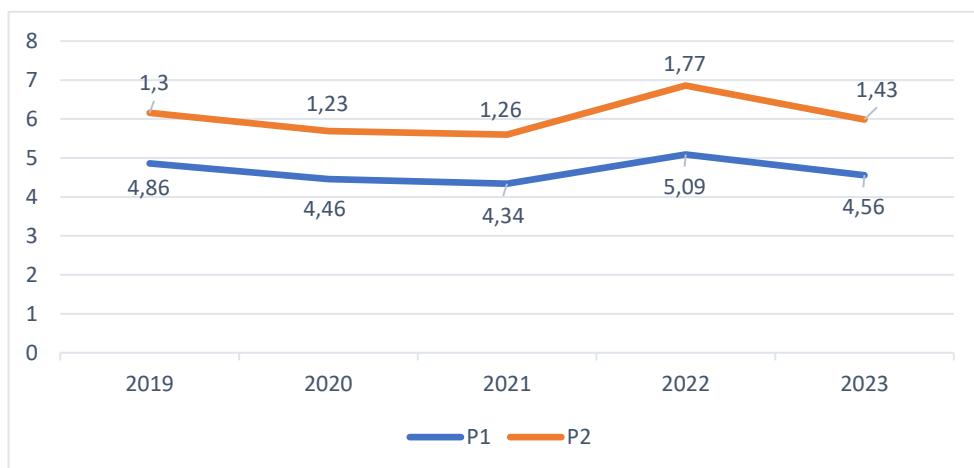


*Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024*

## • Kualitas Kemiskinan

Indikator lain yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun indeks keparahan kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan kesenjangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin. Secara umum kedua indikator tersebut digunakan untuk mengukur kualitas kemiskinan disuatu wilayah.

**Gambar 2.8. Kualitas Kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Barat  
Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024

## • Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada dibawah garis kemiskinan ekstrem setara dengan USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). PPP ditentukan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar

negara dan antar waktu. Atau dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya dibawah Rp.10.739,- per orang per hari atau Rp.322.170.- per orang per bulan (BPS, 2021). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu dan 2 anak) memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau dibawah Rp.1.288.680 per keluarga per bulan (BPS, 2021).

Program penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan data terkini dan memiliki pemiringkatan status/tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk dilengkapi nama dan Alamat. Selanjutnya, data tersebut menjadi rujukan sasaran intervensi seluruh program. Selama belum tersedianya data yang termutakhirkan dan memiliki pemeringkatan status/tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk, maka dapat menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Sebagaimana data P3KE untuk Kabupaten Seram Bagian Barat telah tersedia sebanyak 24.156 data kepala keluarga dan 112.013 data individu yang terbagi dalam desil/tingkat kesejahteraan 1-4. Data ini pada prinsipnya merupakan data olahan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai data acuan dalam rangka intervensi program penanggulangan kemiskinan.

**Tabel 2.16. Data Sebaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan (Desil 1-4) di Kabupaten Seram Bagian Barat  
Tahun 2024**

No	Kecamatan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total (Jiwa)
1	Kairatu	5.098	3.776	2.799	2.364	<b>14.037</b>
2	Seram Barat	7.521	4.622	3.209	2.812	<b>18.164</b>
3	Taniwel	3.310	1.888	1.425	949	<b>7.572</b>
4	Huamual Belakang	8.307	2.763	2.558	2.425	<b>16.053</b>
5	Amalatu	2.688	1.763	1.198	1.046	<b>6.695</b>
6	Inamosol	1.753	652	335	220	<b>2.960</b>
7	Kairatu Barat	2.910	2.171	1.521	1.144	<b>7.746</b>
8	Huamual	10.418	7.626	5.978	5.230	<b>29.252</b>



No	Kecamatan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total (Jiwa)
9	Kepulauan Manipa	1.392	800	573	479	<b>3.244</b>
10	Taniwel Timur	2.091	1.060	643	296	<b>4.090</b>
11	Elpaputih	1.397	422	245	136	<b>2.200</b>
<b>Total</b>		<b>46.885</b>	<b>27.543</b>	<b>20.484</b>	<b>17.101</b>	<b>112.013</b>

Sumber: TNP2K Kemenkopmk, 2024

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah memiliki jumlah terbanyak yaitu sebesar 46.885 jiwa atau sebesar 41,86%.

#### 4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023 yang termasuk angkatan kerja sejumlah 101.281 jiwa dengan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 4.796 jiwa. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja berjumlah 60.205 jiwa.

**Tabel 2.17. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
I.	Angkatan Kerja	77.648	84.595	85.640	81.240	101.281
1	Bekerja	73.454	79.969	80.801	76.815	96.485
2	Pengangguran Terbuka	4.194	4.626	4.839	4.425	4.796
II.	Bukan Angkatan Kerja	31.133	33.120	32.978	37.994	60.205
1	Sekolah	9.048	9.655	9.008	9.197	9.177
2	Mengurus Rumah Tangga	17.777	19.268	18.234	18.883	19.112
3	Lainnya	4.308	4.197	5.736	9.914	31.916
<b>Jumlah</b>		<b>108.781</b>	<b>117.715</b>	<b>118.618</b>	<b>119.234</b>	<b>161.486</b>

Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024

Sebagaimana data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja bertambah dari tahun ke tahun dengan kenaikan terbesar ada pada tahun 2023 yaitu sebesar 20.041 jiwa dari tahun 2022. Terhadap penduduk bukan

angkatan kerja juga meningkat secara signifikan pada tahun 2023 sebesar 22.211 jiwa dari tahun 2022.

### 5) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu gambaran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Perkembangan capaian IPM Kabupaten Seram Bagian Barat selama periode 2019-2023 menunjukkan pola yang semakin meningkat. IPM Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2022 adalah 70,76 sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 71,68.

**Tabel 2.18. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<b>A</b>	<b>Indikator Penyusun IPM</b>					
1	Umur Harapan Hidup	61,48	61,49	61,85	62,25	62,61
2	Harapan Lama Sekolah	13,42	13,44	13,48	13,58	13,69
3	Rata-rata lama sekolah	8,86	8,87	8,92	9,24	9,35
4	Pengeluaran perkapita riil setahun disesuaikan (ribu rupiah)	8.704	8.690	8.720	8.890	9.324
<b>B</b>	<b>IPM</b>	<b>65,49</b>	<b>65,62</b>	<b>69,9</b>	<b>70,76</b>	<b>71,68</b>

Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024

IPM dibentuk oleh empat komponen yaitu harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita. Keempat komponen tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Umur harapan hidup rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0,2 point, harapan lama sekolah rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0,06 point, rata-rata lama sekolah meningkat dari tahun ke tahun sebesar 0,12 point, sedangkan pengeluaran perkapita sedikit mengalami penurunan dari tahun 2019 ketahun 2020 sebesar Rp.14.000,- dan pada tiga tahun terakhir rata-rata meningkat sebesar Rp.211.000,-.



## B. Kesejahteraan Sosial Budaya

### 1) Indeks Kualitas Keluarga

Perhitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi pemerintah dalam rangka mengidentifikasi permasalahan keluarga dan selanjutnya mempersiapkan penyusunan intervensi kebijakan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Indeks Kualitas Keluarga merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan keluarga dan menjadi tolok ukur atau basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga di tingkat pemerintah pusat sampai ke daerah.

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan Sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa konten kualitas keluarga merupakan agregat dari ketahanan keluarga, perlindungan anak, kesetaraan dan keadilan gender serta partisipasi keluarga dalam masyarakat.

Hasil perhitungan IKK menggambarkan kualitas keluarga yang berkesetaraan gender dan pemenuhan hak anak melalui pencapaian 5 (lima) dimensi dan 25 indikator pembentukan IKK yaitu:

- a. Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS sebanyak 2 indikator);
- b. Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF sebanyak 6 indikator);
- c. Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE sebanyak 6 indikator);
- d. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP sebanyak 5 indikator);
- e. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKS sebanyak 6 indikator).

Indeks Kualitas Keluarga dihitung secara nasional oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk perhitungan capain kinerja tingkat Provinsi secara akumulatif untuk kabupaten/kota. Hasil capaian Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah 74,23% naik 3,94 point dari tahun 2021 yaitu 70,29%. Dimensi atau indikator capaian tertinggi terkait IKK untuk tahun 2022 adalah dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS) yaitu 81,9%, sedangkan capaian dimensi terendah adalah pada dimensi kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP) yaitu 65,46%.

**Tabel 2.19. Capaian Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Maluku**  
**Tahun 2020-2022**

<b>No</b>	<b>IKK / Dimensi/ Indikator</b>	<b>Capaian</b>		
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>I</b>	<b>Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS)</b>	<b>73,71</b>	<b>73,08</b>	<b>81,90</b>
1	Persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran	69,88	72,81	79,71
2	Persentase rumah tangga yang semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan	87,22	85,21	90,36
<b>II</b>	<b>Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF)</b>	<b>68,69</b>	<b>76,78</b>	<b>78,19</b>
3	Persentase rumah tangga yang tidak ada saat di mana anda/ART lainnya tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya	82,24	81,40	82,89
4	Persentase rumah tangga yang ada ART	47,87	40,43	37,50

No	IKK / Dimensi/ Indikator	Capaian		
		2020	2021	2022
	yang mempunyai keluhan kesehatan.			
5	PoU semua umur	35,55	29,62	31,68
6	Persentase rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak	88,22	99,46	99,64
7	Persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok	0,63	0,63	0,59
8	Persentase rumah tangga yang ada ART sakit (mengalami keluhan kesehatan dan terganggu)	28,62	23,75	20,40
<b>III</b>	<b>Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE)</b>	<b>69,08</b>	<b>68,01</b>	<b>70,50</b>
9	Persentase rumah tangga yang memiliki rumah	82,89	80,04	85,90
10	Persentase rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi	87,48	87,96	88,72
11	Persentase rumah tangga yang ada ART berstatus kawin yang memiliki rekening tabungan	50,80	52,37	53,51

No	IKK / Dimensi/ Indikator	Capaian		
		2020	2021	2022
12	Persentase rumah tangga yang ada art memiliki asuransi kesehatan (BPJS/ lainnya)	71,94	69,69	72,73
13	Persentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah	0,32	0,21	0,27
14	Persentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja	44,31	41,44	42,13
<b>IV</b>	<b>Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP)</b>	<b>61,05</b>	<b>61,86</b>	<b>65,46</b>
15	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/ atau agresi psikologis dari pengasuhan dalam setahun terakhir	43,25	39,77	55,98
16	Persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan	4,95	4,05	3,91
17	Persentase rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir	28,97	19,92	46,69

No	IKK / Dimensi/ Indikator	Capaian		
		2020	2021	2022
18	Persentase rumah tangga yang ada ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua	90,45	93,07	92,92
V	<b>Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB)</b>	<b>58,42</b>	<b>67,05</b>	<b>71,07</b>
19	Persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak	7,48	7,71	4,36
20	Persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap	89,28	88,37	89,56
21	Persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial	83,33	91,86	95,09
22	Persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+	26,57	27,41	29,46
23	Persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan	69,18	67,04	70,20
24	Persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktivitas	3,68	113,67	13,82

No	IKK / Dimensi/ Indikator	Capaian		
		2020	2021	2022
	bersama dalam mengakses internet			
	<b>Indeks Kualitas Keluarga</b>	<b>67,29</b>	<b>70,29</b>	<b>74,23</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2023

## 2) Indeks Perlindungan Anak

Masih banyaknya kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak di daerah, merupakan bukti bahwa sangat diperlukannya upaya yang holistic dan terintegrasi dari berbagai pihak dalam menjamin perlindungan anak di Indonesia. Perkawinan anak adalah isu yang kompleks, faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketidaaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) terdiri dari beberapa kluster indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. Perlindungan khusus.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) dihitung secara nasional untuk mengukur capaian tingkat Provinsi dan seluruh kabupaten/kota. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Maluku tahun 2022 adalah 59,28% atau naik 1,88 poin dari tahun 2021 yaitu 57,44%. Sedangkan untuk Kabupaten Seram Bagian Barat untuk

tahun 2022 adalah 55,77% yaitu menempati urutan ke-6 untuk kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

**Tabel 2.20. Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022**

No	Indikator	Provinsi Maluku	Kabupaten Seram Bagian Barat
1	<b>Indeks Perlindungan Anak</b>	<b>59,28</b>	<b>55,77</b>
2	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	45,79	47,13
3	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	72,45	75,93
4	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	65,30	59,80
5	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	34,87	38,02
6	Klaster V Perlindungan Khusus	73,40	54,68

*Sumber: Kementerian PPA dan BPS, 2023*

### **3) Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender**

Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk melihat pencapaian laki-laki dan perempuan yang dilihat dari tiga aspek dasar seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dimensi usia panjang dan hidup sehat diukur dengan menggunakan indikator angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Dimensi standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan Gender merupakan rasio antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Gender semakin ideal jika nilainya mendekati angka 100. Nilai Indeks Pembangunan Gender dibawah 100 berarti bahwa capaian pembangunan perempuan lebih rendah laki-



laki. Selain itu, berdasarkan laporan dari UNDP status capaian Indeks Pembangunan Gender dapat diukur menjadi:

- a. Kesetaraan gender tinggi ( $|IPG-100| \leq 2,5$ )
- b. Kesetaraan gender menengah tinggi ( $2,5 < |IPG-100| \leq 5$ )
- c. Kesetaraan gender menengah ( $5 < |IPG-100| \leq 7,5$ )
- d. Kesetaraan gender menengah rendah ( $7,5 < |IPG-100| \leq 10$ )
- e. Kesetaraan gender rendah ( $|IPG-100| > 10$ )

Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender diukur dalam tiga dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambil Keputusan dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan perempuan di parlemen diukur dengan indikator proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laku-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian. Status pencapaian indeks pemberdayaan gender berdasarkan BPS dapat dikelompokan menjadi:

- a. Rendah ( $IDG < 50$ )
- b. Sedang ( $50 \leq IDG < 60$ )
- c. Tinggi ( $60 \leq IDG \leq 80$ )
- d. Sangat tinggi ( $IDG > 80$ )

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Seram Bagian Barat untuk tahun 2022 menempati posisi tertinggi diantara 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku yaitu sebesar 98,77. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2022 menempati urutan ke 10 diantara 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku yaitu sebesar 55,42.

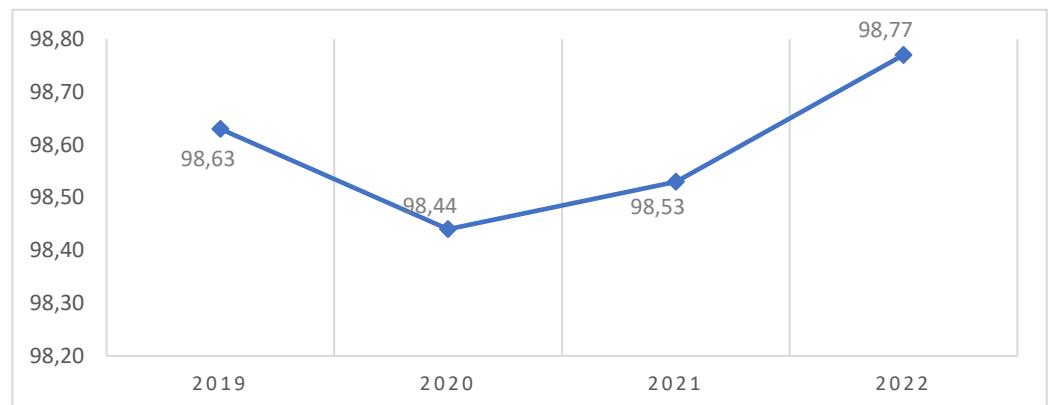
**Tabel 2.21. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2022**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Gender	98,63	98,44	98,53	98,77

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
2	Indeks Pemberdayaan Gender	54,26	53,33	55,49	55,42

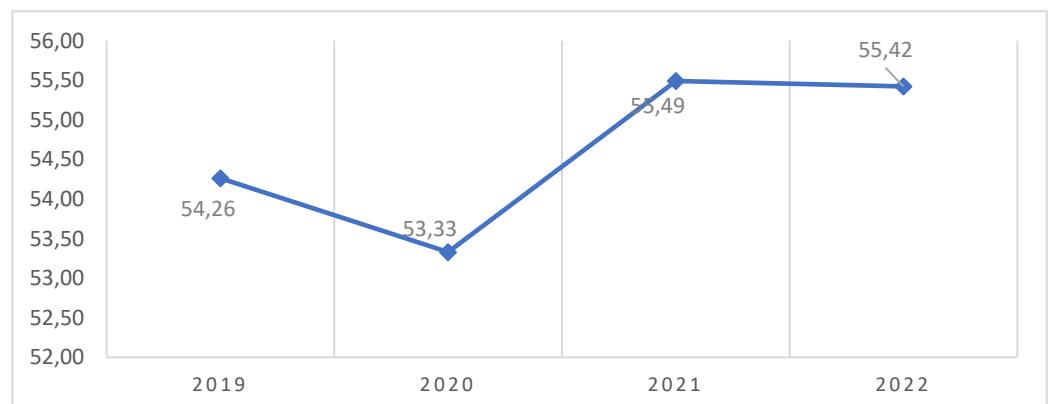
Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2023

**Gambar 2.9. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2023

**Gambar 2.10. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2023

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender berdasarkan komponen pembentukannya untuk tahun 2022 diantaranya keterlibatan perempuan di parlemen yaitu 3,33%, perempuan sebagai tenaga profesional yaitu sebesar 55,10% dan sumbangan pendapatan perempuan sebesar 36,94%.



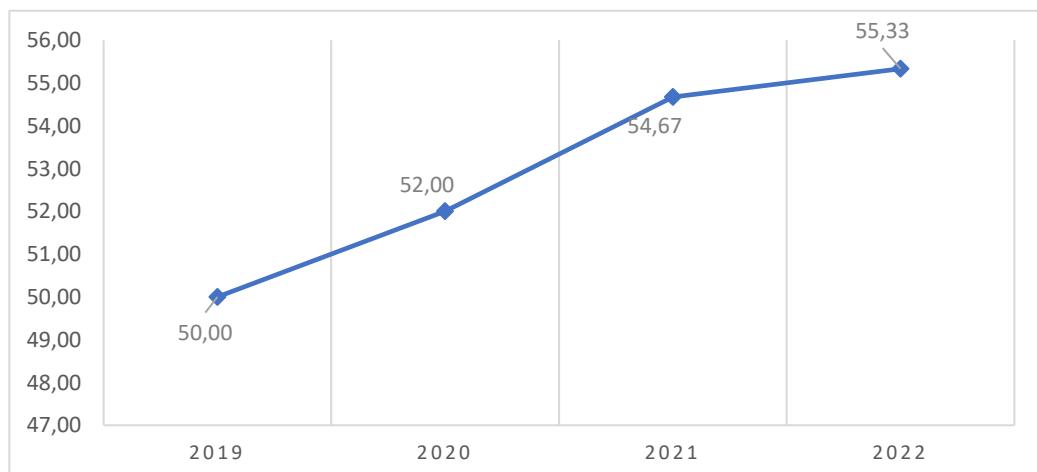
#### 4) Indeks Pembangunan Pemuda

Pembangunan pemuda merupakan agenda penting yang akan memengaruhi kemajuan sebuah bangsa. Mengapa pemuda itu penting? Pemuda mempresentasikan masa depan sebuah bangsa dan kelompok yang membawa perubahan. Sebagai generasi pemimpin berikutnya, sangatlah penting bagi kaum muda untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk berkembang dan berinovasi. Pemuda yang sehat, Sejahtera, berpendidikan, serata dan partisipatif merupakan faktor yang menentukan potensi dan energi unik yang dapat mendorong perubahan positif dan kemajuan di masa depan.

Sesuai dengan rentang usia, pemuda merupakan kelompok usia produktif dan inovatif. Menyiapkan pemuda berarti menyiapkan masa depan. Dalam kerangka pembangunan, tidak hanya sebagai objek, pemuda juga merupakan subjek dari kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dimensi pembangunan pemuda mencakup banyak bidang mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pekerjaan, partisipasi (sosial dan politik), hingga kesetaraan gender.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan instrument penting untuk memberikan Gambaran kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah. Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2022 adalah sebesar 55,33 yaitu naik sebesar 0,66 poin dari tahun 2021 yaitu sebesar 54,67.

**Gambar 2.11. Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2022**



*Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, 2023*



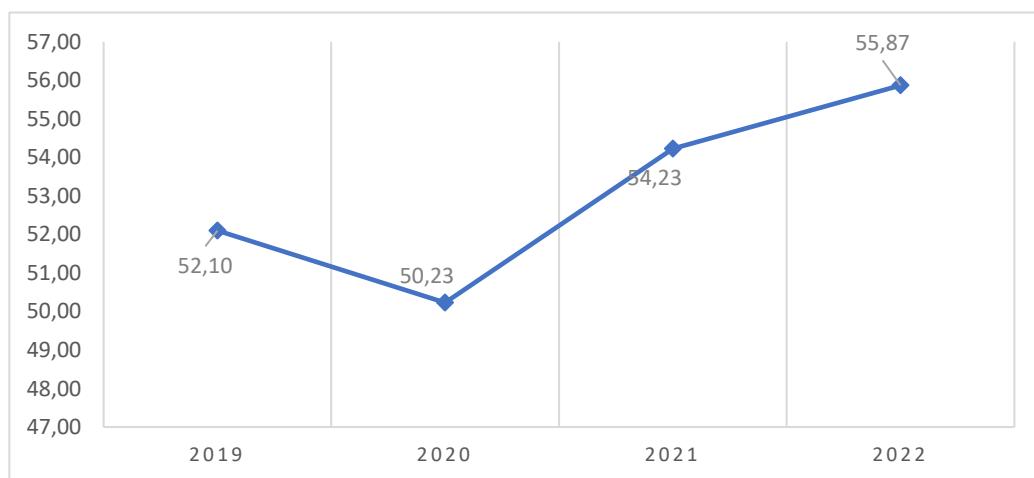
## 5) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kebudayaan, yang diantaranya membahas tentang unsur pemajuan kebudayaan, sepuluh objek pemajuan kebudayaan, ekosistem kebudayaan dan pengarustamaan kebudayaan dari hulu ke hilir.

Indeks ini berpedoman pada *culture development indicators* (CDIs) yang telah dikembangkan oleh UNESCO dan juga menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Dengan demikian IPK dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan kebudayaan yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based*) dan menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor pembangunan kebudayaan.

Dimensi pembentukan IPK terdiri dari beberapa indeks diantaranya ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Indeks Pembangunan Kebudayaan dihitung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, untuk capaian seluruh Provinsi di Indonesia yang terakumulasi untuk seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi. IPK Provinsi Maluku tahun 2022 adalah sebesar 55,87 yaitu naik sebesar 1,64 poin dari tahun 2021 yaitu sebesar 54,23.

**Gambar 2.12. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku  
Tahun 2019-2022**



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, 2023

**Tabel 2.22. Dimensi Pembentukan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku dan Capaiannya Tahun 2019-2022**

No	Dimensi Pembentukan	2019	2020	2021	2022
1.	Ekonomi Budaya	13,53	6,84	14,95	3,81
2.	Pendidikan	75,02	70,68	65,69	71,77
3.	Ketahanan Sosial Budaya	75,11	75,15	78,75	80,7
4.	Warisan Budaya	37,12	35,48	47,51	48,52
5.	Ekspresi Literasi	31,32	30,32	39,49	45,09
6.	Budaya Literasi	50,13	52,53	47,81	51,88
7.	Gender	65,96	64,61	64,85	63,39

*Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, 2023*

## 2.3 Aspek Daya Saing

### A. Daya Saing Ekonomi Daerah

#### 1) Produks Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan diwilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah rinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kabupaten Seram Bagian Barat didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: pertanian, kehutanan, dan perikanan; administrasi pemerintahan; pertahanan dan jaminan sosial wajib; konstruksi; perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil, dan sepeda motor; dan industry pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 33,43%, dimana angka ini sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu sebesar 33,41%.

Perekonomian Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2023 melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023 mencapai 4,67%, sedangkan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami peningkatan sebesar 5,63%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 8,87%, diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,48% dan informasi dan komunikasi sebesar 7,10%.

**Tabel 2.23. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023**

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,97	2,75	0,19	5,43	5,37
B	Pertambangan dan Penggalian	5,69	-0,08	8,43	3,75	5,14
C	Industri Pengolahan	3,94	-4,2	0,99	15,47	4,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,66	4,13	9,87	-0,43	4,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,64	1,4	1,06	3,64	6,68
F	Konstruksi	8,1	-0,82	7,69	3,01	3,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,12	-4,63	6,13	7,79	7,48
H	Transportasi dan Pergudangan	4,8	-13,39	5,5	5,51	5,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,26	-4,2	4,88	7,22	6,4
J	Informasi dan Komunikasi	3,73	1,13	5	7,09	7,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,06	7,43	3,84	1,3	4,57
L	Real Estat	1,32	-0,35	3,19	4,09	5,44
M,N	Jasa Perusahaan	3,81	-1,27	4,44	6,92	4,39

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,41	-0,54	5,18	3,97	1,63
P	Jasa Pendidikan	7,04	-0,36	3,93	5,95	3,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,41	4,38	5,98	7,49	8,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,84	-2,25	1,98	6,96	5,79
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>5,56</b>	<b>-0,17</b>	<b>3,4</b>	<b>5,63</b>	<b>4,67</b>

Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024

## 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per Kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2023, PDRB per kapita Kabupaten Seram Bagian Barat mencapai 17,03 juta Rupiah.

PDRB per kapita di Kabupaten Seram Bagian Barat dalam 5 tahun terakhir (2019-2023) mengalami trend yang fluktuatif. Pada tahun 2019 besarnya PDRB per kapita Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 17,42 juta Rupiah selanjutnya menurun menjadi 14,32 juta Rupiah di tahun 2020. Tahun 2021 PDRB per kapita Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 14,74 juta Rupiah dan mengalami peningkatan menjadi 15,99 juta rupiah di tahun 2022 dan tahun 2023 menjadi 17,03 juta Rupiah. Secara rata-rata besarnya PDRB per kapita Kabupaten Seram Bagian Barat dalam periode lima tahun terakhir tercatat sebesar 15,90 juta Rupiah.

**Tabel 2.24. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita  
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023**

No	PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	17418,26	14323,81	14742,30	15994,98	17026,58
2.	Atas Dasar Harga	11412,66	9282,33	9432,13	9798,13	10090,35

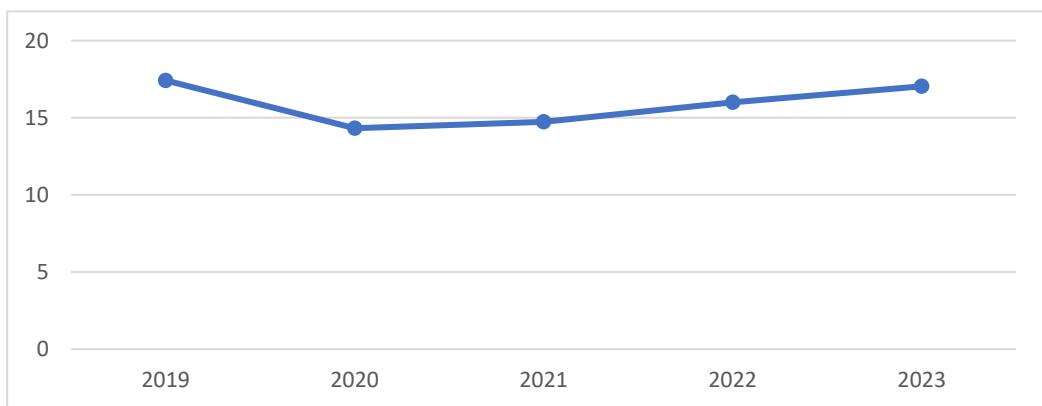


No	PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)	2019	2020	2021	2022	2023
	Konstan (ADHK) 2010					
3.	Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,73	-18,67	1,61	3,88	2,98

Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024

**Gambar 2.13. PDRB Per Kapita Kabupaten Seram Bagian Barat**

**Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan PDRB per kapita tertinggi di tahun 2023 dari 17 kategori yang lain yaitu sebesar 5,69 juta Rupiah. Diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 3,47 juta Rupiah.

### **3) Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah**

Indikator persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan digunakan untuk menggambarkan kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

**Tabel 2.25. Capaian Indikator Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pendapatan Daerah</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)</b>
2019	1.066.745.880.649,36	28.635.819.084,80	2,68
2020	963.960.442.197,30	29.295.721.702,30	3,04
2021	970.195.216.207,80	38.075.664.325,80	3,92
2022	905.593.821.521,76	39.720.627.298,76	4,39
2023	960.617.751.961,28	21.141.848.012,43	2,20

*Sumber: BPKAD, 2024*

Sebagaimana Tabel di atas kondisi PAD dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun kinerja yang cukup baik terjadi pada tahun 2022 dimana persentase PAD terhadap pendapatan daerah ada pada angka 4,39%, sedangkan untuk tahun 2023 hanya mencapai 2,20%. Secara rincian kontribusi PAD untuk tahun 2023 bersumber dari pajak daerah dengan menyumbang 43,49% dari total PAD.

**Tabel 2.26. Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022-2023**

<b>Pajak Daerah-LRA</b>	<b>Tahun 2022</b>		<b>Tahun 2023</b>		<b>%</b>
	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>		
<b>Pajak Hotel</b>					
Hotel	64.777.500	60.000.000	56.640.000	94,40	
Losmen	0	5.000.000	0	0	
Rumah Penginapan dan sejenisnya	84.741.714	97.500.000	96.575.499	99,05	
Rumah kos dengan Jumlah Kamar lebih dari 10 (sepuluh)	104.845.000	105.000.000	99.535.000	94,80	
<b>Jumlah</b>	<b>254.364.214</b>	<b>267.500.000</b>	<b>252.750.499</b>	<b>94,49</b>	
<b>Pajak Restoran</b>					

<b>Pajak Daerah-LRA</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>		<b>%</b>
	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	
Restoran	6.929.050	100.000.000	8.560.799	3,11
Rumah Makan	785.298.879	650.000.000	669.598.999	103,02
Jasa Boga/ Katering - LRA	176.189.800	90.539.720	259.589.310	286,71
Kafetaria - LRA	0	0	0	0
Kantin – LRA	11.855.000	5.000.000	0	0
Warung – LRA	7.178.500	30.000.000	25.434.800	84,78
<b>Jumlah</b>	<b>987.451.229</b>	<b>875.539.720</b>	<b>963.183.908</b>	<b>110,01</b>
<b>Pajak Hiburan</b>				
Diskotik,Karaoke,klub malam dan sejenisnya	7.209.750	15.000.000	11.161.000	74,41
Permainan Sirkus/Akrobat/Sulap	0	5.000.000	2.500.000	50
Pertandingan Olahraga	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>7.209.750</b>	<b>20.000.000</b>	<b>13.661.000</b>	<b>68,31</b>
<b>Pajak Reklame</b>				
Reklame papan/Bilboard/Videotron/Megatron	14.496.950	125.000.000	61.461.794	49,17
Reklame Kain	270.995.680	278.764.890	294.112.658	105,51
Reklame Melekat/Stiker	8.500.000	40.000.000	32.980.000	82,45
Reklame Selebaran	0	0	0	0
Reklame Berjalan	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>293.992.630</b>	<b>443.764.890</b>	<b>388.554.452</b>	<b>87,56</b>
<b>Pajak Penerangan Jalan</b>				
Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri	3.660.646.062	3.400.000.000	4.097.740.640	120,52
<b>Jumlah</b>	<b>3.660.646.062</b>	<b>3.400.000.000</b>	<b>4.097.740.640</b>	<b>120,52</b>
<b>Pajak Parkir</b>				

<b>Pajak Daerah-LRA</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>		<b>%</b>
	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	
Pajak Parkir	0	500.000	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>				
Pasir dan Kerikil	0	0	0	0
Tanah Serap (Fullers Earth)	0	0	0	0
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.888.021.490	3.067.578.594	2.498.637.597	81,45
<b>Jumlah</b>	<b>1.888.021.490</b>	<b>3.067.578.594</b>	<b>2.498.637.597</b>	<b>81,45</b>
<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)</b>				
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	731.458.935	380.000.000	541.998.378	142,63
<b>Jumlah</b>	<b>731.458.935</b>	<b>380.000.000</b>	<b>541.998.378</b>	<b>142,63</b>
<b>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</b>				
Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	384.993.618	380.116.796	437.251.969	115,03
<b>Jumlah</b>	<b>384.993.618</b>	<b>380.116.796</b>	<b>437.251.969</b>	<b>115,03</b>
<b>Total Pajak Daerah</b>	<b>8.208.137.928</b>	<b>8.835.000.000</b>	<b>9.193.778.443</b>	<b>104,06</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024

Dilihat dari target pendapatan pajak daerah untuk tahun 2023 telah terealisasi melampaui target yaitu sebesar 104,06% dengan rincian pendapatan pajak penerangan jalan sebagai sumber penerimaan terbesar.

Secara garis besar tentunya realisasi PAD menunjukkan kinerja sangat baik jika dilihat dari sisi target, namun secara total tentu target yang ditetapkan masih



sangat rendah, mengingat pemerintah daerah belum dapat mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara maksimal.

## **B. Daya Saing Sumber Daya Manusia**

### **1) Angka Literasi dan Numerasi**

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun masa depan yang berkelanjutan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti Kabupaten Seram Bagian Barat. Sebagai kabupaten dengan wilayah yang luas dan tersebar di berbagai pulau, kualitas pendidikan dasar menjadi fokus utama pemerintah daerah. Salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pendidikan adalah tingkat literasi dan numerasi siswa, khususnya di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Angka literasi dan numerasi menjadi ukuran yang vital untuk menilai kemampuan siswa dalam memahami teks dan menerapkan konsep-konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.

Di Kabupaten Seram Bagian Barat, tantangan dalam meningkatkan angka literasi dan numerasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses ke sekolah, ketersediaan guru, dan sumber daya pendidikan yang belum merata di seluruh desa. Dengan 92 desa yang tersebar di kabupaten ini, penting untuk memahami bahwa kebutuhan dan kondisi pendidikan bervariasi di setiap wilayah. Dalam konteks ini, literasi dan numerasi bukan hanya soal kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan dasar yang berperan penting dalam membekali generasi muda untuk menghadapi dinamika sosial dan ekonomi di masa depan.

Upaya untuk meningkatkan angka literasi dan numerasi di jenjang SD dan SMP terus dilakukan melalui berbagai program pemerintah daerah dan pusat, termasuk pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Melalui ANBK, pemerintah dapat memantau perkembangan kemampuan literasi dan numerasi siswa secara lebih akurat, yang pada gilirannya memberikan gambaran tentang kualitas pendidikan di daerah ini. Hasil dari asesmen ini sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk penyediaan sumber daya pendidikan, pelatihan guru, dan program-program intervensi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

**Tabel 2.27. Angka Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022-2023**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	
		<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Rata-rata kemampuan literasi		
	a. SD	47,56	54,61
	b. SMP	40,71	48,68
2	Rata-rata kemampuan Numerasi		
	a. SD	33,77	48,17
	b. SMP	27,39	51,27

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat, terdapat peningkatan signifikan pada kemampuan literasi dan numerasi siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama periode 2022 hingga 2023. Pada jenjang SD, rata-rata kemampuan literasi meningkat dari 47,56 pada tahun 2022 menjadi 54,61 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam kemampuan siswa SD dalam memahami dan menggunakan teks tertulis. Sementara itu, di jenjang SMP, peningkatan kemampuan literasi juga tercatat, dari 40,71 pada tahun 2022 menjadi 48,68 pada tahun 2023, yang menunjukkan perbaikan serupa meskipun titik awalnya lebih rendah dibandingkan jenjang SD.

Untuk kemampuan numerasi, peningkatan yang lebih tajam terlihat di kedua jenjang. Di jenjang SD, rata-rata kemampuan numerasi siswa naik dari 33,77 pada tahun 2022 menjadi 48,17 pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa siswa SD semakin mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep matematika dasar. Di jenjang SMP, kemampuan numerasi yang awalnya berada di angka 27,39 pada tahun 2022 melonjak drastis menjadi 51,27 pada tahun 2023. Perbaikan ini menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap penguatan pendidikan matematika di tingkat SMP.



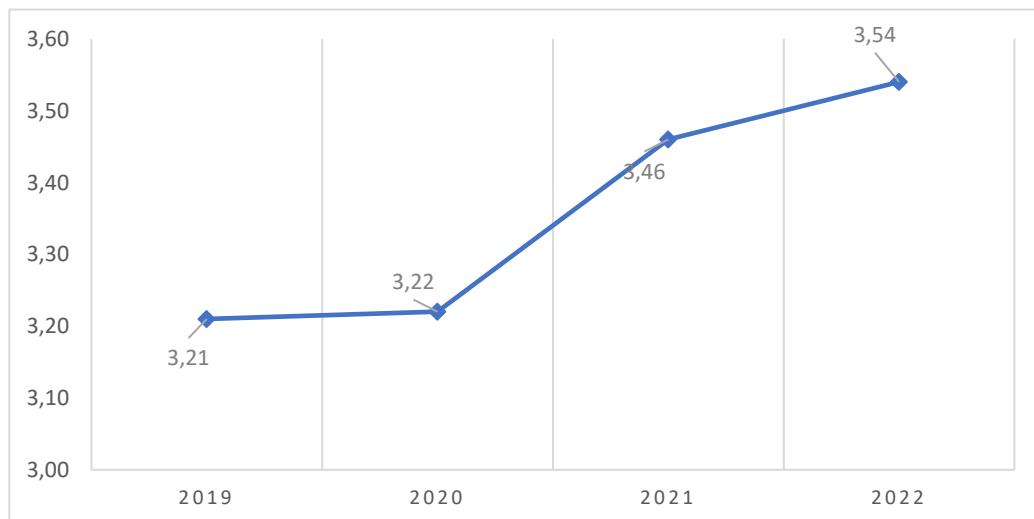
## 2) Indeks Literasi Digital

Kemampuan literasi digital yang baik akan membantu memberantas kemiskinan melalui kemudahan akses pada layanan sosial digital oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat akan mampu mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Terbatasnya akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas bisa dibantu melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital.

Kehadiran media digital tidak selalu berdampak positif terhadap semua lapisan masyarakat. Beberapa tantangan media digital menjadi masalah tantangan serius, seperti penyebaran informasi hoaks, ujaran kebencian, dan aktivitas digital yang merugikan lainnya. Salah satu penyebab fenomena tersebut yakni kurangnya kesadaran keamanan siber karena rendahnya kemampuan literasi digital.

Indeks Literasi Digital dihitung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan menggunakan metode *multistage random sampling* kepada 10.000 responden di seluruh Indonesia yang menggunakan internet pada penduduk usia 13-70 tahun. Indeks Literasi Digital Provinsi Maluku sebagai akumulasi literasi digital kabupaten/kota untuk tahun 2022 adalah 3,54 atau naik 0,05 poin dari tahun 2021 yaitu 3,49.

**Gambar 2.14. Indeks Literasi Digital Provinsi Maluku Tahun 2019-2022**



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2023



### 3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Secara konseptual, ketenagakerjaan didefinisikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Jika dijabarkan dalam pengertian teknis maka dapat diartikan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja yakni mulai dari perencanaan ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penyelenggaraan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pengawasan pelaksanaan norma kerja dan K3 di tempat kerja.

Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023 yang termasuk angkatan kerja sejumlah 101.281 jiwa dengan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 4.796 jiwa. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja berjumlah 60.205 jiwa.

**Tabel 2.28. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
I.	Angkatan Kerja	77.648	84.595	85.640	81.240	101.281
1	Bekerja	73.454	79.969	80.801	76.815	96.485
2	Pengangguran Terbuka	4.194	4.626	4.839	4.425	4.796
II.	Bukan Angkatan Kerja	31.133	33.120	32.978	37.994	60.205
1	Sekolah	9.048	9.655	9.008	9.197	9.177
2	Mengurus Rumah Tangga	17.777	19.268	18.234	18.883	19.112
3	Lainnya	4.308	4.197	5.736	9.914	31.916
<b>Jumlah</b>		<b>108.781</b>	<b>117.715</b>	<b>118.618</b>	<b>119.234</b>	<b>161.486</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024*

Sebagaimana data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja bertambah dari tahun ke tahun dengan kenaikan terbesar ada pada tahun 2023 yaitu sebesar 20.041 jiwa dari tahun 2022. Terhadap penduduk bukan angkatan kerja juga meningkat secara signifikan pada tahun 2023 sebesar 22.211 jiwa dari tahun 2022.



#### 4) Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan atau beban ketergantungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Atau secara teknis diartikan bahwa rasio ketergantungan merupakan perbandingan penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih dibandingkan dengan penduduk usia 15 sampai 65 tahun.

Dari total jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023 sebanyak 214.979 jiwa, terdiri dari 71.289 jiwa atau 33,16% adalah penduduk usia tidak produktif. Sedangkan penduduk usia produktif yakni kelompok umur 15 sampai 65 tahun adalah berjumlah 143.690 jiwa. Sebagaimana data tersebut diperoleh hasil bahwa rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023 adalah 49,61% atau dibulatkan menjadi 50. Hal ini memberi makna bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 50 penduduk usia tidak produktif.

#### C. Daya Saing Fasilitas / Infrastruktur Wilayah

Pembangunan infrastruktur menjadi fasilitas untuk masyarakat dalam kegiatan sosial dan pendistribusian barang dan jasa. Pembangunan infrastruktur yang baik dan memadai dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat yang memadai wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur mampu mendorong kemajuan suatu daerah kearah yang lebih baik. Bahkan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas bagi sebuah daerah. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu daerah. Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan Listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat.

Salah satu indikator dalam melihat capaian daya saing fasilitas suatu daerah adalah indeks infrastruktur. Capaian indeks infrastruktur Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023 adalah 67,82. Capaian ini dilihat dari beberapa kondisi infrastruktur yang terus meningkat, antara lain kondisi infrastruktur jalan, kondisi jaringan irigasi, ketersediaan air bersih,kondisi perumahan layak huni, dan kondisi perhubungan laut

dan darat, serta ketersediaan Listrik bagi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

### 1) Infrastruktur Jalan

Sampai dengan tahun 2023, panjang jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan status jalan Kabupaten adalah 460,19 Km dan tidak seluruhnya dalam kondisi baik. Dari panjang jalan tersebut, pada tahun 2023 hanya terdapat 195,44 Km dalam kondisi baik, jalan rusak ringan tercatat 108,33 Km, jalan dengan kondisi rusak sedang sepanjang 71,70 Km dan jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 84,72 Km. Rata-rata panjang jalan yang dibangun setiap tahunnya berkisar antara 7-10 Km saja. Kondisi ini diakibatkan karena pendanaan daerah yang sangat terbatas serta prioritas pembangunan lainnya yang lebih diutamakan. Kondisi jalan mantap pada tahun 2023 adalah sebesar 42,47% kondisi ini cukup baik jika dibandingkan pada tahun 2020 dimana kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi mantap hanya berada pada angka 21,47%.

**Tabel 2.29. Kondisi Jalan Status Jalan Kabupaten Tahun 2020-2023**

No	Indikator	Capaian Indikator			
		2020	2021	2022	2023
1	Panjang Jalan sesuai SK Jalan (Km)	481,39	481,39	481,39	460,19
2	Jalan kondisi baik (Km)	103,37	138,47	167,26	195,44
3	Jalan kondisi rusak ringan	153,78	132,8	125,87	108,33
4	Jalan kondisi rusak sedang	93,07	91,91	85,24	71,70
5	Jalan kondisi rusak Berat	131,17	118,21	103,02	84,72
6	Panjang Jalan yang dibangun (Km)	10,1	10	6	11,65
7	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2,86	5,19	12,3	17,29



No	Indikator	Capaian Indikator			
		2020	2021	2022	2023
	(struktur dan fungsi) (Km)				
8	Panjang jalan yang direkonstruksi/ direhabilitasi (km)	1,16	6,67	2,94	0,3
9	Panjang Jalan yang dipelihara (Km)	20,98	6,93	6,94	23,94
10	Panjang Jembatan yang dibangun (M)	416	0	30	0
11	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	21,47	28,76	34,75	42,47

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

## 2) Irigasi

Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki beberapa areal persawahan, yang telah dilengkapi dengan jaringan irigasi. Secara total panjang saluran irigasi di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023 adalah 114.520 Meter bertambah sepanjang 32.743 Meter sejak tahun 2019. Sampai dengan tahun 2023 jaringan irigasi dengan kondisi baik tercatat 27,30% atau sepanjang 33.981 Meter menurun dari tahun 2022 yaitu sebesar 66,26% atau sepanjang 55.875 Meter. Hal ini disebabkan karena terjadinya banjir yang cukup besar pada wilayah irigasi pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan luas wilayah persawahan dan pertanian yang terlayani melalui jaringan irigasi, maka rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2023 adalah 58,28% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 41,62%.

**Tabel 2.30. Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Seram Bagian Barat**  
**Tahun 2019-2023**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian Indikator</b>				
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1.	Panjang Jaringan Irigasi (m)	81.777	81.777	114.520	114.520	114.520
3.	Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	51.866	51.866	55.875	55.875	33.981
4.	Jaringan Irigasi dalam kondisi rusak sedang	0	0	44.570	32.743	26.190
5.	Jaringan Irigasi dalam kondisi rusak berat	29.911	29.911	14.075	25.902	54.349
6.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	62,76	26,76	66,26	66,26	27,30
7.	Rasio Jaringan Irigasi	41,62%	41,62%	58,28%	58,28%	58,28%

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024*

### **3) Air Bersih**

Pembangunan infrastruktur dasar yakni ketersediaan air bersih bagi masyarakat terus diupayakan pemerintah daerah. Cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Seram Bagian Barat untuk tahun 2023 telah mencapai 71,12% untuk seluruh wilayah dimana pada tahun 2022 baru mencapai 65,79%. Jumlah rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum SPAM jaringan perpipaan terus bertambah dari tahun ke tahun, untuk tahun 2023 berjumlah telah disalurkan sejumlah 199 SR sedangkan untuk tahun 2022 berjumlah 1.367 SR.

**Tabel 2.31. Kondisi SPAM Jaringan Perpipaan Tahun 2020-2023**

No	Indikator	Capaian Indikator			
		2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan pelayanan air minum (%)	80,02	74,91	65,79	71,12
2.	Jumlah rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum SPAM jaringan perpipaan (rumah)	189	374	1.367	199
3.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap SPAM jaringan perpipaan (%)	0,42	0,83	3,05	0,44

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024*

#### **4) Perumahan**

Salah satu indikator terkait perumahan rakyat adalah indikator rumah layak huni, dihitung berdasarkan cakupan ketersediaan rumah layak huni yaitu jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga pada tahun 2022 sebesar 82,57%, dimana angka ini naik menjadi 87,99% dari total rumah tidak layak huni yang tertangani sejak tahun 2020 sebanyak 850 unit. Keberadaan rumah tidak layak huni dilingkungan masyarakat sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masing-masing keluarga.

Selain melalui peningkatan kondisi ekonomi masyarakat, perlu juga Upaya peningkatan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau. Cakupan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2022 tercatat 82,32% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 86,62%. Berfluktuasinya angka tersebut dapat juga disebabkan oleh kondisi status kepemilikan rumah yang umumnya berupa sewa. Kedua indikator tersebut ditangani oleh pemerintah daerah melalui sumber pendanaan APBN, DAK, APBD Provinsi Maluku dan APBD Kabupaten Seram Bagian Barat.

**Tabel 2.32. Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Seram Bagian Barat  
Tahun 2020-2023**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian Indikator</b>			
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	73,39	78,21	82,57	87,99
2	Cakupan layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau (%)	73,29	78,13	82,32	86,62

*Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024*

Penanganan RTLH dengan berbagai penganggaran pada tahun 2022 berjumlah 286 unit dan tahun 2023 sebanyak 5 unit, sehingga kondisi sampai dengan tahun 2023 rumah tidak layak huni yang belum tertangani berjumlah 5.429 unit atau masih sebesar 86,39% dari total RTLH tahun 2020 sebanyak 6.284 unit.

**Tabel 2.33. Jumlah RTLH Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah RTLH (unit)</b>	<b>RTLH Tertangani (unit)</b>	<b>RTLH belum tertangani (unit)</b>	<b>Persentase penanganan RTLH (%)</b>
2020	6.284	303	5.981	4,82
2021	5.981	261	5.720	4,36
2022	5.720	286	5.434	5,42
2023	5.434	5	5.429	0,09

*Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024*

## 5) Perhubungan

Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat 58 buah pulau, dimana 8 pulau diantaranya berpenghuni. Karakteristik wilayah kepulauan ini mengharuskan daerah untuk menyusun rencana perhubungan yang dapat mendukung arus transportasi laut yang memadai, dimana disisi lain wilayah pegunungan juga tak luput dari perhatian pemerintah daerah.

Jumlah pelabuhan di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah berjumlah 9 unit terdiri dari pelabuhan penyeberangan sebanyak 1 unit, pelabuhan laut pengumpul sebanyak 2 unit, pelabuhan laut pengumpul lokal sebanyak 1 unit, pelabuhan laut pengumpulan lokal sebanyak 3 unit, pelabuhan khusus sebanyak 1 unit, dan pelabuhan perikanan sebanyak 1 unit. Sedangkan dari transportasi darat, jumlah terminal tipe C di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah berjumlah 4 unit. Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala tahun 2023 adalah sebanyak 330 unit namun yang melakukan pengujian hanya berjumlah 189 unit atau sebesar 57,27%. Dari segi arus penumpang yang menggunakan angkutan umum tercatat sebanyak 16,8 juta jiwa sepanjang tahun 2023.

**Tabel 2.34. Capaian Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2020-2023**

No	Indikator	Capaian Indikator			
		2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pelabuhan laut	9	9	9	9
2	Jumlah terminal tipe C (Unit)	4	4	4	4
3	Jumlah kendaraan wajib uji	551	551	551	330
4	Persentase pelayanan kendaraan uji berkala (%)	42,13	59,34	43,37	57,27
5	Jumlah arus penumpang angkutan umum	10.895.926	12.530.314	14.785.770	16.812.649
6	Rasio ijin trayek	0,00067	0,00068	0,0007	0,00091

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

## 6) Ketersediaan Listrik

Sebagian besar kebutuhan Listrik baik industri maupun rumah tangga di Kabupaten Seram Bagian Barat dilayani oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ada beberapa wilayah yang menggunakan Diesel (PLTD). Di Kabupaten

Seram Bagian Barat sendiri ada tiga pemasok Listrik PLN, diantaranya KLP Piru, KLP Kairatu dan KLP Hitu. KLP Piru memasok Listrik untuk wilayah Kecamatan Huamual Belakang, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual, Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Taniwel Timur. KLP Hitu memasok Listrik untuk wilayah Kecamatan Kepulauan Manipa dan Wilayah Pulau Kelang di Kecamatan Huamual Belakang. KLP Kairatu memasok Listrik untuk Kecamatan Kairatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Elpaputih dan Desa Kaibobo di Kecamatan Seram Barat.

Dari tahun ke tahun, jumlah pelanggan Listrik tercatat selalu mengalami peningkatan, yang menandakan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat sudah berjalan dengan baik. Tahun 2023 jumlah pelanggan Listrik terbanyak yang tercatat yaitu berada di KLP Piru tepatnya di Kecamatan Huamual dengan total 9.878 pelanggan Listrik.

**Tabel 2.35. Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019-2023**

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Huamual Belakang	3.403	3.867	4.011	4.177	4.302
2.	Kepulauan Manipa	1.571	-	-	-	889
3.	Seram Barat	7.826	7.963	8.268	8.383	8.769
4.	Huamual	2.878	2.281	2.330	2.383	9.878
5.	Kairatu	7.728	7.815	7.935	8.083	8.553
6.	Kairatu Barat	4.140	4.217	4.287	4.359	4.585
7.	Inamosol	785	804	836	877	980
8.	Amalatu	2.549	2.588	2.629	2.674	3.788
9.	Elpaputih	818	847	864	889	932
10.	Taniwel	2.470	2.425	2.488	2.653	2.951
11.	Taniwel Timur	1.357	1.213	1.233	1.379	1.409



No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
	Total	35.525	34.020	34.881	35.857	47.036

*Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024*

Dari total pelanggan Listrik di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2023 yaitu sejumlah 47.036 pelanggan, sudah terpasang 45.214.900 KW daya terpasang, dengan daya terpasang terbesar ada di wilayah Kecamatan Kairatu Barat yaitu sebanyak 11.547.750 KW daya terpasang.

#### **D. Daya Saing Iklim Investasi**

Stabilitas sosial dan politik adalah prasyarat terhadap tumbuh kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman stabilitas keamanan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan berkoordinasi dengan pihak keamanan baik TNI maupun POLRI. Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan. Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman menjadi berkah yang besar untuk Indonesia, bagi Maluku juga untuk Kabupaten Seram Bagian Barat dimana masyarakatnya merupakan masyarakat multikultur yang kental terhadap adat budayanya.

Iklim daerah yang kondusif diciptakan salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan Organisasi Kepemudaan. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelijen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah terus meningkat.

Guna mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum maka ditetapkan 4 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan penyesuaian sesuai kondisi perkembangan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2023 jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat yang terlatih dan dikukuhkan di Kabupaten Seram Bagian Barat berjumlah 722 orang. Adapun pengaduan dan pelanggaran trantibum sepanjang tahun 2023 berjumlah 3 kasus dengan penyelesaian tuntas 100%.

-

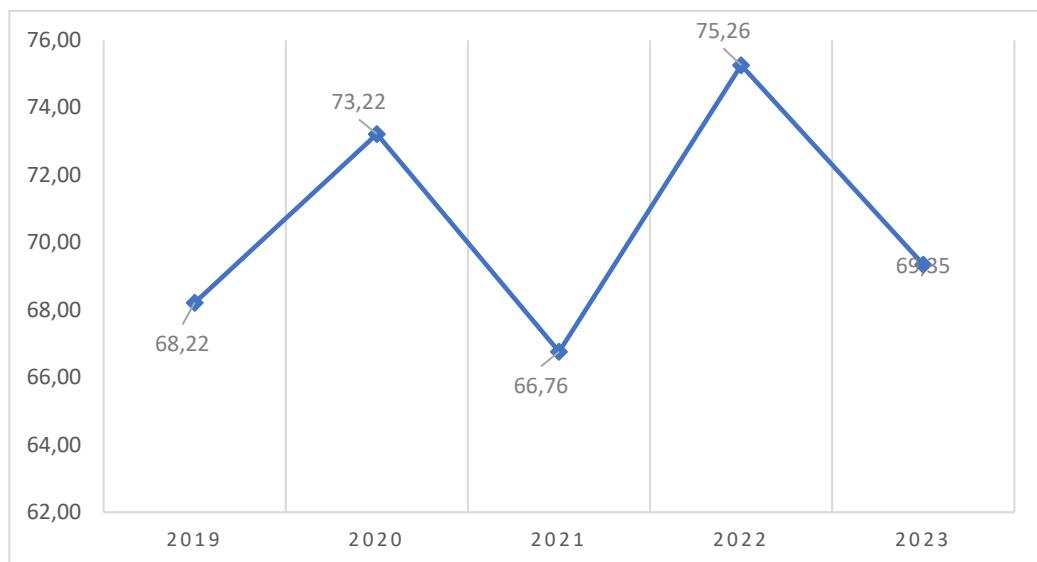
Sepanjang tahun 2023 sebesar 100% kriminalitas di Kabupaten Seram Bagian Barat ditangani. Rata-rata konflik sosial yang terjadi akibat dari perilaku pemuda dan kenakalan remaja yang berdampak terhadap perkelahian yang berskala besar baik antar kelompok, maupun antar desa. Kondisi ini yang mengharuskan pemerintah daerah sering melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat terutama pada sekolah-sekolah tentang pentingnya hidup rukun dan damai dalam hidup bermasyarakat melalui 4 Pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Kondisi perpolitikan di Kabupaten Seram Bagian Barat berjalan dengan baik tanpa adanya gesekan politik yang mengancam keberlangsungan hidup bermasyarakat. DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki 30 Anggota yang tersebar di 10 Partai Politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Hati Nurani Rakyat pada pemilu legislatif tahun 2019 untuk periode 2019-2024. Dalam Pemilu Legislatif tahun 2024, perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Salah satu indikator dalam mengolah daya saing iklim investasi di suatu daerah adalah bagaimana capaian Indeks Demokrasi. Indeks Demokrasi merupakan ukuran untuk memotret kualitas perilaku demokrasi pemerintah dan masyarakat disebuah wilayah. Indeks demokrasi diukur khusus untuk wilayah di Indonesia sehingga cara pengukurannya berbeda dengan indeks-indeks lain yang unit analisisnya negara. Indeks demokrasi telah menjadi rujukan pembangunan politik nasional dan daerah. Indeks demokrasi memiliki keunggulan berupa data dan informasi yang detail karena yang dikumpulkan adalah kasus dan data riil. Dengan data tersebut, dinamika kualitas demokrasi lebih mudah dijelaskan dan diintervensi (diperbaiki) oleh pemerintah dan masyarakat.

Indeks demokrasi membantu menunjukkan secara jelas dan sederhana seberapa demokratis atau seberapa tidak demokratis sebuah daerah. Indeks ini membantu untuk evaluasi perkembangan demokrasi dan kaitannya dengan faktor-faktor lain yang terakit secara teoretis dengan tingkat demokrasi sebuah daerah, seperti tingkat pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, tingkat keragaman etnik dan kedaerahan. Indeks demokrasi di wilayah Maluku pada tahun 2023 mencapai angka 69,35 atau turun sebanyak 5,91 point di tahun 2022 yaitu sebesar 75,26.

**Tabel 2.15. Indeks Demokrasi Wilayah Maluku Tahun 2019-2023**



*Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2024*

## 2.4 Aspek Pelayanan Umum

### A. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dengan adanya SAKIP dapat memberikan manfaat untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan serta mendorong pemerintah daerah dalam melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan. Beberapa indikator penilaian SAKIP diantaranya Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah dan rencana aksi.

Penilaian SAKIP dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan predikat nilai AA untuk kategori sangat semuaskan, hingga predikat D dengan kategori sangat kurang. Untuk tahun 2022 dan tahun 2023 Kabupaten Seram Bagian Barat dinilai dengan predikat CC yaitu kategori cukup.

### B. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan



administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adanya strander pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggarannya.

Salah satu indikator dalam mengukur kualitas pelayanan publik suatu pemerintahan adalah Indeks Pelayanan Publik yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang diperoleh melalui pemantauan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dengan unsur penilaian meliputi aspek layanan profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan, dan inovasi. Hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik diberi nilai 0-1,00 atau predikat F dengan kategori gagal, sampai dengan nilai 4,51-5,00 atau predikat A dengan kategori pelayanan prima.

Kabupaten Seram Bagian Barat sendiri pada tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Kemenpan RB diberi nilai 2,97 atau predikat C dengan kategori Cukup. Beberapa Upaya yang perlu untuk dilakukan adalah memperpendek prosedur pelayanan, mempercepat waktu penyelesaian, menurunkan biaya pelayanan, meningkatkan kualitas produk pelayanan, menyiapkan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kompetensi petugas pemberi pelayanan.

### C. Indeks Inovasi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) sebagai salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Fungsi kegiatan penelitian dan pengembangan (kelitbang) ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi, kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan terobosan yang dihasilkan oleh kelitbang dapat mendukung percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing tinggi. Hal ini menjadi dasar pentingnya peran kelitbang untuk mendukung kemajuan pembangunan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Sebagai salah satu upaya penting untuk mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga Kabupaten

Seram Bagian Barat adalah melalui penelitian sebagai pintu awal kemajuan daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional antara lain dengan disahkannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Salah satu amanat didalam Undang-Undang tersebut adalah pemerintah daerah wajib mengembangkan invensi dan inovasi yang dihasilkan dari penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan, alih teknologi, rekayasa balik, intermediasi teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau komersialisasi teknologi. Invensi dan inovasi tersebut juga ditujukan untuk menjadi solusi permasalahan daerah dan/atau menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat.

Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023 adalah sebesar 36,97 point dengan kategori inovatif, dimana angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 35,9 dengan kategori inovatif. Kondisi inovasi daerah untuk Kabupaten Seram Bagian Barat cukup baik terjadi pada tahun 2021 dimana IID mencapai angka 52,56 point dengan jumlah inovasi sebanyak 39 inovasi yang memenuhi syarat dan diterima oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari inovasi daerah.

**Tabel 2.36. Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021-2023**

No	Indikator	Capaian Indikator		
		2021	2022	2023
1	Indeks Inovasi Daerah	52,56	35,90	36,97
2	Jumlah inovasi yang digagas perangkat daerah	39	18	18
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	94,87	100	100

*Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2024*

#### **D. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. Ruang lingkup pelayanan SPBE meliputi pelayanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil



negara, pelaku usaha, masyarakat, dan juga pihak lainnya. Tujuan SPBE adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, inovatif dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

SPBE dinilai oleh Kementerian Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan hasil penilaian berupa pemberian predikat penilaian yaitu terhadap daerah dengan nilai SPBE <1,8 diberi predikat SPBE Kurang, sampai dengan nilai 4,2-5,0 diberi predikat SPBE Memuaskan. Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan hasil penilaian tahun 2023, diberi penilaian 1,60 yaitu predikat SPBE Kurang.

## 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2005-2025 yang dibarkan dalam 4 (empat) periode RPJMD, dimana visi pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah "***Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Barat yang Nyaman-Sejahtera, Maju-Berkualitas, dan Adil-Demokratis melalui Penguatan dan Pengembangan Potensi Lokal***". Upaya mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut:

- **Misi 1 : Mewujudkan Kabupaten Seram Bagian Barat yang Nyaman dan Sejahtera melalui Penguatan dan Pengembangan Potensi Lokal.**  
Dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya tatanan masyarakat Seram Bagian Barat yang serasi, rukun, damai dan harmonis.
- **Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Seram Bagian Barat yang Maju dan Berkualitas melalui penguatan dan Pengembangan Potensi Lokal.**  
Dimaksudkan untuk mendorong terciptanya kapasitas manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi, serta sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan Seram Bagian Barat. Mendorong tersedianya berbagai infrasturktur sosial, ekonomi dan fasilitas publik yang merata dan berkualitas berdasarkan ciri dan karakteristik wilayah kepulauan, serta mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam Kabupaten Seram Bagian Barat.
- **Misi 3 : Mewujudkan Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Adil dan Demokratis Melalui Penguatan dan Pengembangan Potensi Lokal.**  
Dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya tatanan politik dan pemerintahan daerah yang responsif-antisipatif, aspiratif, demokratis dan berkualitas, serta terbentuknya tata kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, aman dan damai



melalui partisipasi aktif masyarakat untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Penilaian capaian misi menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

**Tabel 2.37. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Hasil evaluasi Misi 1 - Mewujudkan Kabupaten Seram Bagian Barat yang Nyaman dan Sejahtera melalui Penguatan dan Pengembangan Potensi Lokal memperoleh capaian 78,83% atau kategori Tinggi. Uraian hasil tingkat capaian kinerja Kabupaten Seram Bagian Barat pada Misi 1 RPJPD Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

**Tabel 2.38. Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Terhadap Sasaran Pokok pada Misi 1 RPJPD**  
**Tahun 2005-2025**

Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Capaian Kinerja RPJMD Kab/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota (%)			
			Periode I 2006-2011	Periode II 2012-2016	Periode III 2018-2022	Periode IV 2023	Periode I 2006-2011	Periode II 2012-2016	Periode III 2018-2022	Periode IV 2023	Periode I 2006-2011	Periode II 2012-2016	Periode III 2018-2022	Periode IV 2023
Pengetahuan nilai nilai toleransi antar umat beragama.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-
Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	87%	100%	96%	99%	100%	100%	69,15%	71,25%	73,71%	-	72%	72%	74%	-
Persentase Kekerasan terhadap Anak yang ditangani	89%	100%	97%	98%	100%	100%	89,71%	91,21%	93,71%	-	92%	93%	94%	-
Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	17%	35%	30%	40%	45%	55%	20,81%	28,47%	32%	-	69%	71%	71%	-
Persentase Cabang Olahraga yang dibina	7%	40%	25%	30%	35%	50%	9%	11,71%	12,07%	-	36%	39%	34%	-
Persentase Penanganan Kasus K3	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-

Hasil evaluasi Misi 2 - Mewujudkan Kabupaten Seram Bagian Barat yang Maju dan Berkualitas melalui penguatan dan Pengembangan Potensi Lokal memperoleh capaian 74,75% atau kategori Sedang. Uraian hasil Tingkat Capaian Kinerja Kabupaten Seram Bagian Barat pada Misi 2 RPJPD Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

**Tabel 2.39. Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Terhadap Sasaran Pokok pada Misi 2 RPJPD  
Tahun 2005-2025**

Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Capaian Kinerja RPJMD Kab/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota (%)			
			Periode I 2006-2011	Periode II 2012-2016	Periode III 2018-2022	Periode IV 2023	Periode I 2006-2011	Periode II 2012-2016	Periode III 2018-2022	Periode IV 2023	Periode I 2006-2011	Periode II 2012-2016	Periode III 2018-2022	Periode IV 2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	60,19	67	66	67	68	69	61,47	63,76	66,67	-	93%	95%	98%	-
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,68	7,38	5	6,2	6,8	7,38	4,8	5,1	5,3	-	96%	82%	78%	-
Tingkat Kemiskinan	37,78%	23%	30%	28%	25%	23%	26,70%	26,50%	22,25%	-	112%	106%	112%	-
Tingkat Pengangguran Terbuka	17,30%	10%	15%	13%	11%	10%	6,71%	8,21%	5,65%	-	45%	63%	51%	-
Pendapatan Per Kapita (Rupiah)	2.140.038	19.200.000	10.879.000	16.560.000	17.900.000	19.200.000	8.260.000	15.367.270	16.053.980	-	76%	93%	90%	-
Indeks Lingkungan Hidup	58	79	80	85	85	87	73,09	71,66	77,69	-	91%	84%	91%	-



Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Capaian Kinerja RPJMD Kab/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota (%)			
			Periode I 2006- 2011	Periode II 2012- 2016	Periode III 2018- 2022	Periode IV 2023	Periode I 2006- 2011	Periode II 2012- 2016	Periode III 2018- 2022	Periode IV 2023	Periode I 2006- 2011	Periode II 2012- 2016	Periode III 2018- 2022	Periode IV 2023
Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar	25%	85%	55%	68%	80%	85%	24,12%	29,96%	35,67%	-	43,85%	44,06%	44,59%	-
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	10%	55%	15%	25%	45%	55%	8,71%	10,82%	14,77%	-	58%	43%	33%	-

Hasil evaluasi Misi 3 - Mewujudkan Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Adil dan Demokratis Melalui Penguatan dan Pengembangan Potensi Lokal memperoleh capaian 96% atau kategori Sangat Tinggi. Uraian hasil Tingkat Capaian Kinerja Kabupaten Seram Bagian Barat pada Misi 3 RPJPD Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

**Tabel 2.40. Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Terhadap Sasaran Pokok pada Misi 3 RPJPD**

**Tahun 2005-2025**

Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Capaian Kinerja RPJMD Kab/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota (%)			
			Periode I 2006- 2011	Periode II 2012- 2016	Periode III 2018- 2022	Periode IV 2023	Periode I 2006- 2011	Periode II 2012- 2016	Periode III 2018- 2022	Periode IV 2023	Periode I 2006- 2011	Periode II 2012- 2016	Periode III 2018- 2022	Periode IV 2023
Status kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah	65%	90%	95%	97%	98%	100%	90%	95%	97%	-	95%	98%	99%	-



Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Capaian Kinerja RPJMD Kab/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota (%)			
			Periode I 2006- 2011	Periode II 2012- 2016	Periode III 2018- 2022	Periode IV 2023	Periode I 2006- 2011	Periode II 2012- 2016	Periode III 2018- 2022	Periode IV 2023	Periode I 2006- 2011	Periode II 2012- 2016	Periode III 2018- 2022	Periode IV 2023
Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	84,1%	90%	85%	87%	88%	90%	71%	75,11%	81,69%	-	84%	86%	93%	-



Sebagaimana hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 menunjukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja pada Misi 1 "Mewujudkan Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Nyaman dan Sejahtera Melalui Penguatan dan Pengembangan Potensi Lokal" dilakukan terhadap 2 sasaran pokok dan dijabarkan dalam 6 indikator. Dimana sebanyak 3 (tiga) indikator telah terealisasi dengan angka persentase capaian 91-100% (tinggi), 2 (dua) indikator 71-74% (sedang), dan 1 indikator terealisasi kurang dari 50% (sangat rendah), sehingga rata-rata tingkat capaian pada Misi 1 yaitu sebesar **78,83%** dengan predikat capaian "**tinggi**";
2. Pengukuran kinerja pada Misi 2 "Mewujudkan Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Maju dan Berkualitas Melalui Penguatan dan Pengembangan Potensi Lokal" dilakukan terhadap 5 (lima) sasaran pokok dan 8 (delapan) indikator. Dimana sebanyak 3 (tiga) indikator terealisasi lebih dari 91% (sangat tinggi), 2 (dua) indikator terealisasi lebih dari 76% (tinggi), dan 3 (tiga) indikator terealisasi kurang dari 50% (sangat rendah), sehingga rata-rata tingkat capaian pada Misi 2 yaitu sebesar **74,75%** dengan predikat capaian "**sedang**";
3. Pengukuran kinerja pada Misi 3 "Mewujudkan Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Adil dan Demokratis Melalui Penguatan dan Pengembangan Potensi Lokal" dilakukan terhadap 2 (sasaran pokok) sasaran pokok dan 2 indikator. Dimana 2 (dua) indikator terealisasi lebih dari 91% (sangat tinggi), sehingga rata-rata tingkat capaian pada Misi 3 sebesar **96%** dengan predikat capaian "**sangat tinggi**";

Secara garis besar, rata-rata capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2005-2025 sampai dengan tahun 2022 mencapai **83,13%**. Perolehan capaian tersebut tergolong pada predikat capaian "**tinggi**", artinya sebagian besar target indikator pada tiap misi dan sasaran pokok RPJPD sudah terealisasi.

**Tabel 2.41. Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2005-2025**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan /Penurunan (%)	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	60,19	66,67	10,77	Capain IPM melalui indikator umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak, meningkat dari tahun ke tahun terakhir pada tahun 2022 sebesar 10,77 %. Namun hal ini belum memenuhi target RPJPD yaitu pada angka 68, maupun secara nasional yang pada tahun 2022 mencapai angka 72,91.
2	Angka Kemiskinan (%)	37,78	22,25	-41,11	Terlihat capaian penurunan angka kemiskinan secara signifikan sebesar 41,11% sampai dengan tahun 2022 dengan capaian sebesar 22,25% dan sudah melampaui target RPJPD sebesar 25%. Angka ini masih dalam kategori tinggi dimana secara nasional berada di angka 9,54%.
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	17,30	5,65	-67,34	Terlihat capaian penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 67,34% sampai dengan tahun 2022 dengan capaian sebesar 5,65% dan sudah melewati target

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan /Penurunan (%)	Keterangan
					RPJPD sebesar 11%.
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,68	5,3	13,25	Terlihat capaian peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 13,25% pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 5,3% namun angka ini belum memenuhi target pada RPJPD yaitu sebesar 6,8%.
5	Pendapatan Perkapita (Rupiah)	2.140.038	16.053.980	650,17	Capaian pendapatan perkapita pada tahun 2022 naik sangat signifikan dibandingkan tahun 2005 sebesar 650,17%. Namun capaian Rp.16,05 Juta ini masih lebih rendah dari target RPJPD sebesar Rp.17,9 Juta.
6	Ketimpangan Pendapatan (poin)	0,206	0,314	52,43	Sampai dengan tahun 2022 kondisi ketimpangan di Kabupaten Seram Bagian Barat masih dalam kategori ketimpangan rendah (0,2-0,39). Adapun adanya kenaikan score dari Rasio Gini sesuai dengan Teori Simon Kuznets (1955) yang membuat hipotesis adanya kurva U terbalik bahwa mula-mula ketika pembangunan



No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan /Penurunan (%)	Keterangan
					dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata.
7	PDRB Per Kapita (Rupiah)	2.140.038	16.053.980	650,17	Capaian pendapatan perkapita pada tahun 2022 naik sangat signifikan dibandingkan tahun 2005 sebesar 650,17%. Namun capaian Rp.16,05 Juta ini masih lebih rendah dari target RPJPD sebesar Rp.17,9 Juta.

## 2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Paradigma pembangunan penduduk menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, pengetahuan akan perubahan demografi sangat diperlukan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan nasional. Perkiraan besaran, komposisi, dan sebaran populasi di masa depan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah, misalnya untuk menjamin pendidikan bagi anak, menyediakan kesempatan kerja bagi kaum muda, dan menyiapkan jaminan sosial bagi penduduk lanjut usia.

Proyeksi penduduk memberikan Gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan.

### A. Analisis Proyeksi Kependudukan

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan. Perencanaan pembangunan perlu ditunjang dengan informasi terkait besaran dan

komposisi kependudukan yang lengkap dan berkesinambungan. Hasil sensus, survei, dan data administratif menyediakan informasi penduduk untuk kondisi saat pendataan tersebut dilakukan. Namun, penyusunan perencanaan dan kebijakan sesuai dinamika waktu dimasa mendatang membutuhkan informasi proyeksi penduduk di masa depan. Proyeksi penduduk akan membantu membuat kebijakan untuk memonitor dan mengevaluasi program, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi, serta merancang kebijakan selanjutnya.

Proyeksi penduduk merupakan penghitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Pembentukan asumsi untuk ketiga komponen tersebut dilakukan menggunakan data-data yang menggambarkan tren di masa lampau, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan hubungannya satu sama lain. Penerapan asumsi yang digunakan akan menentukan hasil proyeksi jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan.

Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Kementerian Kesehatan, serta para pakar kependudukan bekerja sama menyusun asumsi dalam perhitungan proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk dibuat dengan metode komponen kohort berdasarkan asumsi kecenderungan fertilitas, mortalitas, serta migrasi yang paling mungkin terjadi selama periode 20 tahun yang akan datang.

Jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2045 diproyeksikan berjumlah 297.270 Jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 149.920 Jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 147.350 jiwa. Proyeksi Penduduk dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang sebagai berikut:

**Tabel 2.42. Proyeksi Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045**

Kelompok Umur	Kondisi Tahun 2023	Jumlah Penduduk (Ribu)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-4	14,73	24,68	24,93	24,49	25,47	25,67
5-9	22,91	19,62	24,53	24,81	28,94	31,02

Kelompok Umur	Kondisi Tahun 2023	Jumlah Penduduk (Ribu)				
		2025	2030	2035	2040	2045
10–14	23,60	18,47	19,58	24,49	26,04	29,38
15–19	24,51	22,07	18,34	19,45	15,80	14,40
20–24	22,64	22,53	21,69	18,03	16,35	13,63
25–29	17,18	21,07	22,18	21,37	21,97	21,93
30–34	14,27	18,20	20,87	21,96	25,46	27,37
35–39	15,12	15,83	18,01	20,64	22,94	25,36
40–44	14,34	14,80	15,61	17,79	18,42	20,08
45–49	11,49	12,96	14,52	15,35	17,24	18,39
50–54	9,90	11,13	12,61	14,15	15,70	17,24
55–59	7,81	9,10	10,67	12,12	13,58	15,07
60–64	6,38	7,26	8,47	9,98	11,19	12,56
65–69	4,19	5,22	6,49	7,63	8,87	10,05
70–74	2,69	3,24	4,36	5,47	6,57	7,68
75+	3,21	3,49	4,26	5,59	6,19	7,31
<b>Total</b>	<b>214,97</b>	<b>229,67</b>	<b>247,12</b>	<b>263,32</b>	<b>280,73</b>	<b>297,14</b>

Sebagaimana data di atas, pertumbuhan penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat diproyeksikan terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan pertambahan penduduk rata-rata 16.870 Jiwa per 5 tahun atau 3.370 jiwa setiap tahun.

**Tabel 2.43. Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045**

No	Parameter	Kondisi Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
	Jumlah Penduduk						
1.	Laki-laki	108.538	117.020	125.440	133.250	141.760	149.920

No	Parameter	Kondisi Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
2.	Perempuan	106.441	112.650	121.680	130.070	138.850	147.350
	Total	214.979	229.670	247.120	263.320	280.610	297.270
	Komposisi Umur						
3.	0-14 Tahun	61.254	62.770	69.040	73.790	80.440	86.070
4.	15-64 Tahun	143.690	154.950	162.970	170.840	178.660	186.030
5.	65+ Tahun	10.035	11.950	15.110	18.690	21.630	25.040
6.	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,91	2,9	2,56	2,47	2,31	2,19
7.	<i>Infant Mortality Rate (IMR)</i>	29,14	26,76	23,86	19,41	16,50	12,71

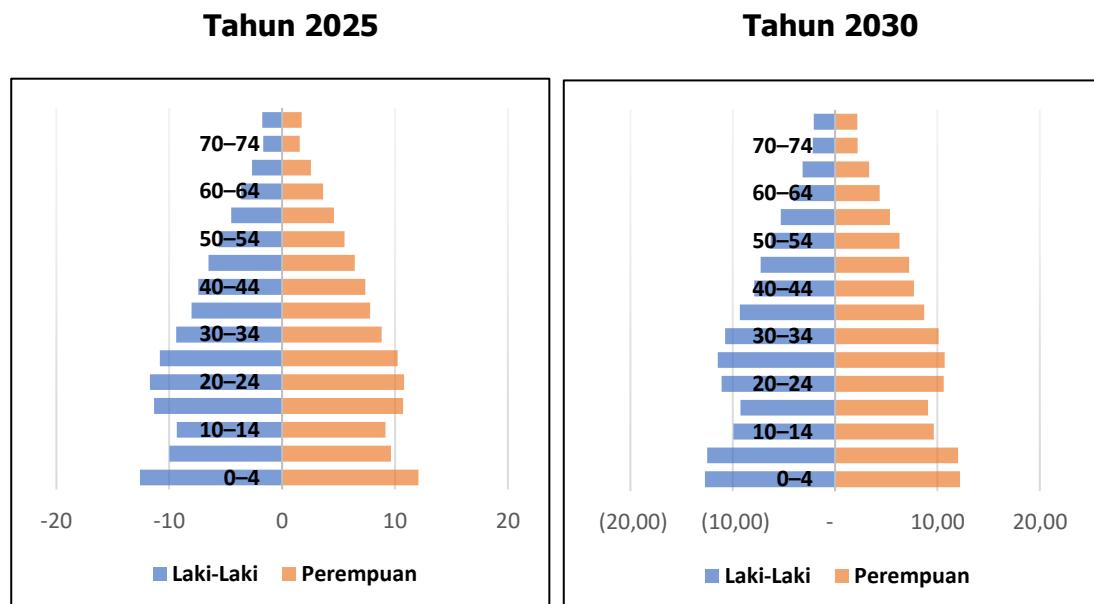
Sumber: BPS Maluku diolah, 2024

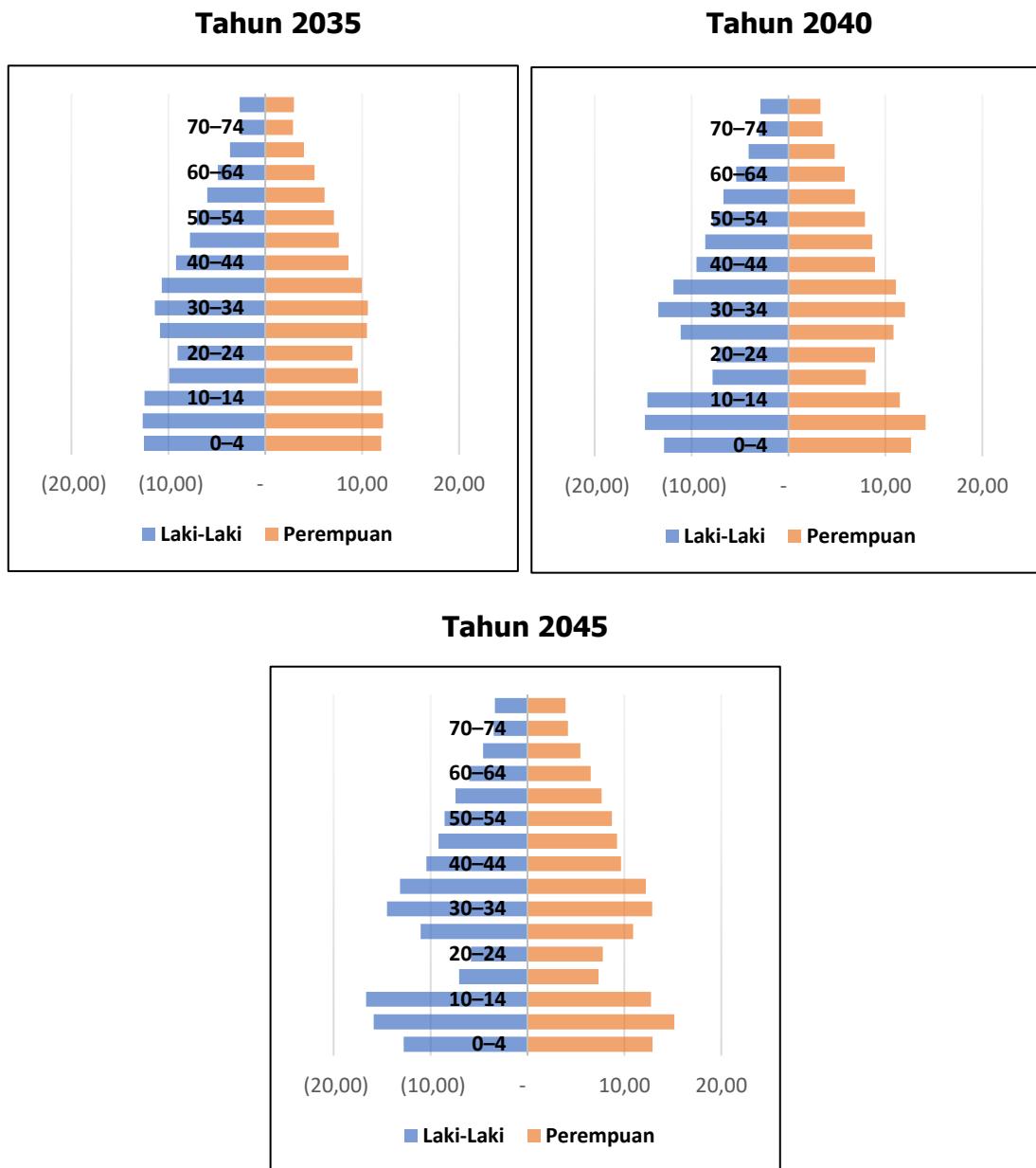
Sebagaimana data parameter di atas, menunjukkan bahwa penduduk laki-laki sepanjang 20 tahun kedepan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan, dengan perbandingan 1% lebih banyak penduduk laki-laki. Periodesasi 20 tahun kedepan dari segi demografi memberikan dampak yang baik kepada Kabupaten Seram Bagian Barat jika dilihat dari proyeksi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dari penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan >65 Tahun). Jumlah penduduk usia produktif rata-rata sepanjang 20 tahun kedepan di Kabupaten Seram Bagian Barat diproyeksikan sebanyak 65,48%. Kondisi ini disebut bonus demografi, yaitu masa dimana penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia nonproduktif dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk secara keseluruhan.

Kondisi bonus demografi di Kabupaten Seram Bagian Barat untuk 20 tahun yang akan datang jika dimanfaatkan dengan baik, maka bisa dijadikan peluang bagi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang bisa tumbuh pesat dengan ketersediaan tenaga kerja usia muda, tentunya akan menghasilkan tingkat produktivitas tinggi. Untuk memaksimalkan keuntungan dari bonus demografi, perlu fokus pada peningkatan kualitas individu melalui pendidikan serta pelatihan, memajukan sektor pekerjaan, mengatur pertumbuhan jumlah penduduk, dan memperbaiki standar kesehatan masyarakat. Salah satu dampak negatif jika suatu daerah tidak memanfaatkan bonus demografi dengan baik, adalah akan terjadi tingkat pengangguran yang tinggi.

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat untuk 20 tahun kedepan dari parameter *Total Fertility Rate* (TFR), menggambarkan kondisi yang cukup baik. Rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama usia reproduktifnya untuk 20 tahun kedepan masih di atas 2-3 orang anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa beberapa faktor seperti tingkat pendidikan Wanita, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, status sosial ekonomi, budaya, agama, dan kebijakan pemerintah terkait keluar berencana, dipandang telah cukup baik dilaksanakan.

**Gambar 2.16. Piramida Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat,  
Proyeksi Tahun 2025-2045**





Sumber: BPS Maluku, diolah, 2024

## B. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Perencanaan dan pengembangan sarana serta prasarana yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan masa depan. Dengan memproyeksikan kebutuhan sarana dan prasarana untuk 20 tahun ke depan, maka dapat merancang infrastruktur yang mendukung pertumbuhan populasi, perkembangan ekonomi, dan perubahan sosial. Analisis proyeksi ini tidak hanya membantu dalam alokasi sumber daya yang lebih efisien tetapi juga memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat memenuhi tuntutan yang berkembang seiring waktu. Melalui pemodelan dan evaluasi data yang cermat, tentunya dapat



mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta merumuskan strategi yang tepat untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkualitas bagi masyarakat di masa depan.

### **1) Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal**

Dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan pertumbuhan populasi yang pesat, proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana untuk rumah atau tempat tinggal menjadi krusial untuk merencanakan pengembangan yang berkelanjutan. Analisis proyeksi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhan infrastruktur yang akan mendukung pembangunan perumahan dalam dua dekade mendatang. Dengan memanfaatkan data demografis dan tren perkembangan, kita dapat merencanakan pembangunan yang tidak hanya memenuhi permintaan saat ini tetapi juga beradaptasi dengan perubahan yang akan datang. Analisis ini akan memberikan panduan strategis untuk memastikan bahwa infrastruktur perumahan, mulai dari fasilitas dasar hingga layanan publik, dapat mendukung kualitas hidup yang optimal dan mengakomodasi pertumbuhan yang dinamis di masa depan.

**Tabel 2.44. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	214.979	229.670	247.120	263.320	280.610	297.270
Proyksi Kebutuhan Rumah (unit)	53.744	54.912	57.521	60.623	63.932	67.088

*Sumber: Hasil analisis, 2024*

Berdasarkan analisis proyeksi kebutuhan rumah atau tempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana Tabel di atas, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan dalam kebutuhan perumahan selama dua dekade ke depan. Proyeksi ini didasarkan pada pertumbuhan populasi yang diperkirakan dan perubahan dalam pola hunian yang memerlukan perhatian mendalam dari berbagai pihak terkait. Pada tahun 2025, kebutuhan rumah di



Kabupaten Seram Bagian Barat diperkirakan mencapai sekitar 54.912 unit. Angka ini mencerminkan kebutuhan mendasar untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi dan perubahan struktur keluarga yang terjadi saat ini. Memasuki tahun 2030, kebutuhan ini diperkirakan meningkat menjadi 57.521 unit, menunjukkan adanya tambahan permintaan seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang terus berlanjut. Melanjutkan ke tahun 2035, proyeksi kebutuhan rumah meningkat lebih lanjut menjadi 60.623 unit. Lonjakan ini mencerminkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan kebutuhan tempat tinggal yang lebih besar seiring dengan ekspansi wilayah dan peningkatan standar hidup. Pada tahun 2040, proyeksi menunjukkan kebutuhan akan 63.932 unit rumah, menandakan perlunya strategi pembangunan yang lebih intensif untuk memenuhi permintaan yang terus berkembang.

Pada tahun 2045, kebutuhan rumah di Kabupaten Seram Bagian Barat diperkirakan akan mencapai 67.088 unit. Angka ini menunjukkan pertumbuhan kebutuhan yang signifikan dan menekankan perlunya perencanaan jangka panjang yang strategis untuk memastikan penyediaan perumahan yang memadai dan berkualitas bagi masyarakat. Proyeksi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tuntutan masa depan terhadap perumahan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan memahami tren ini, pemerintah, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang dan melaksanakan kebijakan serta strategi pembangunan yang sesuai, memastikan bahwa kebutuhan perumahan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan berkelanjutan.

## **2) Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Air Minum**

Dalam rangka memastikan akses yang berkelanjutan dan memadai terhadap air minum, penting untuk melakukan proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana air minum berdasarkan standar nasional. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merencanakan kapasitas penyediaan air minum yang diperlukan selama dua dekade mendatang. Dengan menggunakan standar SNI, kita dapat memastikan bahwa perencanaan dan pengembangan infrastruktur air minum tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan dan perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Melalui proyeksi yang akurat, kita dapat mendukung kebijakan pengelolaan air

yang efektif, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan keberlanjutan sumber daya air bagi masyarakat.

**Tabel 2.45. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 (dalam Milyar Liter)**

<b>Uraian</b>	<b>Kondisi Tahun 2023</b>	<b>Tahun</b>				
		<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>	<b>2040</b>	<b>2045</b>
Jumlah Penduduk	214.979	229.670	247.120	263.320	280.610	297.270
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Milyar liter)	11,77	12,03	12,61	13,29	13,98	14,70

*Sumber: Hasil analisis, 2024*

Berdasarkan analisis proyeksi kebutuhan air minum untuk Kabupaten Seram Bagian Barat, diperoleh gambaran yang jelas mengenai pertumbuhan permintaan air minum selama dua dekade mendatang. Data ini memberikan panduan yang penting untuk perencanaan dan pengembangan sistem penyediaan air yang berkelanjutan.

Pada tahun 2025, kebutuhan air minum diperkirakan mencapai 12,03 miliar liter. Angka ini mencerminkan kebutuhan mendasar untuk menyediakan air bersih bagi populasi yang ada, mengingat konsumsi air per kapita dan pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif stabil. Memasuki tahun 2030, proyeksi menunjukkan peningkatan kebutuhan menjadi 12,61 miliar liter, mencerminkan pertumbuhan populasi dan kebutuhan yang terus meningkat seiring dengan perkembangan kawasan dan urbanisasi. Pada tahun 2035, kebutuhan air minum diperkirakan mencapai 13,29 miliar liter. Lonjakan ini menandakan adanya tekanan tambahan pada sistem penyediaan air, yang memerlukan perencanaan strategis untuk mengatasi tantangan yang muncul dari pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi. Proyeksi untuk tahun 2040 menunjukkan kebutuhan yang lebih besar, yaitu 13,98 miliar liter, menekankan perlunya pengembangan infrastruktur yang lebih luas dan efisien untuk memastikan ketersediaan air bersih.

Pada tahun 2045, proyeksi kebutuhan air minum diperkirakan mencapai 14,70 miliar liter. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat harus mempersiapkan strategi jangka panjang untuk memenuhi permintaan air yang terus berkembang. Ini termasuk investasi dalam infrastruktur penyediaan air, teknologi pemantauan, dan manajemen sumber daya air yang berkelanjutan. Hasil proyeksi ini menyoroti pentingnya perencanaan yang cermat dan investasi yang memadai dalam sistem penyediaan air minum. Dengan memahami tren kebutuhan air ini, para pemangku kepentingan dapat merancang dan melaksanakan kebijakan serta proyek yang dapat mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan memastikan akses air bersih yang memadai bagi seluruh masyarakat di masa depan.

### 3) Proyeksi Kebutuhan Listrik

Dalam era pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat, pemahaman tentang proyeksi kebutuhan listrik menjadi sangat penting untuk memastikan ketersediaan energi yang memadai bagi masyarakat. Analisis proyeksi kebutuhan listrik untuk dua dekade mendatang, berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), memberikan panduan strategis untuk perencanaan dan pengembangan infrastruktur kelistrikan. Melalui perhitungan yang akurat dan mempertimbangkan faktor-faktor pertumbuhan populasi serta perubahan dalam pola konsumsi energi, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masa depan secara menyeluruh. Dengan informasi ini, kita dapat merancang sistem kelistrikan yang tidak hanya memenuhi permintaan saat ini tetapi juga siap menghadapi tantangan yang akan datang, memastikan penyediaan energi yang berkelanjutan dan efisien untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun mendatang.

**Tabel 2.46. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 (dalam GWh)**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	214.979	229.670	247.120	263.320	280.610	297.270

<b>Uraian</b>	<b>Kondisi Tahun 2023</b>	<b>Tahun</b>				
		<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>	<b>2040</b>	<b>2045</b>
Jumlah Rumah	53.744	54.912	57.521	60.623	63.932	67.088
Proyeksi Kebutuhan Listrik (GWh)	45,21	197,68	206,17	217,24	230,02	241,71

*Sumber: Hasil analisis, 2024*

Hasil analisis proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan peningkatan signifikan dalam permintaan listrik seiring dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga selama dua dekade mendatang. Pada tahun 2025, kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 197,68 GWh, dengan jumlah rumah mencapai 54.912 unit. Angka ini mencerminkan kebutuhan dasar untuk mendukung populasi yang ada dan infrastruktur yang sedang berkembang. Memasuki tahun 2030, proyeksi kebutuhan listrik meningkat menjadi 206,17 GWh, sejalan dengan pertambahan jumlah rumah tangga yang mencapai 57.521 unit. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan konsumsi energi seiring dengan urbanisasi dan perkembangan teknologi. Pada tahun 2035, kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 217,24 GWh dengan 60.623 unit rumah tangga. Lonjakan ini mengindikasikan adanya kebutuhan yang lebih besar untuk infrastruktur kelistrikan guna memenuhi permintaan yang meningkat dari populasi yang terus berkembang. Pada tahun 2040, proyeksi kebutuhan listrik mencapai 230,02 GWh, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 63.932 unit. Kenaikan ini menyoroti perlunya perencanaan jangka panjang dan pengembangan sistem kelistrikan yang dapat mendukung pertumbuhan yang pesat serta memastikan penyediaan energi yang stabil.

Pada tahun 2045, kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 241,71 GWh, dengan jumlah rumah tangga mencapai 67.088 unit. Peningkatan ini menekankan pentingnya investasi dalam teknologi dan infrastruktur kelistrikan untuk mengakomodasi permintaan yang terus berkembang, serta memastikan bahwa penyediaan listrik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin besar di masa depan. Proyeksi ini memberikan panduan penting untuk

perencanaan dan pengembangan infrastruktur kelistrikan di Kabupaten Seram Bagian Barat, memastikan bahwa sistem energi yang ada dapat memenuhi tuntutan yang akan datang dengan efisiensi dan keberlanjutan yang optimal.

#### 4) Proyeksi Kebutuhan Pengolahan Persampahan

Menghadapi tantangan pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, Kabupaten Seram Bagian Barat perlu merencanakan strategi pengolahan persampahan yang berkelanjutan untuk periode 2025-2045. Proyeksi kebutuhan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai volume sampah yang akan dihasilkan, kapasitas pengolahan yang diperlukan, serta teknologi dan infrastruktur yang akan mendukung pengelolaan sampah secara efektif. Dengan memahami tren dan kebutuhan masa depan, diharapkan Kabupaten Seram Bagian Barat dapat mengembangkan sistem pengolahan sampah yang efisien, ramah lingkungan, dan selaras dengan prinsip 'Saka Mese Nusa' dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan pulau ini.

Untuk menghasilkan proyeksi kebutuhan pengolahan persampahan yang akurat, digunakan metodologi yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait pengolahan sampah. Metode ini melibatkan beberapa langkah utama: pertama, analisis data historis mengenai produksi sampah dan pola konsumsi di Kabupaten Seram Bagian Barat. Data ini kemudian digunakan untuk memprediksi tren sampah masa depan dengan mempertimbangkan faktor pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi.

**Tabel 2.47. Proyeksi Kebutuhan Pengolahan Persampahan**

**Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	214.979	229.670	247.120	263.320	280.610	297.270
Proyeksi Timbunan	39.248	40.425	43.616	47.636	52.291	57.738

<b>Uraian</b>	<b>Kondisi Tahun 2023</b>	<b>Tahun</b>				
		<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>	<b>2040</b>	<b>2045</b>
Sampah (Ton)						
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	1	3	3	3	3	4

*Sumber: Hasil analisis, 2024*

Seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Barat, proyeksi timbunan sampah untuk periode 2025 hingga 2045 menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2025, diperkirakan timbunan sampah akan mencapai 40.425 ton per tahun, dengan kebutuhan pengolahan yang diperkirakan memerlukan sekitar 3 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), masing-masing dengan kapasitas 50 ton per hari. Selanjutnya, pada tahun 2030, timbunan sampah diproyeksikan meningkat menjadi 43.616 ton, dengan kebutuhan TPST yang tetap sekitar 3 unit. Peningkatan ini menunjukkan perlunya perencanaan jangka panjang untuk memastikan kapasitas pengolahan sampah yang memadai.

Memasuki tahun 2035, proyeksi timbunan sampah diperkirakan mencapai 47.636 ton, yang masih memerlukan sekitar 3 TPST untuk pengolahannya. Pada tahun 2040, dengan timbunan sampah yang diperkirakan mencapai 52.291 ton, jumlah TPST yang dibutuhkan tetap pada angka 3 unit. Namun, pada tahun 2045, dengan timbunan sampah yang diperkirakan mencapai 57.738 ton, akan diperlukan penambahan satu TPST, menjadi total 4 TPST, untuk mengelola jumlah sampah yang semakin meningkat. Proyeksi ini menegaskan pentingnya pengembangan infrastruktur pengolahan sampah yang berkelanjutan dan efisien untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif serta menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Seram Bagian Barat.



## 5) Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Memasuki dekade berikutnya, Kabupaten Seram Bagian Barat menghadapi tantangan dan peluang signifikan dalam pengembangan fasilitas kesehatan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, perubahan demografis, serta tuntutan kualitas hidup yang semakin tinggi, proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan menjadi kunci dalam merencanakan langkah-langkah strategis untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu menguraikan prediksi kebutuhan fasilitas kesehatan dalam rentang waktu 2025 hingga 2045, dengan fokus pada aspek penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan prioritas kesehatan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam rangka menghitung proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan yang akurat, metode Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi alat yang sangat berguna. Metode ini menawarkan pendekatan sistematis untuk memperkirakan jumlah dan tipe fasilitas kesehatan yang diperlukan berdasarkan data demografis, epidemiologis, dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku. Proses perhitungan melibatkan analisis kebutuhan berdasarkan rasio penduduk terhadap fasilitas kesehatan, serta proyeksi beban penyakit dan tingkat kunjungan. Dengan memanfaatkan pedoman SNI, perencanaan fasilitas kesehatan dapat dilakukan secara berbasis data dan terukur, memastikan bahwa perencanaan yang dilakukan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga dapat beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan masa depan.

**Tabel 2.48. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	214.979	229.670	247.120	263.320	280.610	297.270
Kebutuhan Rumah Sakit	2	2	3	3	3	4

<b>Uraian</b>	<b>Kondisi Tahun 2023</b>	<b>Tahun</b>				
		<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>	<b>2040</b>	<b>2045</b>
Kebutuhan Puskesmas	22	22	22	22	22	22
Kebutuhan Puskesmas Pembantu	52	52	52	52	52	52
Kebutuhan Polindes	55	55	55	58	66	75
Kebutuhan Posyandu	215	222	253	288	328	374

*Sumber: Hasil analisis, 2024*

Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat untuk periode 2025-2045 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa jenis fasilitas. Berdasarkan analisis data, jumlah rumah sakit yang dibutuhkan akan meningkat dari 2 unit pada tahun 2025 menjadi 4 unit pada tahun 2045. Penambahan ini mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan harapan hidup. Pada tahun 2025, Kabupaten ini memerlukan 2 rumah sakit, dan jumlah tersebut akan meningkat secara bertahap dengan penambahan 1 unit pada tahun 2030, 2035, dan 2040, hingga mencapai total 4 unit pada tahun 2045. Ini menunjukkan kebutuhan yang meningkat dalam penyediaan layanan kesehatan yang lebih komprehensif dan terjangkau bagi masyarakat.

Dalam hal Puskesmas, proyeksi menunjukkan bahwa jumlah yang dibutuhkan akan tetap pada 22 unit selama periode proyeksi 2025-2045. Stabilitas ini dapat mencerminkan kapasitas yang memadai dari Puskesmas yang ada untuk menangani kebutuhan kesehatan masyarakat saat ini. Begitu pula dengan Puskesmas Pembantu, yang tetap pada 52 unit selama periode tersebut, menunjukkan bahwa struktur dan distribusi fasilitas ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Namun, terdapat variasi yang lebih signifikan dalam proyeksi kebutuhan untuk Polindes dan Posyandu. Polindes yang berfungsi sebagai fasilitas



kesehatan dasar untuk daerah terpencil diperkirakan akan meningkat dari 55 unit pada tahun 2025 menjadi 75 unit pada tahun 2045, menunjukkan kebutuhan yang semakin besar untuk jangkauan layanan kesehatan primer di wilayah yang lebih luas. Sementara itu, Posyandu diproyeksikan akan mengalami peningkatan yang substansial dari 222 unit pada tahun 2025 menjadi 374 unit pada tahun 2045, menyoroti kebutuhan yang mendesak untuk layanan kesehatan ibu dan anak di seluruh Kabupaten.

## **6) Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan**

Memasuki era dinamika dan perkembangan pesat, Kabupaten Seram Bagian Barat menghadapi tantangan dan peluang signifikan dalam mengembangkan infrastruktur pendidikan untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan fokus pada tahun 2025 hingga 2045, proyeksi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk yang terus berkembang serta perubahan sosial-ekonomi yang cepat. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa setiap desa, dari yang paling terpencil hingga yang lebih maju, memiliki akses yang adil dan berkualitas terhadap fasilitas pendidikan. Melalui proyeksi ini, diharapkan terwujud sistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan, yang dapat mendukung kemajuan generasi masa depan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam merancang proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan, penting untuk menggunakan metode yang akurat dan terstandarisasi. Salah satu pendekatan yang efektif adalah metode SNI (Standar Nasional Indonesia), yang menawarkan kerangka kerja sistematis dalam menghitung kebutuhan infrastruktur pendidikan. Metode ini mengintegrasikan data demografis, tingkat pertumbuhan penduduk, dan distribusi geografis untuk mengestimasikan jumlah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diperlukan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan menggunakan standar ini, kita dapat memastikan bahwa proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan tidak hanya memenuhi tuntutan jumlah penduduk, tetapi juga mempertimbangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah kabupaten.

**Tabel 2.49. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045**

<b>Uraian</b>	<b>Kondisi Tahun 2023</b>	<b>Tahun</b>				
		<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>	<b>2040</b>	<b>2045</b>
Jumlah Penduduk	214.979	229.670	247.120	263.320	280.610	297.270
Proyeksi Jumlah PAUD	215	220	223	225	227	230
Proyeksi Jumlah SD	206	209	210	212	215	216
Proyeksi Jumlah SMP	91	92	93	93	95	95
Proyeksi Jumlah SMA/SMK	58	58	59	60	60	61

*Sumber: Hasil analisis, 2024*

Sebagaimana Tabel di atas menampilkan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat untuk periode 2025 hingga 2045. Proyeksi ini mencakup jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, serta SMA/SMK, dengan perhitungan yang dilakukan berdasarkan tren pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan fasilitas pendidikan yang diharapkan. Pada jenjang PAUD, terjadi peningkatan kebutuhan yang cukup stabil dari 215 unit pada tahun 2023 menjadi 230 unit pada tahun 2045. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan jumlah anak usia dini di wilayah tersebut, yang membutuhkan tambahan fasilitas untuk mengakomodasi lonjakan anak-anak yang memasuki usia sekolah PAUD.

Selanjutnya, untuk jenjang SD, jumlah sekolah yang dibutuhkan diproyeksikan meningkat dari 206 unit pada tahun 2023 menjadi 216 unit pada tahun 2045. Begitu juga dengan SMP, yang diperkirakan naik dari 91 unit menjadi 95 unit pada periode yang sama. Kebutuhan fasilitas pendidikan tingkat SMA/SMK juga mengalami sedikit peningkatan, dari 58 unit di tahun 2023 menjadi 61 unit pada tahun 2045. Peningkatan yang terukur ini mencerminkan



pertumbuhan populasi usia sekolah yang stabil, dan kebutuhan yang wajar untuk menjaga mutu serta akses pendidikan di seluruh jenjang.

Peningkatan jumlah sarana pendidikan sebagaimana di atas, telah melampaui jumlah sesuai SNI. Hal ini disebabkan oleh faktor geografis yang unik. Kabupaten ini memiliki wilayah yang sangat luas, terdiri dari kepulauan dan pegunungan yang sulit diakses, sehingga memerlukan lebih banyak sekolah untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak. Dengan kondisi geografis yang menantang, distribusi sekolah harus diatur sedemikian rupa agar setiap wilayah, terutama daerah terpencil, tetap terlayani dengan baik.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan menambah ruang kelas baru di sekolah-sekolah yang sudah ada, khususnya di area yang tidak memungkinkan untuk membangun sekolah baru karena keterbatasan lahan atau infrastruktur. Dengan penambahan ruang kelas, kapasitas siswa dapat ditingkatkan tanpa perlu membangun banyak sekolah baru, sekaligus memastikan bahwa kualitas dan akses pendidikan tetap terjaga di seluruh kabupaten.

## **2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah**

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Barat, konsep membangun daerah dalam meningkatkan potensi wilayah dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

### **A. Pengembangan Gugus Pulau**

Potensi pengembangan wilayah dengan pendekatan gugus pulau. Gugus pulau adalah kumpulan pulau yang secara geografis saling berdekatan dan berkaitan erat. Kumpulan pulau tersebut saling tergantung dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai aspek. Sehingga dapat dikatakan jika pulau dalam gugusan pulau memiliki beberapa kesaamaan.. Pada intinya, ciri utama dari gugus pulau ialah adanya keterikatan dalam berbagai aspek, seperti sosial dan budaya, ekonomi, serta ekosistemnya.

Untuk mendukung interaksi antar pusat pelayanan dan gugus-gugus pulau di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat serta interaksinya secara eksternal dengan wilayah sekitarnya tentunya harus didukung dengan



keterkaitan atau konektivitas (connectivity) antar wilayah pulau yang efisien dalam satu kesatuan tata ruang pulau dan laut sehingga membentuk sinergi antar pemanfaatan ruang darat dan ruang laut.

### **B. Pengembangan Interaksi Keseluruhan Bagian Wilayah**

Konsep pengembangan kawasan ini dapat disebut mirip dengan perputaran baling-baling, dimana kestabilan terjadi apabila dari setiap simpul dapat mengeluarkan potensi pertumbuhannya, yang kemudian baling-baling bergerak berputar seimbang dengan kekuatan simpul utama. Simpul utama adalah Kota Piru dan Kota Kairatu yang akan menyebarluaskan koneksi terhadap sub-sub pusat pertumbuhan pada bagian Utara, Timur dan Barat. Simpul Piru akan menyebarluaskan koneksi pada Kairatu, Pelita Jaya, Waesala, Luhu, Morekau dan Taniwel. Sedangkan Kota Kairatu akan menyebarluaskan koneksi menuju Piru, Taniwel, Tomalehu sampai dengan Honitetu.

Berdasarkan analisis orde yang setingkat maka terdapat 3 (tiga) Simpul utama yaitu Piru, Kairatu dan Luhu. Selain itu untuk menyeimbangkan perkembangan ke wilayah hinterland terdapat 3 (tiga) potensi sub simpul pengembangan yaitu Waesala, Taniwel dan Amalatu-Tomalehu.

### **C. Pengembangan Wilayah Pesisir**

Secara alamiah kawasan pesisir pada dasarnya bukan semata-mata merupakan kawasan peralihan ekosistem daratan dan laut, namun sekaligus titik temu antara aktifitas ekonomi masyarakat berbasis daratan dan laut. Kawasan pesisir merupakan tempat pendaratan ikan serta berbagai sumberdaya laut maupun aliran sumberdaya lainnya untuk kemudian dialirkan ke daratan. Dari arah daratan mengalir sumberdaya untuk disalurkan via lautan (dan juga udara) melalui kawasan-kawasan pesisir. Akibatnya, kawasan pesisir secara global telah cenderung menjadi konsentrasi aktifitas perekonomian dan peradaban manusia. Kawasan pesisir dalam kenyataannya menampung sekitar 60% populasi dunia. Secara historis, kawasan pesisir telah menjadi hamparan konsentrasi berbagai kota-kota pelabuhan dan pusat-pusat pertumbuhan global.



Di dalam struktur pembangunan daerah, suatu kawasan pesisir dinilai strategis secara ekonomi jika memiliki potensi sentrifugal di dalam menggerakkan perekonomian suatu daerah. Dalam pengertian, dinamika perkembangannya sangat menentukan pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya, menentukan pertumbuhan wilayah-wilayah di sekelilingnya secara lintas pelaku (tidak sebatas kehidupan ekonomi kelompok masyarakat tertentu).

#### **D. Pengembangan Berbasis Mitigasi**

Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kawasan – kawasan rawan bencana yang menunjukkan adanya potensi bencana yang perlu ditangani secara serius. Lokasi yang telah teridentifikasi tersebut memerlukan perhatian dan penanganan dalam memperbaiki dan mengantisipasi kemungkinan bencana yang akan ditimbulkan. Mitigasi bencana yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (PP 21 Tahun 2008). Pendekatan mitigasi terbagi menjadi :

- Mitigasi Non Struktural;
- Mitigasi Struktural;
- Mitigasi Kultural.



## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### 3.1 Permasalahan

#### 3.1.1 Sosial dan SDM

Permasalahan pembangunan jangka panjang pada rumpun sosial dan Sumber Daya Manusia yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah terkait Sumber Daya Manusia yang produktif dan berdaya saing serta perlindungan sosial yang adaptif. Terdapat beberapa faktor utama yang berpengaruh signifikan terhadap pembentukan SDM di Kabupaten Seram Bagian Barat antara lain berkaitan dengan pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar serta pembangunan dan perlindungan sosial yang adaptif. Secara lebih detail, permasalahan pada rumpun sosial dan SDM adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. 1 Permasalahan SDM dan Sosial di Kabupaten Seram Bagian Barat**

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1	<i>Pemenuhan akses dan kualitas pendidikan belum optimal</i>	<i>Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai belum merata</i> <i>Belum optimalnya kompetensi dan kualifikasi guru</i> <i>Masih tingginya angka putus sekolah</i> <i>Belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan</i> <i>Belum optimalnya penguatan pendidikan karakter pada anak</i> <i>Belum optimalnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak</i>
2	<i>Belum meratanya pelayanan kesehatan yang berkualitas</i>	<i>Akses layanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata</i> <i>Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) masih perlu ditingkatkan baik secara data maupun kondisi di lapangan</i> <i>Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) perlu ditekan ke angka yang paling minimal</i> <i>Penanganan prevalensi stunting perlu ditingkatkan</i>



No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
		<i>Belum optimalnya gerakan PHBS</i>
3	<i>Belum optimalnya perlindungan Sosial yang adaptif</i>	<i>Jumlah tenaga medis dan non medis masih belum memenuhi standar</i>
		<i>Masih tingginya pernikahan dini/anak</i>
		<i>Masih tingginya angka PPKS khususnya ODGJ, orang terlantar, lansia dan anak yang bermasalah dengan hukum, pengemis</i>
		<i>Belum memiliki layanan rumah singgah dan penampungan yang representatif</i>
		<i>Pemenuhan ruang dan hak anak masih belum optimal</i>
		<i>Pemberdayaan dan bantuan sosial masih belum tepat sasaran</i>

### 3.1.2 Ekonomi

Transformasi ekonomi berkelanjutan merupakan masalah pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Seram Bagian Barat. Transformasi ekonomi adalah titik kunci untuk meningkatkan produktivitas dengan mengubah struktur ekonomi dari *lower productivity* ke *higher productivity* atau dengan meningkatkan produktivitas di dalam sebuah sektor ekonomi (Bappenas, 2021). Transformasi ekonomi memiliki lima pilar, yaitu 1) pembangunan infrastruktur, 2) penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi, 3) minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, 4) efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 5) konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2024). Berikut adalah permasalahan pembangunan ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Barat.

**Tabel 3. 2. Permasalahan Ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Barat**

No	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1.	<i>Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan</i>	<i>Masih tingginya angka kemiskinan</i>
		<i>Masih tingginya angka pengangguran</i>
		<i>Pemerataan pendapatan belum optimal</i>

No	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
2.	<i>Belum optimalnya implementasi transformasi ekonomi berkelanjutan</i>	<i>Investasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi</i>
		<i>Pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan</i>
		<i>Pasar tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia</i>
		<i>Pembangunan infrastruktur</i>
3.	<i>Pengelolaan potensi daerah belum optimal</i>	<i>Rendahnya investasi daerah</i>
		<i>Hilirisasi sektor unggulan dan potensial yang bernilai tambah belum optimal</i>

### 3.1.3 Lingkungan

Aspek lingkungan memiliki urgensi yang tinggi dalam menopang pembangunan suatu wilayah. Penekanan pada penjagaan terhadap kelestarian alam dan resiliensi yang tinggi terhadap bencana, menjadi dua komponen yang sangat dibutuhkan untuk mendukung implementasi pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki nilai IKLH yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, indeks risiko bencana, meskipun memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan tahun – tahun sebelumnya, namun masih dalam kategori sedang. Berbagai kondisi tersebut, menunjukkan bahwa masih perlu adanya perbaikan dalam mengelola lingkungan, sumber daya alam dan penanganan kebencanaan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Berikut ini disajikan masalah pembangunan pada aspek lingkungan dan juga penyebabnya.

**Tabel Tabel 3. 3 Permasalahan lingkungan di Kabupaten Seram Bagian Barat**

No	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1	<i>Belum optimalnya implementasi ketahanan ekologi dan resiliensi perubahan iklim</i>	<i>Belum optimalnya perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan optimal</i>
		<i>Perlindungan dan pengelolaan sumber daya air belum optimal</i>
		<i>Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah</i>
		<i>Pengendalian alih fungsi lahan yang belum</i>

No	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
		<i>optimal</i>
2	<i>Belum optimalnya penyelenggaraan penganggulangan bencana dan keselamatan</i>	<p><i>Penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan pengaman bencana yang belum optimal</i></p> <p><i>Belum meratanya cakupan pelayanan penganggulangan bencana dan kebakaran</i></p> <p><i>Belum meratanya penyebaran informasi dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait kebencanaan</i></p>

### 3.1.4 Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi tantangan Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam dokumen RPJPN 2025-2045 disebutkan bahwa kesenjangan antar wilayah di Maluku disebabkan karena besarnya perbedaan distribusi ekonomi antar provinsi dan antar kabupaten/kota akibat sulitnya akses antar satu pulau dengan pulau lainnya.

**Tabel Tabel 3. 4 Permasalahan Infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Barat**

No	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1	<i>Rendahnya kualitas infrastruktur dasar permukiman</i>	<p><i>Jumlah backlog dan rumah tidak layak huni yang belum banyak tertangani</i></p> <p><i>Adanya kawasan permukiman kumuh</i></p> <p><i>Belum meratanya layanan air minum dan sanitasi masyarakat</i></p>
2.	<i>Belum terwujudnya konektivitas antar kawasan dan pusat pertumbuhan</i>	<p><i>Kuantitas dan kualitas jaringan jalan yang masih rendah</i></p> <p><i>Belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi</i></p> <p><i>Kurangnya fasilitas transportasi umum penghubung pusat-pusat pertumbuhan</i></p>
3.	<i>Belum optimalnya pemanfaatan sumber air baku</i>	<p><i>Banyaknya sumber air tanah yang belum dimanfaatkan</i></p> <p><i>Luasan lahan pertanian yang belum terfasilitasi jaringan irigasi</i></p>
4.	<i>Belum optimalnya penyelenggaraan penataan &amp; pemanfaatan ruang</i>	<p><i>Tingginya potensi alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan</i></p> <p><i>Belum optimalnya evaluasi dan pengawasan pemanfaatan ruang</i></p>



### 3.1.5 Tata kelola

Permasalahan pembangunan daerah di bidang tata kelola pemerintahan berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Seram Bagian Barat, yakni predikat C. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi implementasi RB belum berjalan dengan baik, dan masih perlu adanya perbaikan. Dengan demikian, permasalahan pembangunan di bidang tata kelola pemerintahan, yaitu belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Adapun penyebabnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. 5 Permasalahan Tata Kelola di Kabupaten Seram Bagian Barat**

No	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya akses terhadap pelayanan publik
		Penyelenggaraan pemerintahan daerah kurang inovatif
		Belum optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja

## 3.2 Isu Strategis Daerah

### 3.2.1 Isu Global

Tantangan global membawa perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau bisa disebut megatren global. Perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat masif karena adanya kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Terlebih lagi saat ini Maluku telah membangun kemitraan dengan berbagai negara, khususnya kerjasama di bidang ekonomi, dimana posisi Kabupaten Seram Bagian Barat saat ini sebagai penopang bagi 2 Kabupaten yakni Seram bagian Barat dan Maluku Tengah. Oleh karena itu, telaah isu strategis global penting untuk dilakukan guna mengetahui potensi dan risiko yang akan dihadapi oleh Kabupaten Seram Bagian Barat di ranah global.

**Tabel 3. 6 Megatren Global**

No	Isu Internasional	Tantangan
1	Perkembangan demografi global	Penyesuaian terhadap tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan pangan dan lahan
2	Dinamika geopolitik dan geoekonomi global	Zona maritim memberikan dampak pada penciptaan persaingan antarnegara
3	Perkembangan teknologi	Kemampuan adaptasi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara optimal dibarengi dengan meminimalkan risiko akibat disrupsi teknologi
4	Peningkatan urbanisasi dunia	Peningkatan jumlah penduduk perkotaan yang mengakibatkan perkembangan kawasan sekitar yang harus dikelola dengan baik
5	Perubahan konstelasi perdagangan global	Perdagangan internasional sangat terpengaruh dengan cepatnya perubahan teknologi dan digital
6	Pergeseran tata kelola keuangan global	Pendapatan negara akan dipengaruhi dengan perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk yang berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan
7	Pertumbuhan kelas menengah ( <i>middle class</i> )	Proporsi kelas menengah yang terus mengalami peningkatan berdampak pada penciptaan jenis lapangan pekerjaan baru termasuk kebutuhan gaya hidup baru
8	Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam (SDA)	Peningkatan kebutuhan SDA (air, pangan, energi) mendorong upaya konservasi SDA, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi
9	Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati	Perlu adanya perubahan perilaku secara signifikan dan berkelanjutan untuk menghadapi dampak negatif krisis global pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan
10	Pemanfaatan luar angkasa	Peningkatan kapasitas negara untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus untuk mengembangkan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM

Sumber: RPJPN 2025-2045

Sepuluh megatren di atas menunjukkan adanya potensi dan risiko yang mungkin terjadi hingga tahun 2045. Perkembangan jumlah penduduk yang terus bertambah dapat memunculkan risiko kelangkaan sumber daya, persaingan perebutan sumber daya alam semakin meningkat, sejumlah pekerjaan mulai tergantikan oleh teknologi yang semakin canggih, perubahan iklim yang mengancam keberlangsungan hidup, dan risiko lainnya membayangi perkembangan ke depan. Megatren global juga memiliki potensi atau peluang yang jika dapat dimanfaatkan secara optimal dapat membawa kesejahteraan. Perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas, peningkatan peran negara-negara berkembang dalam perekonomian global, terciptanya peluang ekonomi baru, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menciptakan sumber daya terbarukan, bahkan eksplorasi antariksa yang semakin meningkat dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Megatren global menunjukkan bahwa perubahan kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik di masa mendatang perlu diantisipasi seoptimal mungkin untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan.

### **3.2.2 Isu Nasional**

Rencana pembangunan jangka panjang sejak tahun 2025 hingga 2045 dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan tujuan mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Istilah Negara Nusantara menggambarkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, keamanan nasional, serta budaya dan peradaban maritim yang menjadi poros penting dalam hubungan maritim internasional. Ada sebanyak 14 isu strategis nasional yang harus dihadapi dan diselesaikan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 tersebut. Berikut ini penjelasan mengenai ke-14 isu strategis nasional tersebut.

1. Tingkat produktivitas yang terus menurun di tengah persaingan global yang semakin intensif

Selama periode tahun 2005-2019, tingkat produktivitas Indonesia yang diukur dengan menggunakan indikator Total Factor Productivity (TFP) mengalami penurunan sebesar 0,66 poin. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia,



kurangnya produktivitas sektor ekonomi, kurangnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, serta ketidakoptimalan sistem kelembagaan termasuk penghargaan dan hukuman, serta kelemahan dalam kepastian hukum. Dampak dari rendahnya produktivitas sumber daya manusia ini kemudian menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia awalnya mencapai 5,7 persen pada periode tahun 2005-2010, namun menurun menjadi hanya 4 persen pada periode tahun 2015-2022. Selain itu, pertumbuhan ekonomi potensial juga menurun di bawah 5 persen akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, isu ini menjadi sangat penting jika ingin mencapai target Indonesia Emas 2045.

## 2. Keterbatasan dalam penguasaan IPTEKIN

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) memiliki peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. IPTEKIN berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan menghasilkan produk berkualitas serta berteknologi tinggi. Namun, perkembangan IPTEKIN di Indonesia mengalami kendala yang berasal dari dua faktor utama, yaitu kurangnya komitmen pemerintah dalam alokasi anggaran serta keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga manusia yang tersedia. Indonesia hanya mengalokasikan 0,28 persen dari PDB untuk IPTEKIN, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia yang mengalokasikan 26,92 persen dan Korea Selatan yang mengalokasikan 5,82 persen. Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah peneliti riset dan inovasi yang hanya mencapai 388 jiwa per satu juta penduduk, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura yang memiliki 7.287 jiwa. Kelemahan dalam ekosistem riset dan inovasi di Indonesia juga berkontribusi terhadap rendahnya IPTEKIN dan riset. Salah satunya adalah kurangnya kerja sama antara lembaga riset dan industri, baik dalam skala domestik maupun internasional. Kurangnya kerja sama ini sebagian besar disebabkan oleh tingkat kesadaran ilmiah yang masih rendah di masyarakat, yang pada akhirnya juga mengurangi minat untuk melakukan penelitian.

## 3. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah

Deindustrialisasi adalah kondisi ketika sektor industri tidak lagi menjadi pendorong utama perekonomian negara karena kontribusinya

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terus melemah. Beberapa faktor yang menyebabkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB melemah termasuk adanya "dutch diseases" di sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, keterbatasan dalam adopsi teknologi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan ekosistem industri di luar Jawa, serta biaya ekonomi yang tinggi akibat logistik dan suku bunga yang tinggi. Masalah yang sama juga terjadi pada sektor pertanian, di mana produktivitasnya terus menurun dari sebelumnya Rp 41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 menjadi hanya 22,9 juta pada tahun 2022. Penurunan produktivitas pertanian juga berdampak pada kontribusi sektor pertanian terhadap PDB yang mengalami penurunan sebesar 9,07 persen selama periode 2005 hingga 2022.

4. Pemanfaatan potensi pariwisata masih belum mencapai tingkat optimal

Meskipun ada banyak potensi pariwisata yang tersebar di seluruh Indonesia, tetapi daya tarik wisata belum dimanfaatkan dengan optimal. Hal ini terlihat dari keterbatasan dalam atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta rendahnya kapasitas pengelolaan dan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan. Selain itu, perkembangan digital dan teknologi juga memiliki dampak pada pemanfaatan potensi pariwisata, terutama dalam hal promosi daya tarik wisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempercepat pemanfaatan teknologi dalam sektor pariwisata. Industri kreatif juga menghadapi tantangan serupa, dengan kebutuhan akan transformasi digital, komersialisasi, dan akses pasar internasional yang lebih luas.

5. Ekonomi sektor biru masih belum mencapai tingkat optimal

Sebagai negara yang memiliki kenyataan geografis berupa kepulauan yang luas, Indonesia memiliki banyak peluang dalam sektor kelautan. Salah satu potensi yang dapat dimaksimalkan adalah ekonomi biru, yang dapat memberikan manfaat tambahan, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan bagi rakyat Indonesia. Istilah "ekonomi biru" digunakan untuk mengacu pada pandangan Bank Dunia yang mendefinisikan ekonomi biru sebagai penggunaan sumber daya laut dengan tetap menjaga lingkungan, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, mata pencarian, serta pelestarian ekosistem laut. Meskipun Indonesia memiliki potensi melimpah, namun sampai saat ini masihseram ba

belum dapat mengoptimalkan kekayaan yang dimilikinya, seperti yang tercermin pada kontribusi sektor kelautan terhadap PDB yang masih sebesar 7,60 persen. Beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi sektor kelautan adalah manajemen wilayah pengelolaan perikanan dan pengembangan budidaya perikanan yang belum optimal, terbatasnya industri yang bervariasi dalam memanfaatkan sumber daya laut, serta minimnya penelitian dan teknologi terkait kelautan. Selain itu, tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah masalah pencemaran plastik di laut, tingginya aktivitas illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF), serta tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut yang belum optimal.

6. Keterbatasan kontribusi sektor UMKM dan koperasi terhadap peningkatan nilai tambah dalam perekonomian

UMKM dan koperasi di Indonesia telah memberikan sumbangan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, dengan tingkat mencapai 99,99 persen untuk UMKM dan 96,92 persen untuk koperasi pada tahun 2019. Meskipun demikian, kontribusi tersebut tidak sejalan dengan kontribusi UMKM dan koperasi terhadap PDB. Pada tahun 2019, UMKM hanya menyumbang 60,51 persen terhadap PDB, sementara koperasi hanya menyumbang 1,07 persen. Hal ini dikarenakan banyak UMKM dan koperasi yang mempekerjakan tenaga kerja yang kurang terampil, beroperasi di sektor dengan nilai tambah rendah, dan memiliki keterbatasan dalam penerapan teknologi, inovasi, dan investasi dalam pengembangan bisnis. Selain itu, kapasitas pengelolaan yang terbatas, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan jumlah koperasi yang terbatas dalam sektor riil juga menjadi faktor pembatas. Meskipun perekonomian Indonesia secara keseluruhan cukup solid, tetapi masih dibutuhkan perencanaan kebijakan fiskal dan moneter yang berorientasi pada pertumbuhan. Keterbatasan ruang fiskal dan kualitas belanja yang belum optimal membuat peranan fiskal sebagai stimulus pembangunan terbatas. Sementara itu, kebijakan moneter juga menghadapi tantangan harga yang tidak stabil dan volatilitas harga komoditas di pasar global, yang berdampak pada risiko inflasi di Indonesia.

7. Kekurangan dalam pembangunan infrastruktur dan kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital

Kapasitas dan kapabilitas digital di Indonesia masih terbatas dalam hal penawaran, permintaan, dan ekosistem digital. Dalam hal penawaran, infrastruktur yang belum memadai, seperti kapasitas data center yang terbatas dan kurangnya penerapan kebijakan TIK, menjadi kendala utama. Di sisi permintaan, literasi digital yang rendah dan penggunaan teknologi yang tidak produktif dari luar negeri menjadi masalah yang perlu diatasi. Meskipun penetrasi jaringan yang tinggi, penggunaannya saat ini masih didominasi oleh hiburan daripada kegiatan produktif. Selain itu, kondisi ekosistem yang tidak mendukung, keterbatasan dalam riset dan inovasi, serta masalah keamanan siber yang belum memadai juga mempengaruhi kapasitas dan kapabilitas digital di Indonesia.

8. Pengembangan yang terjadi belum mengadopsi metode pembangunan berkelanjutan

Dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045, perlu diperhatikan keberlanjutan dalam proses pembangunan yang sejalan dengan aspek yang telah dicanangkan sebelumnya. Pembangunan di Indonesia selama ini lebih fokus pada dampak jangka pendek, sehingga mengabaikan aspek keberlanjutan. Hal ini tercermin dari tingginya penggunaan energi fosil sebagai sumber daya energi nasional, yang mencapai 87,1 persen. Meskipun ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil mengalami penurunan dan penggunaan Energi Baru Terbarukan meningkat menjadi 8,06 persen dalam periode 2005-2022, namun masih belum memenuhi standar pembangunan berkelanjutan karena masih terlalu bergantung pada energi tak terbarukan. Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang tinggi juga mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam yang merugikan, seperti pembukaan lahan yang menyebabkan deforestasi dan penurunan keanekaragaman hayati. Eksploitasi sumber daya alam ini dapat terus berlanjut karena belum ada sistem penghargaan dan hukuman yang efektif dari pemerintah terhadap para pelaku ekonomi yang melanggar prinsip ekonomi hijau. Padahal, ketahanan ekonomi hijau yang berbasis ekologi dapat menjadi kunci dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan,

termasuk pemanfaatan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

9. Integrasi ekonomi domestik yang belum mencapai tingkat optimal, mengakibatkan keterkaitan ekonomi antarwilayah masih terbatas

Penerapan strategi ekonomi domestik yang terintegrasi merupakan bagian dari upaya Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini didasari oleh kurangnya integrasi domestik di Indonesia yang disebabkan oleh fokus pertumbuhan yang lebih tinggi di Pulau Jawa. Untuk mewujudkan integrasi tersebut, sistem logistik yang efisien menjadi elemen kunci. Namun, implementasi sistem logistik di Indonesia menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan konektivitas infrastruktur antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya, berbagai regulasi yang mempersulit proses, serta perbedaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di luar Pulau Jawa yang menyebabkan tingginya biaya logistik antar wilayah. Selain itu, integrasi domestik juga penting dalam konteks perkotaan. Pertumbuhan ekonomi perkotaan terbatas karena kurangnya hubungan yang baik antara kota sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya, yang mengakibatkan pembangunan hanya terfokus pada beberapa titik dan menciptakan ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan.

10. Penurunan kualitas sumber daya manusia yang semakin mengkhawatirkan

Diperlukan optimalisasi bonus demografi dalam mempersiapkan Indonesia menjelang Indonesia Emas 2045. Namun, antara tahun 2005 hingga 2022, terjadi penurunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pembangunan sektor kesehatan menghadapi berbagai tantangan seperti transisi demografi yang berdampak pada peningkatan mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku yang tidak sehat. Transisi demografi juga berpengaruh pada perubahan pola hidup dan tingkat kesehatan, termasuk munculnya penyakit baru di masyarakat. Saat ini, masih terjadi ketidakmerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, ketimpangan dalam akses pangan, lingkungan sehat, fasilitas kesehatan, dan penanganan tenaga kesehatan. Selain itu, sektor kesehatan juga belum sepenuhnya mengadopsi perkembangan teknologi dan belum optimal dalam inovasi pembiayaan kesehatan.

Salah satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap sumber daya manusia adalah pendidikan, terutama dalam upaya memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Dalam usaha meningkatkan bonus demografi melalui sektor pendidikan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti ketidakmerataan pelayanan pendidikan, rendahnya mutu pendidikan, rendahnya produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global, serta tidak sesuaiannya kualifikasi pendidikan dengan tuntutan pasar kerja. Ketidakmerataan pelayanan pendidikan juga disebabkan oleh disparitas partisipasi dalam pendidikan dan tingginya kondisi sosial-ekonomi. Sementara itu, mutu pendidikan dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas pendidikan dan ketidakteraturan penyebaran tenaga pengajar. Di tingkat yang lebih tinggi, implementasi nilai-nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik kehidupan juga belum sepenuhnya tercapai, padahal hal tersebut dapat menjadi dasar pembangunan masyarakat melalui pendidikan keluarga. Ketidaksempurnaan ekosistem pembelajaran yang diakibatkan oleh kondisi tersebut secara tidak langsung berdampak negatif terhadap kualitas sumber daya manusia yang berpartisipasi di sektor pendidikan, sehingga mereka tidak mampu memenuhi permintaan pasar kerja.

Perhatian terhadap perlindungan sosial juga merupakan hal yang sangat penting dalam konteks sumber daya manusia. Perlindungan sosial menjadi isu yang krusial karena proyeksi penduduk menunjukkan bahwa struktur penduduk pada periode 2025-2045 akan mengalami perubahan, yang ditandai oleh meningkatnya rasio ketergantungan nasional. Karenanya, penting untuk mengantisipasi isu-isu terkait infrastruktur dan kebutuhan kelompok lansia agar tidak menjadi beban dalam proses pembangunan di masa mendatang. Pengelolaan yang baik merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengelolaan tersebut dapat melalui implementasi kerangka kerja yang efektif dan akuntabel dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

11. Proses operasional dan pengelolaan administrasi dalam bisnis dan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak fleksibel

Dalam hal tata kelola pemerintahan, terdapat beberapa aspek yang belum dioptimalkan hingga saat ini. Salah satunya adalah keberadaan regulasi yang berlebihan dengan kualitas rendah, yang menyebabkan tumpang tindihnya regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, lembaga-lembaga publik masih memiliki struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif, yang mengakibatkan adanya ego sektoral di dalam kerangka pemerintahan. Proses bisnis dalam tata kelola juga belum mampu mengikuti perubahan dengan cepat, sehingga dianggap kurang adaptif dan cenderung terfragmentasi, serta menyebabkan inefisiensi. Pada skala yang lebih tinggi, manajemen talenta juga menghadapi masalah dalam distribusinya di berbagai kementerian, lembaga, dan daerah, yang berdampak pada rendahnya kinerja dan kompetensi pegawai negeri sipil, budaya dan etos kerja yang rendah, serta adanya mentalitas silo. Masalah manajemen talenta semakin rumit karena adanya pengaruh politik terhadap pegawai negeri sipil. Meskipun pemerintah diharapkan untuk terbuka dalam proses kebijakan, prinsip keterbukaan tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Masalah tata kelola yang ada di internal pemerintah secara tidak langsung berdampak pada output yang dihasilkan, seperti tidak meratanya kualitas layanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, transformasi digital dalam pemerintahan juga menghadapi hambatan mendasar, seperti infrastruktur yang kurang memadai. Rendahnya output yang diterima oleh masyarakat kemudian menurunkan partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi.

12. Penegakan hukum yang adil dan kepastian hukum masih belum sepenuhnya tercapai oleh sistem hukum

Sistem hukum yang diterapkan di Indonesia belum sepenuhnya mampu mencapai ketetapan hukum dengan menjaga keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demikian pula, beberapa persoalan utama di sektor hukum yang harus diperbaiki guna meraih visi Indonesia Emas 2045 meliputi belum optimalnya pemulihan aset kasus pidana, potensi pelanggaran HAM

yang masih tinggi, serta kelemahan pengawasan dalam institusi penegak hukum baik secara internal maupun eksternal.

13. Sistem demokrasi saat ini masih terbatas pada aspek-aspek prosedural seperti mekanisme pemilihan dan hubungan formal antar lembaga

Proses demokratisasi merujuk pada upaya sistem negara untuk mencapai bentuk demokrasi yang lebih baik. Meskipun Indonesia dianggap sebagai negara yang menganut demokrasi, namun masih terdapat keterbatasan dalam implementasinya. Misalnya, demokrasi politik di Indonesia hanya sebatas prosedural seperti pemilihan dan hubungan formal dengan institusi. Akibatnya, kebijakan politik uang, rendahnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana publik, ketidakoptimalan sistem pemilu dan kebebasan pers, serta kurangnya kebebasan sipil semakin meningkatkan perilaku diskriminatif dan intoleransi. Semua ini secara tidak langsung membuat partisipasi masyarakat dalam demokrasi menurun.

14. Perbedaan yang signifikan antara daerah Jawa dan daerah di luar Jawa

Dampak dari pelaksanaan desentralisasi sejak tahun 1999 telah terlihat, namun disertai dengan disparitas antara pusat perkembangan di Jawa dan kurangnya perhatian pada luar Jawa terkhusus. Disparitas ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakmerataan sumber daya manusia yang berkualitas, kekurangan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, keterbatasan anggaran pemerintah daerah, dan penggunaan anggaran yang belum optimal. Masalah kesenjangan juga muncul dalam hal pertanahan, termasuk keterbatasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), produktivitas perkotaan yang rendah karena desain kota yang tidak optimal, dan risiko bencana yang tinggi serta tata kelola kebencanaan yang lemah. Meskipun pembangunan infrastruktur di Indonesia telah meningkat secara eksplisit, tetapi masih di bawah kebutuhan yang ada, terutama dalam hal konektivitas domestik dan global di sektor maritim dan penerbangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta kurangnya konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional. Permasalahan disparitas antara Jawa dan luar Jawa membutuhkan perhatian khusus, terutama karena potensi kerentanan

keamanan nasional yang muncul akibat kompleksitas ancaman dan meningkatnya isu geopolitik di daerah perbatasan.

### **3.2.3 Isu Regional**

Isu strategis regional merupakan isu kewilayahan atau kedaerahan yang harus diperhatikan dalam perumusan isu strategis Kabupaten Seram Bagian Barat untuk 20 tahun ke depan. Berbagai permasalahan maupun potensi regional memiliki pengaruh terhadap daerah-daerah yang ada di dalamnya, baik karena kesamaan kondisi daerah, sosial budaya, maupun ekonomi. Isu regional terkait pada konteks kedaerahan dalam hal ini Wilayah Maluku yang disesuaikan kembali dengan isu di Provinsi Maluku. Isu dan tantangan pembangunan di wilayah Maluku secara lebih rinci dirumuskan sebagai berikut.

#### **1. Penguatan daya saing SDM Maluku untuk bersaing di era modern**

Upaya penguatan sumber daya manusia (SDM) di Maluku perlu dilakukan karena terdapat kesenjangan IPM antar provinsi dan kabupaten/kota. IPM di Provinsi Maluku Timur secara angka memang paling tinggi dibandingkan provinsi lain di Maluku, namun hal itu tidak menutup adanya tantangan pembangunan SDM yang lebih berkualitas. Peningkatan IPM sebagai indikator kualitas SDM di Maluku memiliki beberapa kendala seperti belum optimalnya jangkauan dan mutu pelayanan dasar pendidikan serta kesehatan. Beberapa isu yang menjadi perhatian utama di Pulau Maluku adalah prevalensi stunting yang masih berada di atas capaian nasional dan tingginya insidensi malaria di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai mitra IKN. Kondisi geografis yang didominasi oleh hutan dan rawa menjadi salah satu penyebab utama tingginya kasus malaria di Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain masalah kesehatan, peningkatan daya saing SDM juga terkait dengan rendahnya literasi digital, kualitas dan kuantitas riset, serta pengembangan inovasi teknologi berkelanjutan.

#### **2. Konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah pulau Maluku**

Pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang merata dan terintegrasi menjadi isu krusial di wilayah Maluku. Kondisi bandara simpul dan bandara *feeder* juga belum dikembangkan secara optimal, sehingga menyebabkan terbatasnya konektivitas di Maluku. Pada sisi lain, infrastruktur

jalan daerah juga menyumbang permasalahan keterbatasan aksesibilitas di Maluku, hal itu dapat dilihat dari belum tuntasnya pembangunan jalan Trans Maluku.

Beberapa infrastruktur yang mendukung konektivitas dan aksesibilitas di Maluku juga belum dikembangkan, seperti moda transportasi kereta api yang masih dalam tahap perencanaan dan transportasi sungai yang selama ini masih terbatas pada angkutan tambang serta komoditas lain, dan hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk moda transportasi penduduk. Selain itu, pengembangan transportasi perkotaan juga belum dikembangkan sebagai upaya antisipasi peningkatan urbanisasi dan motorisasi di kota-kota besar, terutama yang berdekatan dengan Provinsi Maluku.

Infrastruktur pada bidang kelistrikan juga masih didominasi oleh energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan yang relatif rendah. Sistem ketenagalistrikan di Wilayah Maluku juga belum terkoneksi secara menyeluruh, sedangkan pembangunan Provinsi Maluku ke depan membutuhkan penyediaan listrik yang terbarukan, cerdas, dan indah. Selain itu, infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi juga belum merata dan hanya cenderung menjangkau pusat perekonomian. Data menunjukkan bahwa jangkauan jaringan seluler 4G masih berada di bawah nasional, yakni selisih 1,50 persen.

### 3. Pembagian peran Wilayah Maluku sebagai mitra IKN

Penetapan IKN di Maluku menuntut adanya pembagian peran wilayah sebagai mitra IKN, terutama ketika adanya percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menunjang pengembangan *superhub* ekonomi IKN. Wilayah Maluku memiliki potensi yang beragam dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan potensi didasarkan pada peningkatan daya saing sektor yang sudah berkembang yang berorientasi pada prinsip berkelanjutan.

### 4. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berskala nasional di Provinsi Maluku

Pembangunan IKN berpotensi mendorong potensi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berskala nasional di Maluku. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi juga perlu menyesuaikan



dengan pembangunan IKN yang diupayakan menjadi kota cerdas, hijau, dan berkelanjutan. Hal itu tentu memerlukan peningkatan berbagai aspek penunjang secara holistik dan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, kendala yang selama ini dialami di Wilayah Maluku perlu ditangani terlebih dahulu, seperti tingginya dominasi peran sumber daya alam, belum optimalnya upaya percepatan transformasi ekonomi hijau dan pengembangan energi baru terbarukan, adanya kesenjangan antar wilayah akibat perbedaan distribusi ekonomi antar provinsi dan kabupaten/kota, serta tingginya inflasi yang menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi di Wilayah Maluku.

#### 5. Penguatan peran Provinsi Maluku sebagai paru-paru dunia

Tantangan yang dihadapi oleh Maluku kedepannya adalah terkait peningkatan konservasi dan rehabilitas DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi. Isu degradasi lingkungan menjadi salah satu permasalahan yang melatarbelakangi hal tersebut. Degradasi lingkungan secara umum disebabkan oleh konsensi lahan bagi industri ekstraktif yang tidak terkendali, ditambah belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan pasca kegiatan ekstraktif. Ketahanan bencana di Wilayah Maluku juga perlu ditingkatkan, yakni melalui perbaikan kerangka kelembagaan sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana, terutama bencana kebakaran hutan dan hidrometeorologi.

#### **3.2.4 Isu Pembangunan Berkelanjutan (KLHS)**

Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai upaya sadar dan terencana dalam memadukan aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelembagaan dalam strategi pembangunan. Pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pemanfaatan sumberdaya secara adil dan bijaksana, dengan merawat dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, supaya kebutuhan sumberdaya di masa mendatang tetap dapat terpenuhi. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mengamanatkan perencanaan pembangunan daerah wajib diintegrasikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk menjamin strategi pembangunan daerah telah memperhatikan prinsip berkelanjutan. Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7



Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 integrasi RPJPD dengan KLHS RPJPD ditujukan untuk mengharmonisasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang khususnya di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kesenjangan antara kondisi ideal TPB dengan kondisi capaian TPB menjadi tolak ukur masih adanya tantangan implementasi TPB di Kabupaten Seram Bagian Barat dan memunculkan isu pembangunan berkelanjutan. Isu pembangunan berkelanjutan menegaskan masih belum optimalnya penapaian TPB di Kabupaten Seram Bagian Barat. Harmonisasi TPB KLHS ke dalam RPJPD diharapkan mengakselerasi pencapaian TPB di Kabupaten Seram Bagian Barat. Isu TPB di Kabupaten Seram Bagian Barat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya alam belum berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan
2. Rendahnya perlindungan ekosistem pesisir dan laut
3. Rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak
4. Rendahnya upaya pemberdayaan SDM dan pengembangan potensi lapangan kerja
5. Daya saing UMKM masih rendah
6. Penanganan resiko bencana alam dan perubahan iklim belum optimal
7. Tingginya intensitas lahan kritis dan pengendalian kerusakan lingkungan belum optimal

Isu TPB yang dimuat dalam KLHS RPJPD mempertimbangkan faktor urgensi dan dampak terhadap pembangunan jangka panjang. Isu TPB Kabupaten Seram Bagian Barat dilengkapi alternatif skenario berupa upaya tambahan sebagai respon dalam menyikapi urgensi indikator TPB terhadap kepentingan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Isu TPB secara terperinci diuraikan ke dalam beberapa permasalahan yang memiliki kesenjangan target relatif tinggi terhadap target TPB nasional. Berikut ini merupakan penjabaran isu TPB, permasalahan, dan rekomendasi arah kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat:

**Tabel 3. 7 Rekomendasi Sasaran Pokok dan Strategi atas Penetapan Isu TPB KLHS RPJPD Tahun 2025-2045**

No	Sasaran Pokok Daerah	Strategi
1	Meningkatkan taraf hidup penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, khususnya pada kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak	<p>Meningkatkan kualitas SDM di bidang sosial dan ekonomi melalui pendidikan, pelatihan, dan bantuan modal</p> <p>Mendorong masyarakat miskin dan rentan agar memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat</p> <p>Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah terutama logistik dan infrastruktur pendukung untuk pengentasan kemiskinan melalui budi daya komoditas unggulan</p> <p>Membangun ketahanan masyarakat miskin dan menekan kerentanan mereka terhadap guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, maupun bencana</p>
2	Meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memastikan mereka mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial	<p>Mendorong program perlindungan dan jaminan sosial yang berkeadilan</p> <p>Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua</p> <p>Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua</p> <p>Mengadopsi kebijakan dan perlindungan sosial untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar</p>
3	Meningkatkan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi dasar yang layak dan aman di seluruh wilayah kabupaten	<p>Peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata</p> <p>Mengendalikan sumber pencemar di sekitar sumber air baku permukaan kota</p>
4	Meningkatkan persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi ibu hamil secara inklusif

No	Sasaran Pokok Daerah	Strategi
5	Meningkatkan alokasi anggaran untuk layanan pokok seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sehingga mencapai proporsi yang lebih besar dari total belanja pemerintah kabupaten	<p>Melaksanakan penganggaran dan prosedur pemberian bantuan biaya pendidikan (pengelolaan dan koordinasi dalam pemberian bantuan biaya pendidikan, khususnya bagi siswa yang kurang mampu dan berpotensi putus sekolah akibat kesulitan biaya), biaya fasilitas kesehatan, dan program jaminan sosial</p> <p>Menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta maupun NGO untuk melakukan upaya terkoordinasi dalam membantu masyarakat kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan wajib 9 tahun</p>
6	Menurunkan tingkat prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dengan memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang bergizi dan terjangkau	Memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan lokal, distribusi pangan yang merata, dan program subsidi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan
7	Menurunkan prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat melalui peningkatan akses terhadap pangan yang stabil dan berkelanjutan	Mengembangkan sistem distribusi pangan yang lebih efisien dan adil serta memperkuat cadangan pangan di wilayah rawan untuk mengantisipasi kekurangan pangan
8	Menurunkan prevalensi <i>stunting</i> pada anak di bawah 5 tahun dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatkan intervensi gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan melalui pemberian makanan tambahan bergizi dan edukasi gizi kepada ibu hamil dan keluarga
9	Meningkatkan skor Pola Pangan Harapan untuk mencapai gizi seimbang bagi seluruh penduduk	<p>Meningkatkan ketersediaan, distribusi, dan akses pangan masyarakat</p> <p>Meningkatkan kualitas keamanan pangan dan diversifikasi pangan masyarakat</p> <p>Pemenuhan kebutuhan gizi dan kualitas konsumsi pangan untuk masyarakat</p> <p>Optimalisasi sektor pertanian dan perikanan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan</p>

No	Sasaran Pokok Daerah	Strategi
		Optimalisasi Gerakan Makan Ikan (GEMARIN) untuk peningkatan asupan gizi dengan sasaran baduta, balita, dan ibu hamil
10	Menurunkan angka insiden Tuberkulosis (TB) di masyarakat melalui deteksi dini dan pengobatan yang tepat	Peningkatan cakupan vaksinasi Hepatitis B dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini
11	Menurunkan angka insiden Hepatitis B di masyarakat melalui pencegahan dan pengobatan dini	Peningkatan cakupan pengobatan preventif massal dan memperkuat program edukasi serta deteksi dini di daerah endemik filariasis
12	Menurunkan prevalensi penyakit filariasis melalui peningkatan deteksi dini dan pengobatan massal	Peningkatan deteksi dini, pengobatan yang cepat dan tepat, serta penanganan sosial bagi penderita Kusta
13	Mengurangi angka kejadian penyakit Kusta dan mencegah kecacatan melalui intervensi medis dan sosial	Mendorong penguatan kualitas Keluarga Berencana dengan pemenuhan kebutuhan terhadap alat kontrasepsi modern
14	Meningkatkan proporsi perempuan usia reproduksi yang kebutuhan keluarga berencananya terpenuhi dengan metode kontrasepsi modern	Mendorong penguatan kualitas Keluarga Berencana dengan pemenuhan kebutuhan terhadap alat kontrasepsi modern
15	Meningkatkan cakupan penggunaan kontrasepsi di kalangan perempuan usia subur dari kelompok berpendapatan rendah	Mendorong terciptanya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi
16	Meningkatkan ketersediaan obat esensial di puskesmas melalui peningkatan manajemen stok dan distribusi obat esensial	Mendorong peningkatan terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik serta akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau
17	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat hingga mencapai target nasional	Peningkatan kualitas pendidikan sekolah dasar melalui pengelolaan pendidikan agar sesuai standar nasional dan pengembangan kurikulum Mendorong semua anak untuk dapat menyelesaikan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas
18	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat agar lebih banyak anak menyelesaikan pendidikan menengah pertama	Peningkatan kualitas pendidikan sekolah menengah melalui pengelolaan pendidikan agar sesuai standar nasional dan pengembangan kurikulum

No	Sasaran Pokok Daerah	Strategi
		Mendorong semua anak untuk dapat menyelesaikan pendidikan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas
19	Menurunkan angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan dalam 12 bulan terakhir	Menghapuskan segala bentuk kekerasan, perdagangan manusia, eksploitasi terhadap perempuan
		Menghentikan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak
20	Menurunkan angka pernikahan dini dan meningkatkan usia perkawinan pertama di atas 18 tahun	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa
21	Menurunkan angka kelahiran pada remaja perempuan usia 15-19 tahun	Menghentikan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak
22	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif dan pemerintahan daerah melalui kebijakan afirmatif dan peningkatan kapasitas perempuan	Menerapkan kebijakan kuota gender di lembaga legislatif dan pemerintahan daerah, misalnya menetapkan bahwa minimal 30% kursi atau posisi harus diisi oleh perempuan
23	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern melalui kegiatan edukasi peningkatan akses informasi terhadap metode kontrasepsi	Terjadinya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan optimalisasi peran stakeholder dalam upaya promosi Kepro (Kesehatan Reproduksi)
24	Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak, aman, dan berkelanjutan	Mencapai akses terhadap air minum yang aman dan terjangkau
		Meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pasokan air yang berkelanjutan
		Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu
25	Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak dan aman	Peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata
		Mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan
		Mengendalikan sumber pencemar di sekitar sumber air baku permukaan kota

No	Sasaran Pokok Daerah	Strategi
26	Meningkatkan persentase tenaga kerja formal dengan memperluas kesempatan kerja yang teratur dan dilindungi oleh hukum	Mendorong pengembangan program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja formal dan memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja secara resmi
27	Meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan dengan menambah jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Mendorong ekspansi layanan perbankan ke daerah-daerah yang masih minim akses dengan memberikan insentif bagi bank untuk membuka kantor cabang dan memasang ATM di wilayah-wilayah yang belum terlayani
28	Meningkatkan total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Mendorong investasi pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang
		Memastikan aksesibilitas peningkatan perekonomian melalui usaha ekonomi kelas kecil dan menengah
29	Meningkatkan secara signifikan persentase rumah tangga yang terlayani jaringan akses internet dengan <i>fixed broadband</i>	Pengembangan infrastruktur jaringan <i>broadband</i> , memberikan insentif bagi penyedia layanan internet, dan mendorong adopsi teknologi informasi di masyarakat
30	Meningkatkan secara signifikan persentase rumah tangga yang terlayani jaringan internet akses <i>mobile broadband</i>	Perluasan cakupan jaringan 4G/5G, mendorong penggunaan <i>smartphone</i> , dan memberikan edukasi digital kepada masyarakat serta menerbitkan regulasi yang mendukung pembangunan infrastruktur jaringan mobile
31	Meningkatkan secara signifikan persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T, serta memberikan subsidi untuk akses layanan internet di wilayah tersebut

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Seram Barat Tahun 2025-2045

### 3.2.5 Isu strategis Daerah

#### 1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan objek sekaligus subjek dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah perlu dukungan



sumber daya manusia yang berkualitas. Beberapa faktor yang turut menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah antara lain adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang tersebut merupakan fondasi yang sangat menentukan kondisi sumber daya manusia dan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat serta kualitas tenaga kerja di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Secara konseptual, bidang pendidikan dan kesehatan merupakan komponen langsung pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang biasa digunakan untuk melihat hasil pembangunan pada bidang sumber daya manusia. Berdasarkan analisis selama periode 2013 hingga 2023, komponen rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Seram Bagian Barat masih menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian.

Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat disebabkan oleh beberapa faktor seperti masih adanya beberapa wilayah yang belum mendapatkan akses layanan pendidikan yang berkualitas, belum optimalnya kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik, pengembangan kompetensi guru yang belum optimal, masih rendahnya motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, peran keluarga dalam membentuk karakter anak yang masih belum optimal serta dukungan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang menjadi beberapa hal yang kemudian perlu mendapatkan intervensi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain itu, upaya untuk menyediakan layanan pendidikan vokasional menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Kabupaten Seram Bagian Barat di dunia kerja.

Sementara itu, belum optimalnya kualitas layanan pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor seperti masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang optimal, khususnya di beberapa wilayah yang jauh dari pusat keramaian, masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang layanan kesehatan, belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dunia kesehatan serta belum optimalnya penanganan gizi anak sebagai salah satu upaya untuk menekan angka stunting dari sisi kesehatan.

Selain bidang pendidikan dan kesehatan, hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah aspek perlindungan sosial. hal ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial yang mencakup menjamin kebutuhan dasar, layanan sosial serta pemberdayaan bagi individu maupun kelompok rentan. Upaya perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran dapat dilakukan dengan melakukan integrasi data penerima bantuan serta pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia, perempuan dan anak.

Penguatan fondasi Sumber Daya Manusia secara optimal akan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat serta kualitas tenaga kerja di Kabupaten Seram Bagian Barat. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif perlu untuk terus dilakukan guna mengimbangi persaingan di masa yang akan datang di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu, pembangunan dan penguatan pelayanan dasar menjadi kunci utama pembangunan daerah khususnya dalam hal menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

## 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial adaptif

Data indeks gini dan kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan bahwa rendahnya ketimpangan tidak disertai dengan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun tingkat kemiskinan juga mencapai 22,39% 16,42 persen pada tahun 2023, masih tinggi secara rata-rata bila dibandingkan dengan Provinsi Maluku yakni pada angka 16,42 persen. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif yang ditandai dengan adanya perluasan sumber penghidupan yang dapat diakses serta dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Seram Bagian Barat juga harus disertai dengan adanya perlindungan sosial yang adaptif. Pada dasarnya, perlindungan sosial adaptif merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata melalui upaya penurunan kemiskinan, kesenjangan, dan pemenuhan hak-hak dasar terutama pada masyarakat rentan. Perlindungan sosial juga diperlukan untuk merespon efek perubahan iklim dan potensi terjadinya bencana alam melalui sistem perlindungan sosial adaptif.

Upaya perlindungan sosial di Kabupaten Seram Bagian Barat secara umum diwujudkan melalui program penurunan kemiskinan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Upaya perlindungan sosial selama ini masih terkendala pada beberapa hal, yakni belum optimalnya kerja sama dan sinergi lintas sektor antar pemangku kepentingan, belum tersedianya tempat rehabilitasi sosial yang representatif seperti rumah singgah dan rumah aman untuk proses pemulihan individu/keluarga/kelompok yang mengalami disfungsi sosial.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian yakni penanganan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Saat ini, Kabupaten Seram Bagian Barat belum memiliki penampungan khusus untuk menangani ODGJ di dari segi kesehatan maupun dari segi sosial. Berbagai masalah tersebut menuntut adanya perlindungan sosial yang lebih adaptif untuk mengantisipasi adanya peningkatan ketimpangan sosial di Kabupaten Seram Bagian Barat.

### 3. Pembangunan Ekonomi Inklusif

PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2022 adalah 3.500 miliar rupiah dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 3.787 miliar rupiah. Nilai paling tinggi ada pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1.16 miliar rupiah dan nilai paling rendah ada pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 2,28 miliar rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi Seram Bagian Barat pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan ekonomi Seram Bagian Barat tahun 2023 sekitar 5,63 persen, sedangkan pada tahun 2022 sekitar 3,40 persen. Bila diurutkan pertumbuhan PDRB menurut sektor dari yang tertinggi ke yang terendah, maka pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,78 persen dan terendah ada pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,63 persen Kabupaten Seram Bagian Barat digerakkan oleh sektor primer yang bergantung pada sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Besarnya dominasi sektor pertambangan dan penggalian untuk saat ini memang menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Seram Bagian Barat tetapi kontribusi tersebut dikawatirkan akan semakin turun seiring dengan

perubahan pola konsumsi energi yang perlahan mulai mengarah pada energi baru terbarukan yang berkelanjutan.

Rendahnya nilai PDRB serta ketergantungan pada sektor ekonomi primer menjadi persoalan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan jangka panjang Kabupaten Seram Bagian Barat. Diversifikasi lapangan usaha perlu dilakukan untuk menjamin ketahanan perekonomian daerah, yang selama ini bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan dan penggalian, yang rentan terhadap pergerakan permintaan dan penawaran di pasar komoditas hasil SDA. Hilirisasi komoditas unggulan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk sehingga ke depannya PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat dapat tumbuh pesat dan semakin tinggi. Diversifikasi dan transformasi ekonomi juga perlu dilakukan dengan mengembangkan potensi daerah lainnya khususnya yang bergerak di bidang jasa atau sektor tersier. Pengembangan pariwisata dapat menjadi salah satu upaya prioritas yang dapat memberikan dampak ikutan terhadap lapangan usaha lainnya.

Perekonomian Kabupaten Seram Bagian Barat tidak hanya berfokus pada perekonomian di dalam daerah saja tetapi juga perlu mempertimbangkan kehadiran daerah otonom baru. Kehadiran daerah otonom baru dapat membawa dampak positif apabila dapat direspon dengan tepat namun dapat membawa persoalan baru jika tidak dipersiapkan sebaik mungkin. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan perekonomian daerah juga perlu memperhatikan perencanaan pembangunan daerah pemekaran baru agar dapat mengantisipasi perubahan pola konsumsi dan permintaan sehingga ke depannya Kabupaten Seram Bagian Barat dapat memenuhi kebutuhan di dalam daerah maupun daerah pemekaran dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Provinsi Maluku dan Indonesia.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat perlu mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan terlebih lagi pola aktivitas perekonomian daerah selama ini bertopang pada aktivitas ekstraktif. Pembangunan ekonomi perlu dijalankan secara berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup generasi mendatang. Oleh karena itu, segala upaya pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan pada peningkatan nilai PDRB secara besar-besaran tetapi juga tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

#### 4. Pemerataan infrastruktur daerah yang berkualitas

Konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi permasalahan utama wilayah Maluku yang mengakibatkan tingginya biaya logistik serta biaya pembangunan wilayah. Kuantitas dan kualitas jaringan jalan yang masih rendah menjadi faktor penyumbang utama permasalahan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Total panjang jalan Kabupaten tahun 2022 sepanjang 483,7 Km dengan rincian panjang jalan mantap 354,9 Km (73,37%), rusak sedang 126,3 Km (26,11%), dan rusak berat 2,5 Km (0,52%). Persentase jaringan jalan dalam kondisi rusak lebih besar jika dibandingkan dengan jalan dalam kondisi mantap, lebih dari itu belum optimalnya keberadaan terminal serta angkutan umum menjadi penyebab rendahnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Penyediaan infrastruktur dasar permukiman di Kabupaten Seram Bagian Barat masih menjadi permasalahan yang cukup mendasar. Akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan sebesar 76,13 persen pada tahun 2022, sedangkan sisanya masih memanfaatkan sumur bor, sungai, danau ataupun air permukaan lain. Jumlah backlog perumahan tahun 2023 adalah terdiri dari backlog kepemilikan sebanyak 5.289 unit, backlog peng hunian 3.789 unit dan jumlah RTLH sebanyak 5.434 unit, komponen ini juga menjadi isu strategis daerah yang perlu ditindaklanjuti pada periodisasi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045

Potensi alih fungsi lahan yang akan terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat perlu menjadi perhatian dalam penataan tata ruang, karena dampak dari perkembangan wilayah. Sehingga perlu adanya upaya preventif untuk pemanfaatan ruang agar tidak terjadi degradasi lahan dan perubahan peruntukan ruang yang membawa dampak negatif untuk lingkungan. Perlu adanya upaya evaluasi dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain itu, perlu adanya upaya pembangunan jaringan drainase yang dapat mendukung produktivitas lahan sawah yang berkelanjutan, sehingga menunjang pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian.

#### 5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan hidup mencakup berbagai upaya untuk dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup agar tetap

selalu terjaga dengan baik. Kualitas lingkungan hidup tidak hanya menjadi isu daerah, namun telah menjadi isu di level nasional bahkan global. Di tingkat nasional, isu lingkungan telah tercermin dalam misi dan agenda pembangunan RPJPN 2025-2045, sedangkan di level global, telah dirumuskan tiga isu lingkungan yang dikenal *tripple planetary crisis*. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka urgensi terhadap pengelolaan lingkungan sangat tinggi dan harus direspon dengan tepat.

Pengelolaan sampah, alih fungsi lahan dan beragam bencana seperti banjir, menjadi isu yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks pengelolaan lingkungan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Terlebih lagi, Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai salah satu daerah rawan bencana, tentunya secara langsung maupun tidak langsung dapat menerima dampak terhadap kondisi kualitas lingkungan hidupnya. Berbagai kondisi tersebut tentunya perlu mendapatkan intervensi secara tepat, seperti penanganan dan pengelolaan sampah secara terpadu berbasis masyarakat, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait kesesuaian tata ruang, mempertahankan wilayah imbuhan air, hingga peningkatan resiliensi penanggulangan bencana perlu untuk diintegrasikan dalam setiap periode pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

## 6. Tata kelola kolaboratif & transformasi digital

Isu strategis di bidang tata kelola pemerintahan berkaitan dengan tata kelola kolaboratif dan transformasi digital. Tata kelola kolaboratif ini merespon dinamika pembangunan daerah Kabupaten. Dengan adanya transformasi digital secara otomatis Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat harus berkolaborasi dengan berbagai stakeholders guna memanfaatkan peluang sekaligus meminimalisir dampak negatif. Hal ini menandakan bahwa kolaborasi pemerintahan tidak hanya merujuk pada pemerintah semata tetapi lebih luas lagi ke seluruh *stakeholders* pembangunan non pemerintah, seperti masyarakat sipil dan swasta. Oleh karena itu, prinsip partisipasi dan transparansi penting untuk diterapkan dalam kolaborasi pemerintahan agar masyarakat tidak hanya berpartisipasi secara semu, tetapi mampu berpartisipasi aktif di seluruh aspek pembangunan daerah.



Transformasi digital mengandaikan penyelenggaraan pelayanan publik ke depan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi karena perkembangannya sangat pesat dan sudah menjadi kebutuhan bahkan strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan transformasi digital dibutuhkan berbagai sarana prasarana yang memadai dan kualitas ASN yang baik. Sarana dan prasarana berkaitan dengan bangunan perkantoran yang belum memadai saat ini. Sedangkan kualitas ASN berkaitan dengan profesionalitas dan integritas ASN dalam merespon perkembangan tersebut.

Penataan wilayah perlu dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penataan wilayah juga untuk memperjelas administrasi kewilayahan Seram Bagian Barat yang saat.



## **BAB IV**

# **VISI MISI DAERAH**

Rumusan Visi dan Misi merupakan bagian utama dalam dokumen RPJPD. Visi menggambarkan harapan akan kondisi yang lebih baik yang hendak diwujudkan pada masa depan, dalam hal ini dua puluh tahun mendatang. Kondisi yang lebih baik tersebut didasarkan pada isu-isu strategis yang dihadapi daerah maupun tantangan dan peluang baik yang berada pada level lokal, regional, nasional, dan global. Sedangkan misi menggambarkan serangkaian upaya strategis yang hendak dilakukan untuk mewujudkan harapan akan kondisi ideal tersebut. Dengan demikian secara substantif, rumusan visi dan misi dalam RPJPD merupakan manifesto kolektif seluruh stakeholder untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang dicita-citakan bersama.

### **4.1 Visi Pembangunan 2025-2045**

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2045 merupakan upaya untuk mendorong lompatan pembangunan dalam periode dua puluh tahun ke depan. Analisis terhadap capaian berbagai indikator pembangunan periode sebelumnya menjadi pijakan penting bagi penentuan arah dan upaya pembangunan dua dekade mendatang. Hasil analisis tersebut antara lain dituangkan dalam Laporan Evaluasi RPJPD Seram Bagian Barat periode 2006-2026 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD 2025-2045. Di samping itu analisis dan elaborasi tentang konteks menjadi pijakan penting dalam perumusan visi misi dan arah pembangunan dua puluh tahun mendatang. Oleh karena itu, elaborasi secara komprehensif terhadap konteks geografis, demografis, sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga daya dukung lingkungan, menjadi pertimbangan penting.

Selain didasarkan perkembangan berbagai ranah lingkungan strategis dalam lingkup lokal, penyusunan visi dan misi juga didasarkan pada analisis secara cermat terhadap perubahan-perubahan strategis yang terjadi pada lingkup regional, nasional, dan global. Hal ini selain dilakukan untuk membuat perencanaan menjadi lebih holistik dan antisipatif juga dilakukan guna memastikan keselarasan dengan perencanaan pembangunan baik pada level provinsi, maupun nasional. Dengan demikian arah pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam dua puluh tahun ke depan turut menopang pencapaian visi pembangunan pada level provinsi maupun nasional.



Berdasarkan pertimbangan berbagai isu-isu strategis tersebut, rumusan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2025-2045 adalah sebagai berikut:

### ***"Seram Bagian Barat Berbudaya, Maju dan Berkelaanjutan"***

Rumusan visi tersebut memuat empat frasa kunci yakni Seram Bagian Barat, Berbudaya, Maju dan Berkelaanjutan. Secara ringkas masing-masing frasa mengandung makna sebagai berikut:

**Seram Bagian Barat.** Merupakan nama Daerah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku.

**Berbudaya.** Pembangunan Seram Bagian Barat diarahkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan, keselarasan dengan alam, serta merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan nilai Bhineka Tunggal Ika dengan mengedepankan nilai-nilai kerukunan dan toleransi antar umat beragama dan kehidupan yang mencerminkan sumberdaya manusia yang handal, berkualitas dan berkarakter

**Maju.** Visi Seram Bagian Barat "Maju" mengandung arti bahwa masyarakat Seram Bagian Barat secara umum mencapai tingkat perkembangan yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan tersebut antara lain dicirikan dengan ekonomi yang stabil dan berkembang, ditandai dengan pertumbuhan PDB yang sehat, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang rendah, serta distribusi pendapatan yang merata. Di samping indikator-indikator ekonomi, kemajuan suatu daerah juga ditandai dengan layanan publik yang berkualitas dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Ketersediaan infrastruktur yang baik, termasuk transportasi, komunikasi, air bersih, pemukiman, yang ditopang dengan pemanfaatan teknologi juga menandai kemajuan suatu daerah. Tak kalah pentingnya, pemanfaatan teknologi untuk mendorong efisiensi dan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan pada umumnya juga menjadi ciri kemajuan suatu daerah.

Maju mencirikan mampu mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitifnya dalam memajukan perekonomian daerah. Daya saing suatu daerah dipengaruhi oleh setidaknya empat komponen yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Lebih lanjut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menguraikan keempat komponen tersebut ke dalam 12 pilar daya saing daerah,

yaitu: institusi, infrastruktur, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, serta kapabilitas inovasi. Capaian Kabupaten Seram Bagian Barat dalam keduabelas pilar tersebut cukup variatif. Dalam pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pada 2022 lalu, daya saing Kabupaten Seram Bagian Barat terutama dikontribusikan oleh pilar kelembagaan (tata kelola pemerintahan), kesehatan, pasar produk, dan sistem keuangan, di mana skor Seram Bagian Barat berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Sedangkan untuk pilar-pilar lain masih sangat perlu diperkuat, terutama yang terkait dengan infrastruktur, teknologi, stabilitas ekonomi makro, keterampilan, pasar tenaga kerja, ukuran pasar, serta kapabilitas inovasi.

**Berkelanjutan.** Pembangunan untuk generasi saat ini dan masa depan yang selaras antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta ditopang dengan tata kelola yang baik. Pengurangan emisi karbon melalui penerapan ekonomi hijau merupakan upaya strategis dalam rangka mencapai kondisi yang berkelanjutan. Kesinambungan pembangunan antar periode tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang juga bagian dari makna berkelanjutan. Kesinambungan menjadikan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kinerja yang semakin baik dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Visi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat juga merupakan bagian penting untuk mencapai Visi RPJPN dan Visi RPJPD Provinsi Maluku. Penting pula untuk ditegaskan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Seram Bagian Barat dirancang untuk mendukung pencapaian visi pembangunan dalam lingkup pemerintahan provinsi maupun nasional.



**Gambar 4. 1 Sinergi Visi RPJP Seram Bagian Barat, Maluku, Indonesia**

Visi "Seram Bagian Barat Berbudaya, Maju dan Berkelaanjutan" secara eksplisit sejalan dengan visi RPJD Provinsi Maluku yakni "Maluku Maju, Inklusif, dan Berkelaanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan". Dalam konteks nasional, Visi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat mendukung pencapaian visi "Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelaanjutan". Kondisi berdaulat yang mengandung makna ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. Kondisi maju yang memiliki arti Indonesia menjadi negara yang berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil, sehingga memiliki daya saing tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kondisi berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

**Tabel 4. 1 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045**

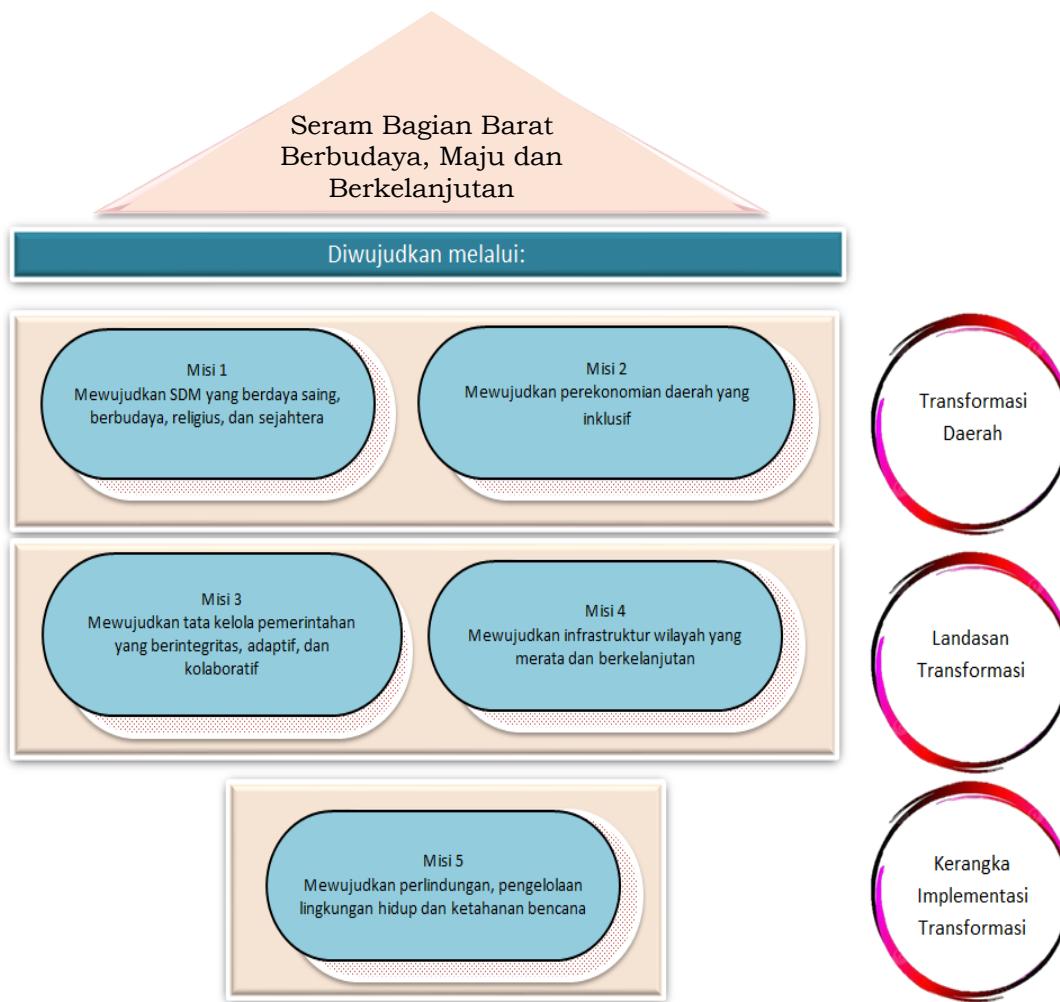
RPJPN 2025-2045		RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2045		2022 /2023	Target	
Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator		2025	2045
Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI per kapita	Meningkatnya inklusifitas perekonomian daerah	PDRB per kapita (Rp Juta)		33,11	146,98
	Kontribusi PDB maritim (%)				–	–
	Kontribusi PDB manufaktur (%)		Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan (%)	33,26	219,94	
Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat kemiskinan (%)	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat kemiskinan (%)	22,39	6,50	8,14 – 8,95
	Rasio Gini (indeks)		Rasio Gini (indeks)		– 6,64	
					0,282	0,220 – 0,243
					– 13,51	
					0,287	

RPJPN 2025-2045		RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2045		2022 /2023	Target	
Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator		2025	2045
	Kontribusi PDRB KTI (%)		Kontribusi PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Provinsi Maluku (%)			
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah (nilai)			
Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Pembangunan Manusia			
Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK (%)			

## 4.2 Misi Pembangunan 2025-2045

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat merumuskan lima misi yang merupakan upaya strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi sebagaimana dituangkan di atas. Lima misi tersebut masing-masing berkenaan dengan aspek pokok visi atau kondisi yang telah dipilih berupa Seram Bagian Barat Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan. Pokok visi tersebut harus didukung oleh rumusan misi sehingga memiliki instrumen pembangunan untuk mewujudkannya. Perumusan misi tidak kalah penting juga mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan yang mengarusutamakan dan menyelaraskan antar pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Pilar pembangunan berkelanjutan tersebut kemudian dikontekstualisasikan dengan kebutuhan Kabupaten Seram Bagian Barat serta disinergikan dengan tuntutan global dan nasional, sehingga

menjadikan rumusan misi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Rumusan misi RPJPD harus mendukung upaya transformasi yang menjadi agenda besar di dalam RPJPN maupun RPJPD Provinsi Maluku 2025-2045, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta menjalankan landasan transformasi dan kerangka implementasi transformasi. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka rumusan Misi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2045 dalam rangka mendukung pencapaian visi sebagai berikut:



**Gambar 4. 2 Sinergi Visi Misi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat**

Misi RPJPD juga harus terbangun keterkaitan dan peran dalam menjalankan misi atau agenda pembangunan RPJPN maupun RPJPD Provinsi Maluku. RPJPN memiliki 8 misi atau agenda pembangunan yang dikelompokkan ke dalam rumpun transformasi Indonesia, landasan transformasi, dan kerangka implementasi transformasi. Keterkaitan antara 8 agenda pembangunan RPJPN dengan misi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai berikut:

**Tabel 4. 2 Integrasi Misi Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap RPJPN dan RPJPD Provinsi Maluku**

Bahan Pertimbangan		Misi RPJPD Seram Bagian Barat
Misi RPJPN	Misi RPJPD Maluku	
<b>Transformasi Indonesia:</b> <b>Misi 1:</b> Transformasi Sosial <b>Misi 2:</b> Transformasi Ekonomi <b>Misi 3:</b> Transformasi Tata Kelola	<b>Transformasi Daerah:</b> <b>Misi 1:</b> Mewujudkan Transformasi Sosial <b>Misi 2:</b> Mewujudkan Transformasi Ekonomi	<b>Transformasi Daerah:</b> <b>Misi 1:</b> Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, religius, dan sejahtera <b>Misi 2:</b> Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif
<b>Landasan Transformasi:</b> <b>Misi 4:</b> Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia <b>Misi 5:</b> Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<b>Landasan Transformasi:</b> <b>Misi 3:</b> Mewujudkan Transformasi Tata Kelola <b>Misi 4:</b> Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya	<b>Landasan Transformasi:</b> <b>Misi 3:</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif <b>Misi 4:</b> Mewujudkan infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan
<b>Kerangka Implementasi Transformasi:</b> <b>Misi 6:</b> Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan <b>Misi 7:</b> Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan <b>Misi 8:</b> Kesinambungan Pembangunan	<b>Kerangka Implementasi Transformasi:</b> <b>Misi 5:</b> Mewujudkan Ketahanan Ekologi <b>Misi 6</b> Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Andal	<b>Kerangka Implementasi Transformasi:</b> <b>Misi 5:</b> Mewujudkan perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana

**Misi 1: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing, berbudaya, religius, dan sejahtera**

Sumber daya manusia merupakan fondasi utama bagi upaya mewujudkan kemajuan daerah. Sumber daya manusia yang handal, kompetitif, dan berintegritas, berperan penting dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. SDM

yang unggul menjadi penggerak inovasi dan kreativitas guna memajukan kesejahteraan bersama. Upaya pengembangan sumberdaya manusia Kabupaten Seram Bagian Barat 20 tahun ke depan didasarkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Upaya mewujudkan SDM berdaya saing juga ditopang oleh peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat yang sehat dan cerdas akan berdampak pada daya saing SDM, sehingga peluang bonus demografi dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pada aspek pendidikan, meskipun secara umum Kabupaten Seram Bagian Barat terus menunjukkan perbaikan namun pada beberapa indikator dasar masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Meskipun di sisi lain angka partisipasi angkatan kerja Seram Bagian Barat berada di atas Provinsi Maluku data juga menunjukkan bahwa angka kemiskinan Seram Bagian Barat lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa daya saing tenaga kerja Kabupaten Seram Bagian Barat masih relatif rendah. Oleh karena itu, perecanaan pembangunan SDM ke depan hendaknya ditekankan pada upaya meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Untuk itu penyediaan layanan pendidikan tinggi dan sekolah-sekolah vokasi serta lembaga-lembaga pelatihan kerja yang sejalan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja menjadi agenda strategis bagi Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pada aspek kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat juga perlu melakukan terobosan ekstra untuk terus mengejar ketertinggalannya dari mayoritas daerah di Maluku. Meski strategi penanganan stunting yang diterapkan oleh Kabupaten Seram Bagian Barat dinilai masih perlu diintervensi namun berbagai indikator makro kesehatan seperti Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) juga masih perlu perhatian serius. Untuk itu dari aspek penyediaan layanan, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat perlu untuk terus memastikan penyediaan dan pemerataan pelayanan dengan kualitas yang semakin meningkat. Peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit Umum Daerah Piru yang ditopang oleh peralatan dan tenaga-tenaga medis yang profesional menjadi kebutuhan mendesak. Pada saat yang sama upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat juga perlu untuk terus dikampanyekan.

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat bagi terwujudnya transformasi sosial masyarakat yang inklusif. Pada prinsipnya transformasi sosial adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan agar masing-masing warga dapat meningkatkan harkat dan martabatnya. Selain itu

transformasi sosial yang inklusif adalah proses perubahan dalam struktur dan dinamika masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan setara bagi semua anggota masyarakat. Konsep ini menekankan pada pentingnya memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, identitas, atau keadaan, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Transformasi sosial yang inklusif membutuhkan komitmen dari semua lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara, untuk bekerja sama menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

### **Misi 2: Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif**

Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif adalah proses kompleks yang memerlukan strategi multi-faset. Tujuannya adalah untuk membangun ekonomi yang tidak hanya tumbuh secara stabil tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, terlebih sebagai pintu masuk bagi 3 Kabupaten yang ada di Provinsi Maluku yakni Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Maluku Tengah. Pola pembangunan Seram Bagian Barat diarahkan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang dikembangkan saat ini. Untuk itu beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain terkait adopsi teknologi guna peningkatan efisiensi sumberdaya alam serta mengurangi limbah dan polusi. Kabupaten Seram Bagian Barat juga perlu merancang skema transformasi energi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon. Pada saat yang sama pengembangan ekonomi sirkular untuk optimalisasi pemanfaatan bahan baku serta minimalisasi limbah, perlu mulai dikembangkan.

Untuk mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan tersebut, pemerintah Seram Bagian Barat juga perlu mendorong kerjasama penelitian dan pengembangan dalam teknologi hijau, metode pertanian berkelanjutan, dan solusi inovatif lainnya yang mendukung keberlanjutan. Pada saat yang sama pemerintah juga perlu mendorong upaya penguatan keterampilan yang diperlukan dalam ekonomi berkelanjutan, seperti manajemen sumber daya, teknologi hijau, dan praktik bisnis berkelanjutan. Stimulasi untuk mendorong investasi dan praktik-praktik bisnis berkelanjutan juga penting untuk segera dimulai. Strategi-strategi ini harus diintegrasikan ke dalam perencanaan dan kebijakan ekonomi nasional dan lokal, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap negara atau wilayah. Transformasi ekonomi yang berkelanjutan bukan hanya tentang perlindungan lingkungan, tetapi juga tentang menciptakan prospek ekonomi jangka panjang yang kuat dan adil bagi semua.



Kondusifitas dan stabilitas ekonomi merupakan pilar utama dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah. Ketika tercipta lingkungan yang kondusif, maka ekonomi pada suatu daerah seringkali juga stabil. Landasan transformasi salah satunya dibentuk melalui perwujudan kondusifitas dan stabilitas ekonomi daerah untuk mengawal pembangunan agar berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan. Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif merupakan sebuah tantangan yang kompleks, namun dengan adanya kolaborasi yang baik, serta penerapan kebijakan yang terarah, hal ini diharapkan dapat tercapai dengan optimal. Dengan demikian, daerah akan menjadi lebih berdaya saing dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.

### **Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif**

Tata kelola pemerintahan merupakan faktor krusial bagi pencapaian visi Kabupaten Seram Bagian Barat. Pengejawantahan visi misi pembangunan akan sangat ditentukan oleh komitmen politik para pemangku kepentingan yang akan ditindaklanjuti pada level implementasi oleh aparatur pemerintah. Proses yang sinergis, demokratis, transparan, serta akuntabel menjadi kata kunci. Selain itu komitmen seluruh pihak untuk mendorong sistem yang bebas korupsi, serta menjunjung tinggi etika dan norma-norma yang berlaku juga sangat penting untuk ditekankan. Untuk itu, selain penegakkan sistem hukum yang independen, upaya kuat juga harus dilakukan pada ranah hulu, melalui pendidikan, penerapan kode etik, serta memfasilitasi tumbuhnya ruang-ruang publik yang kritis dan konstruktif.

### **Misi 4: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan**

Ketersediaan infrastruktur wilayah yang baik merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur tersebut antara lain meliputi jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, serta sarana prasarana lingkungan seperti ruang terbuka hijau dan fasilitas pengelolaan sampah. Dalam dua puluh tahun terakhir ketersediaan infrastruktur dasar di Seram Bagian Barat semakin membaik namun perlu diintervensi lebih lanjut khususnya daerah-daerah yang masih terisolasi dan belum mendapat akses, sehingga konektivitas dan waktu tempuh antar kecamatan semakin cepat. Beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian pemerintah Seram Bagian Barat antara lain kuantitas dan kualitas jaringan jalan kabupaten, jaringan air minum, infrastruktur irigasi, penataan

kawasan kumuh, akses transportasi yang mudah dijangkau antar wilayah serta fasilitas pengolahan sampah.

Perlu juga digarisbawahi bahwa penyediaan infrastruktur diarahkan untuk menopang visi pembangunan berkelanjutan sejalan dengan prinsip pembangunan provinsi maupun nasional. Oleh karena itu pengembangan infrastruktur diarahkan pada infrastruktur yang ramah lingkungan, selaras dengan upaya konservasi sumberdaya alam, serta antisipatif terhadap bencana alam. Poin ketahanan bencana ini penting untuk digarisbawahi mengingat Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki beberapa ancaman bencana antara lain banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, dan tanah longsor. Selain itu persoalan alih fungsi lahan juga perlu memperoleh perhatian serius, terlebih bagi daerah perbatasan antar satu desa dengan desa yang lain, alih fungsi lahan di kawasan Seram Bagian Barat tidak terhindarkan. Untuk itu diperlukan strategi antisipasi yang tepat agar alih fungsi lahan tidak mengarah pada degradasi lingkungan.

#### **Misi 5: Mewujudkan perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana**

Upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi kewajiban setiap warga negara, tanpa terkecuali. Jika lingkungannya terjaga dengan baik, maka keberlangsungan hidup umat manusia juga semakin terjamin. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pelestarian lingkungan hidup ialah melalui implemnetasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sadar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang secara luas dengan cara beraneka ragam pula. Secara garis besar ada 4 (empat) lingkup pengelolaan lingkungan hidup, meliputi Pengelolaan lingkungan secara rutin, Perencanaan dini dalam pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tutunan bagi perencana pembangunan, Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang direncanakan dan Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan karena alamiah maupun ulah manusia sendiri.

Perencanaan pengelolaan di Kabupaten Seram Bagian Barat secara dini perlu dikembangkan untuk dapat memberikan petunjuk pembangunan apa yang sesuai di suatu daerah, tempat pembangunan itu dilakukan dan bagaimana pembangunan itu dilaksanakan. Karena bersifat dini, konflik antara lingkungan dan pembangunan dapat



dihindari atau dikurangi dengan pemecahan secara dini. Dengan demikian pengelolaan lingkungan bukan merupakan hambatan pembangunan, melainkan pendukung pembangunan.

Pemerintah daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya berupa pemberian otonomi kepada daerah dalam membangun daerahnya. Esensi otonomi daerah itu sendiri adalah kemandirian, olehnya daerah mandiri mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam rumah tangga daerah termasuk mengelola kekayaan alam yang ada pada daerah tersebut dengan bijak. Dari implementasi kebijakan otonomi daerah ini juga diharapkan mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

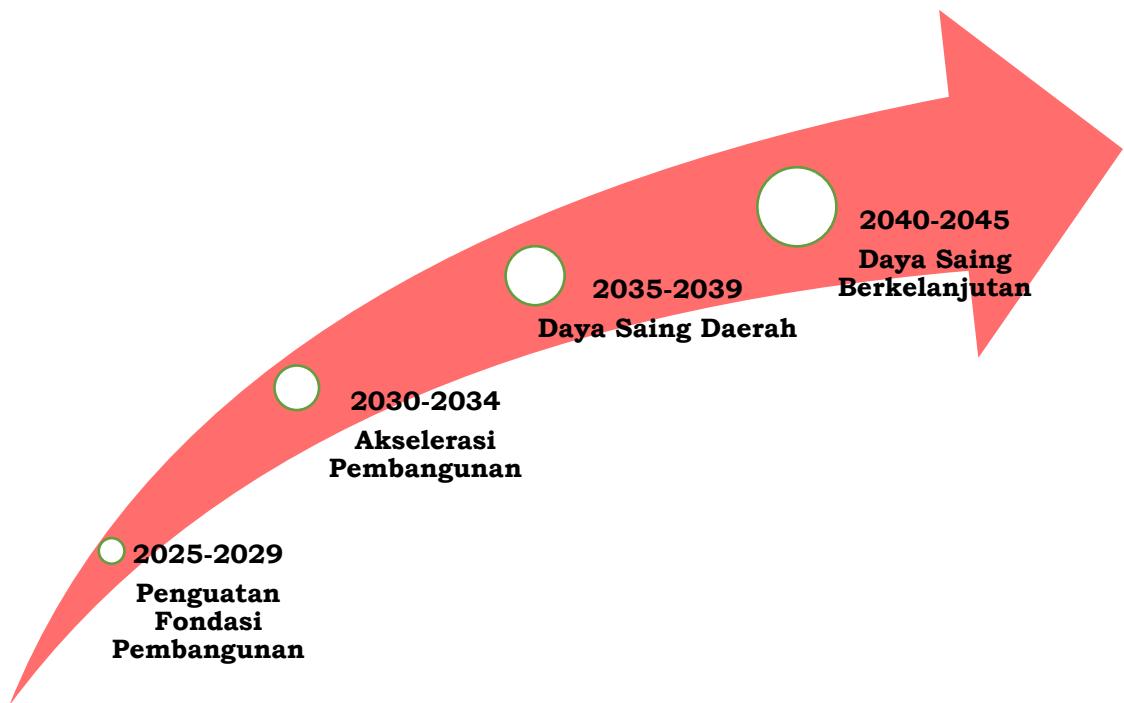
Kondisi alam yang berpotensi memicu bencana tidak bisa dikontrol siapa pun. Letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik, membuat Indonesia sangat rawan bencana, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Dengan kondisi geografis tersebut semestinya pemerintah pusat ataupun daerah lebih memperkuat kewaspadaan menghadapi bencana. Pemerintah sejatinya punya otoritas penuh untuk membuat serangkaian kebijakan agar menekan dampak bencana seminim mungkin. Ke depan, politik kebencanaan harus benar-benar ditegakkan. Terapkan semua aspek penanganannya, tanpa ada terkecuali. Siapkan anggaran mitigasi yang memadai, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Berikan sosialisasi kesiapan bencana yang tersistem. Peningkatan literasi kebencanaan juga penting untuk memperkuuh ketahanan bencana di Kabupaten Seram Bagian Barat.

## **BAB V**

# **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

### **5.1. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan merupakan kerangka kerja dalam rangka menjalankan misi dan mencapai visi. Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat dirumuskan ke dalam empat tahapan pembangunan jangka menengah dan setiap tahapan memiliki tema pembangunan. Sebagai kerangka, arah kebijakan akan menentukan prioritas atau fokus pelaksanaan arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi.



**Gambar 5. 1 Tema Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2045**

RPJPN memiliki tema pembangunan berupa Perkuatan Fondasi Transformasi pada periode 1, Akselerasi Transformasi pada periode 2, Ekspansi Global pada periode 3 dan Perwujudan Indonesia Emas pada periode 4. Tema pembangunan tersebut telah diselarasakan dengan tema pembangunan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat dan terdapat penyesuaian sesuai konteks dan kebutuhan daerah pada periode 3 dan 4. Rumusan tema pembangunan dan arah kebijakan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam empat tahap pembangunan sebagai berikut:

**Tabel 5. 1 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat  
Tahun 2025-2045**

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		I (Tahun 2025- 2029)	II (Tahun 2030- 2034)	III (Tahun 2035-2039)	IV (Tahun 2040- 2045)
		Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerasi Pembangunan	Daya Saing Daerah	Daya Saing Berkelanjutan
Seram Bagian Barat Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan	Misi 1: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Sejahtera	Penguatan Fondasi Pelayanan Dasar, Perlindungan Sosial, dan Kebijakan yang Inklusif	Akselerasi Pembangunan Kualitas Pelayanan Dasar, Perlindungan Sosial dan Inklusivitas Sosial	Penguatan SDM yang Berkualitas dan Masyarakat yang Inklusif	Perwujudan SDM yang Berdaya Saing dan Sejahtera
	Misi 2: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif	Penguatan Sumber Daya Ekonomi	Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi	Penguatan Ekspansi Pasar dan Efek Berganda	Perwujudan Ekonomi Seram Bagian Barat yang Inklusif
	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif	Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Pelayanan Publik yang Adaptif	Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan yang Profesional	Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Adaptif Serta Pelayanan Publik yang Inklusif	Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif dan Kolaboratif
	Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Akselerasi Infrastruktur Wilayah Berkualitas yang Terintegrasi	Memperkokoh Infrastruktur Wilayah yang Andal dan Merata	Perwujudan Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan dan Berkelanjutan
	Misi 5: Wewujudkan Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Penguatan Fondasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Kebencanaan	Akselerasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Adaptasi- Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim	Memperkokoh Ketahanan Lingkungan dan Bencana Secara Terintegrasi dan Berkelanjutan	Mewujudkan Wilayah Berketahanan Ekologi dan Bencana



### **5.1.1 Pentahapan Pembangunan**

#### **A. Arah Kebijakan Periode 2025-2029**

- Misi 1: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Sejahtera

Arah kebijakan lima tahunan pertama pada bidang sosial dan sumber daya manusia diarahkan untuk memperkuat fondasi pelayanan dasar, yang mencakup perluasan perlindungan sosial, yakni berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Penguatan fondasi pelayanan dasar dilaksanakan dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pemerataan pada seluruh aspek yang mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi layanan dasar masyarakat. Secara lebih rinci, beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada periode pertama pembangunan jangka panjang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses pendidikan terutama daerah yang masih belum terjangkau
2. Percepatan wajib belajar 13 tahun dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi
3. Peningkatan pemenuhan dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
4. Peningkatan akses pelayanan kesehatan berbasis gugus pulau
5. Pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan
6. Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
7. Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif
8. Peningkatan kebijakan yang inklusif bagi kelompok rentan
9. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
10. Peningkatan kerukunan antar etnis dan agama
11. Pembinaan dan penguatan kelompok pemuda dan olahraga
12. Pelestarian dan pengembangan jalur rempah sebagai peradaban budaya masyarakat



- Misi 2: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif

Tahap pertama di dalam misi 2 difokuskan untuk penguatan fondasi transformasi ekonomi, yang mencakup penguatan transformasi ekonomi melalui sektor unggulan yang berkelanjutan. Fondasi transformasi ekonomi harus mendapatkan perhatian dan intervensi kebijakan yang tepat. Tahap ini menjadi dasar bagi pelaksanaan tahapan pembangunan ke dua di dalam misi mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif. Secara rinci, beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada periode pertama pembangunan jangka panjang adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja
3. Peningkatan kemudahan akses terhadap bantuan permodalan dan realisasi investasi
4. Pengembangan kewirausahaan
5. Peningkatan kerjasama pemasaran

- Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif

Pada tahap pertama pembangunan tata kelola pemerintahan difokuskan pada penguatan fondasi tata kelola pemerintahan, mencakup peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang profesional dan transparan. Tahap ini menjadi dasar untuk tahap-tahap pembangunan selanjutnya sehingga memainkan peran penting dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan. Secara umum penguatan tata kelola diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, membangun kolaborasi, dan meningkatkan tata kelola yang profesional dan transparan. Adapun rincian tahapan pertama adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta kondusifitas daerah
3. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik
4. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan

- 
- 
- 5. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan manajemen risiko
  - 6. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah
  - 7. Peningkatan kualitas dan integritas ASN berbasis sistem merit
  - 8. Peningkatan kualitas kelembagaan
  - 9. Peningkatan kontribusi sumber-sumber PAD terhadap PAD
  - 10. Peningkatan penganggaran berbasis kinerja
  - 11. Peningkatan ekosistem inovasi
  - 12. Peningkatan kualitas regulasi pengelolaan sumber daya kelautan
- 
- Misi 4: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan
- Tahap pertama dalam misi keempat difokuskan untuk penguatan fondasi transformasi infrastruktur, yang mencakup pemerataan pelayanan infrastruktur dan pelayanan dasar sebagai modal dasar pembangunan. Fondasi transformasi infrastruktur menjadi kerangka penting dalam pembangunan suatu daerah mengingat peran strategisnya sebagai penopang penyelenggaraan pembangunan dari berbagai aspek. Pemerataan infrastruktur disamping berpotensi memacu pertumbuhan daerah, perwujudannya di Kabupaten Seram Bagian Barat masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tahap pertama pada misi keempat ini diarahkan sebagai landasan bagi peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Barat. Berikut ini uraian arah kebijakan misi keempat pada periode pertama:
- 1. Penguatan regulasi dan optimalisasi penataan ruang
  - 2. Peningkatan kolaborasi kelembagaan penyediaan dan penataan wilayah
  - 3. Peningkatan utilitas dan penataan perkotaan
  - 4. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi aman
  - 5. Penyediaan regulasi dan peningkatan permukiman layak huni yang merata
  - 6. Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian

- 
- Misi 5: Mewujudkan perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Tahap pertama pada misi kelima ini difokuskan untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penguatan regulasi. Sedangkan aspek kebencanaan pada periode ini difokuskan pada peningkatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di daerah. Tahapan ini menjadi dasar untuk tahapan periode selanjutnya dan saling berkesinambungan. Berikut rincian pada periode pertama untuk misi lingkungan:

1. Penguatan regulasi dan grand desain perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Peningkatan adaptasi-mitigasi bencana dan perubahan iklim
3. Transformasi infrastruktur dengan konsep rendah karbon dan teknologi tepat guna

## B. Arah Kebijakan Periode 2030-2034

- Misi 1: Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya dan sejahtera

Arah kebijakan pada periode pembangunan lima tahunan kedua pada bidang sumber daya manusia dan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan sistem pelayanan dasar dan memperkuat perlindungan sosial yang adaptif. Secara teknis, arah kebijakan ini merujuk pada upaya untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan sistem pelayanan dasar yang meliputi layanan pendidikan dan kesehatan serta memperkuat perlindungan sosial secara lebih luas dan adaptif sebagai upaya untuk melindungi individu maupun kelompok dari kerentanan. Bentuk intervensi pemerintah dalam upaya akselerasi pembangunan kualitas pelayanan dasar, perlindungan sosial dan inklusivitas sosial, secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Peningkatan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan
2. Peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas
3. Peningkatan partisipasi dan fasilitasi pendidikan menengah dan tinggi
4. Pemerataan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu

- 
- 
5. Perluasan cakupan perlindungan sosial
  6. Peningkatan keberdayaan kelompok rentan
  7. Penguatan keluarga yang berkualitas
  8. Penguatan kerukunan umat beragama dan etnis
  9. Penguatan pelestarian unsur-unsur kebudayaan daerah

- Misi 2: Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif

Tahap kedua di dalam misi 2 difokuskan untuk peningkatan akselerasi ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pilar-pilar transformasi ekonomi harus mendapatkan perhatian dan intervensi kebijakan yang tepat. Tahap ini menjadi tiang penopang bagi pelaksanaan misi mewujudkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan untuk mendukung visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah ditetapkan. Beberapa upaya intervensi kebijakan yang harus diperhatikan antara lain:

1. Peningkatan kapasitas produksi dan nilai tambah sektor sektor ekonomi
  2. Peningkatan kualitas produk sektor ekonomi
  3. Peningkatan kapasitas dan jaringan kerjasama pemasaran
- Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif

Tahapan kedua merupakan tahapan lanjutan dari tahap pertama yang mendukung peningkatan pelayanan publik yang adaptif dan tata kelola yang berintegritas. Fokus tahap kedua adalah mempercepat digitalisasi layanan publik, menguatkan kolaborasi dengan berbagai *stakeholders*, dan penguatan tata kelola yang inklusif, partisipatif, dan berintegritas. Adapun rincian arah kebijakan tahap kedua adalah sebagai berikut:

1. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta kondusifitas daerah
2. Penguatan pelayanan publik yang berkualitas
3. Penguatan perumuskan kebijakan berbasis bukti
4. Penguatan akuntabilitas kinerja dan manajemen risiko
5. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
6. Penguatan kualitas dan integritas ASN

- 
- 
- 7. Penguatan kelembangan yang kolaboratif
  - 8. Peningkatan kontribusi PAD terhadap APBD
  - 9. Penguatan penganggaran berbasis kinerja
  - 10. Peningkatan keberlanjutan inovasi
- 
- Misi 4: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan

Arah kebijakan pada tahap kedua misi lima difokuskan untuk memantapkan transformasi infrastruktur, berupa memantapkan akses dan kualitas pelayanan dasar sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif. Pemantapan ini dimaknai untuk memperkokoh arah kebijakan yang telah disiapkan pada tahun pertama. Pada periode kedua ini, infrastruktur yang dibangun diharapkan lebih inklusif, berkualitas, dan merata. Secara lebih rinci, berikut ini adalah arah kebijakan pada tahap kedua untuk misi lima.

    1. Akselerasi kolaborasi penataan wilayah berbasis tata ruang
    2. Pengembangan infrastruktur dan utilitas wilayah ramah lingkungan
    3. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman aman dan kelayakhunian yang merata
    4. Pemantapan konektivitas infrastruktur pendukung perekonomian yang terpadu dan terintegrasi

- Misi 5: Mewujudkan perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Tahapan pada periode ini merupakan keberlanjutan dari periode sebelumnya, berupa akselerasi pengelolaan lingkungan hidup serta adaptasi-mitigasi bencana dan perubahan iklim. Berikut rincian dari tahapan periode ini:

1. Pemantapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu
2. Penguatan adaptasi-mitigasi bencana dan perubahan iklim berbasis masyarakat
3. Peningkatan infrastruktur energi baru terbarukan dan rendah karbon



### C. Arah Kebijakan Periode 2035-2039

- Misi 1: Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, dan sejahtera

Arah kebijakan pada periode pembangunan lima tahunan ketiga merupakan tahap lanjutan dari arah kebijakan yang dilakukan pada periode sebelumnya. Pada periode ketiga ini, arah kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas daya saing SDM. Beberapa upaya pada periode ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan generasi sumber daya manusia di Kabupaten Seram Bagian Barat yang produktif dan berdaya saing. Secara lebih operasional arah kebijakan ini dirincikan sebagai berikut.

1. Penguatan ekosistem pendidikan yang berkualitas
  2. Penguatan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan
  3. Penguatan perlindungan sosial yang komprehensif dan adaptif
  4. Penguatan inklusivitas sosial
  5. Peningkatan upaya pemajuan kebudayaan
- Misi 2: Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif
- Arah pembangunan pada periode lima tahun ketiga berfokus pada peningkatan daya saing daerah, yang mencakup pemantapan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi daerah tidak hanya menyangkut pada kebutuhan di dalam daerah tetapi sudah menuju pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, daya saing produk-produk unggulan perlu dikuatkan melalui arah kebijakan berikut ini:
1. Peningkatan kapasitas ekspor
  2. Peningkatan daya saing penggunaan teknologi dan transformasi digital dalam pemasaran
- Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif

Tahap ketiga berfokus pada pemantapan tata kelola pemerintahan dalam mendukung daya saing daerah. Pemantapan tata kelola ditandai dengan tata kelola inklusif dan kolaboratif semakin kuat didukung

dengan digitalisasi sektor pelayanan public yang memadai dan integritas aparatur sipil semakin meningkat. Adapun rincian arah kebijakan pada tahap ini adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan ketentraman dan ketertiban umum serta kondusifitas daerah
  2. penguatan pelayanan publik yang adaptif dan kolaboratif
  3. Kebijakan publik yang patisipatif dan transparan
  4. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel berbasis manajemen risiko
  5. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
  6. Pemantapan profesionalitas dan integritas ASN
  7. Pemantapan kelembagaan yang kolaboratif
  8. Peningkatan kapasitas dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel
  9. Penguatan keberlanjutan inovasi
- Misi 4: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan

Perkembangan yang semakin bergerak maju membutuhkan dukungan infrastruktur yang andal dan kokoh, sehingga pada tahap ketiga misi lima difokuskan pada akselerasi peningkatan infrastruktur, dalam menopang pembangunan ekonomi daerah. Berikut ini merupakan rincian arah kebijakan misi keempat pada periode ketiga.

1. Memperkokoh layanan infrastruktur wilayah yang mantap dan merata
  2. Pemantapan permukiman layak huni didukung prasarana dan sarana yang inklusif dan inovatif
- Misi 5: Mewujudkan perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Daya saing daerah yang diharapkan semakin menguat pada periode ini, menjadikan upaya untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam memperkokoh ketahanan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan iklim perlu untuk semakin diperkuat. Berikut detail dari tahapan periode ini:

- 
- 
1. Pemantapan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup terpadu dan berkelanjutan
  2. Pemantapan adaptasi-mitigasi bencana dan perubahan iklim yang tangguh dan berkelanjutan
  3. Penguatan infrastruktur dan diversifikasi sumber energi baru terbarukan

#### **D. Arah Kebijakan Periode 2040-2045**

- Misi 1: Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya dan sejahtera

Arah kebijakan pada periode pembangunan lima tahunan keempat diarahkan untuk memperkokoh kualitas pelayanan dasar dan perlindungan sosial secara menyeluruh dalam rangka perwujudan misi pada urusan sosial dan sumber daya manusia yaitu mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya dan sejahtera. Pada tahap ini, kondisi SDM di Kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan sudah berada pada kondisi yang produktif, sejahtera dan berdaya saing. Upaya untuk memperkokoh kondisi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penguatan pada beberapa aspek dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Secara lebih rinci arah kebijakan pada periode keempat meliputi.

1. Penguatan SDM yang unggul
  2. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial yang berketahtaan
  3. Perwujudan masyarakat yang inklusif dan berbudaya
- Misi 2: Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif

Pembangunan ekonomi pada periode kelima diarahkan pada perwujudan daya saing berkelanjutan. Perekonomian daerah tidak hanya mampu bersaing di tingkat global tetapi juga dipastikan berkelanjutan. Pada tahap ini, produk-produk unggulan daerah diharapkan dapat terjamin keberlanjutannya dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah rincian arah kebijakan misi 2, mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif:

- 
1. Perwujudan pertumbuhan ekonomi SBB yang tinggi
  2. Perwujudan pemerataan pendapatan dan penurunan kemiskinan
  3. Perwujudan perluasan akses dan kesempatan dalam pembangunan dan pemanfaatan hasil pertumbuhan ekonomi
- Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif

Tahap keempat merupakan tahapan terakhir dari pelaksanaan kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Seram Bagian Barat. Tahapan ini merupakan perwujudan dari misi bidang tata kelola, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif. Pelaksanaan arah kebijakan ini tetap memperhatikan tahapan-tahapan sebelumnya untuk meningkatkan akselerasi pembangunan tata kelola pemerintahan dalam mendukung perwujudan visi daerah dan Indonesia Emas 2024. Adapun rincian arah kebijakan periode ini adalah sebagai berikut:

    1. Pemantapan tata kelola yang kolaboratif dan berintegritas
    2. Pemantapan pelayanan publik yang adaptif dan profesional
    3. Peningkatan kemandirian keuangan daerah
    4. Inovasi sebagai budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan
  - Misi 4: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan

Arah kebijakan di misi keempat pada tahap keempat diarahkan untuk perwujudan daya saing daerah yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. Perwujudan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam menopang pembangunan ekonomi yang berdaya saing dapat terwujudkan dalam periode ini. Pembagunan infrastruktur diharapkan memberikan dampak positif pada seluruh aspek pembangunan daerah sehingga membentuk simpul ekonomi yang semakin mempercepat pencapaian visi misi daerah.

- 
- Misi 5: Mewujudkan perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Periode ini diharapkan perwujudan wilayah berketahanan ekologi dan bencana di Kabupaten Seram Bagian Barat semakin lebih baik dari periode sebelumnya, dengan terciptanya ketahanan lingkungan hidup berkelanjutan, wujud nyata dari ketahanan bencana dan perubahan iklim serta adanya kemandirian pangan. Tantangan nyata dari periodesasi ini tentunya adalah meningkatnya jumlah penduduk sehingga kebutuhan akan lahan untuk pembangunan semakin meningkat begitu pula dengan tantangan nyata akan kerusakan lingkungan. Sehingga rincian arah kebijakan pada periode ini antara lain:

1. Perwujudan ketahanan lingkungan hidup berkelanjutan
2. Perwujudan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim
3. Perwujudan kemandirian energi

## **5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045**

Sasaran pokok merupakan kondisi yang akan dicapai pada akhir periode dan mencerminkan ketercapaian visi pembangunan jangka panjang. Sasaran pokok memiliki indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. Sasaran pokok sekaligus menjadi kerangka kinerja bagi pelaksanaan arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi daerah.

### **5.2.1. Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan**

Sasaran pokok sebagai kondisi yang akan dicapai pada akhir periode dirumuskan berdasarkan 17 arah pembangunan nasional dan daerah. Keterkaitan antara sasaran pokok, arah pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan sebagai berikut:

**Tabel 5. 2 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045**

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
				Baseline 2025	Target 2045
Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya dan sejahtera	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan sejahtera	Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,16	77,74
			Kesehatan Ibu dan Anak:		
			a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	187	22
			b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	24,7	6,3
			Penanganan Tuberkulosis:		
			a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)	79	95
			b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)	83,14	98,00
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	99,5
			Hasil Pembelajaran:		

<b>Misi</b>	<b>Sasaran Pokok</b>	<b>Arah Pembangunan</b>	<b>Indikator Utama Pembangunan</b>	<b>Target</b>	
				<b>Baseline 2025</b>	<b>Target 2045</b>
		Pendidikan Berkualitas yang Merata	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
			i) Literasi Membaca	9,09-9,09	63,64-72,73
			ii) Numerasi	0,00 – 9,09	63,64-63,64
			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
			i) Literasi Membaca	17,97-19,97	60,15-62,15
			ii) Numerasi	14,76-16,76	56,54-58,54
			c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,80 – 10,81	13,70 – 13,73
			d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,29 – 14,30	15,82 – 15,92
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	14,94	14,94 – 16,94
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	73,81	85,00

<b>Misi</b>	<b>Sasaran Pokok</b>	<b>Arah Pembangunan</b>	<b>Indikator Utama Pembangunan</b>	<b>Target</b>	
				<b>Baseline 2025</b>	<b>Target 2045</b>
Terwujudnya masyarakat yang inklusif dan berbudaya	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	13,01-13,51	0,32-0,82
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	37,43	82,26
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	13	45
		Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,55-60,71	69,51-70,9
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,22-78,29	85,79-86,53
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	63,88	68,43-68,49
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,485-0,483	0,245-0,225
Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif	Meningkatnya inklusifitas perekonomian daerah	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	6,50-6,64	8,14-8,95
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	dihitung kemudian	dihitung kemudian
			Pengembangan Pariwisata		

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
				Baseline 2025	Target 2045
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,7	2,88
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang)	10,68	26,7
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	-	-
			Kontribusi PDRB Pariwisata Bahari (%)	dihitung kemudian	dihitung kemudian
			Jumlah Tamu Wisatawan Manca Negara	dihitung kemudian	dihitung kemudian
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
			a) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,30	9,03
			b) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,75	3,61
			c) <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	2,49	5,43
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,55 – 6,03	4,69-5,67
			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35	70
			Persentase Tenaga Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan	dihitung kemudian	dihitung kemudian

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
				Baseline 2025	Target 2045
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,20	69,3
			Tingkat Penguasaan IPTEK:		
			Indeks Inovasi Daerah	dihitung kemudian	dihitung kemudian
			Indeks Inovasi dan Riset Maritim	dihitung kemudian	dihitung kemudian
	Penerapan Ekonomi Hijau		Indeks Ekonomi Hijau Daerah	65,96	85,12
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	27,30	62,69
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	8,53	5,21
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,53	36,84
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	5,13	12,85
	Stabilitas Ekonomi Makro		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,51	2,00
			Tingkat Inflasi (%)	2,5-3,8	0,8 - 3,2
			Pendalaman / Intermediasi Sektor Keuangan		
			a) Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	27,22	69,40
			b) Aset Dana Pensiun / PDRB (%)	0,27	7,76

<b>Misi</b>	<b>Sasaran Pokok</b>	<b>Arah Pembangunan</b>	<b>Indikator Utama Pembangunan</b>	<b>Target</b>	
				<b>Baseline 2025</b>	<b>Target 2045</b>
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	822.214,73	4.965.479,38
			d) Total Kredit / PDRB (%)	29,3	68,3
			Inklusi Keuangan (%)	86,30	98,81
Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas	Meningkatnya tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Transformasi Digital	Indeks Reformasi Hukum	70	100
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,53	5,00
			Indeks Pelayanan Publik	1,80	5,00
		Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Indeks Integritas Nasional	67,43	81,23
			Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,9	7,5
			Indeks Pembangunan Hukum:	38,65	64,65
			Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	64,93 (2020)	82,31
			Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Tinggi
Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelaanjutan		
			a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelaanjutan (%)	67,45	100

<b>Misi</b>	<b>Sasaran Pokok</b>	<b>Arah Pembangunan</b>	<b>Indikator Utama Pembangunan</b>	<b>Target</b>	
				<b>Baseline 2025</b>	<b>Target 2045</b>
merata dan berkelanjutan	infrastruktur berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	b) Persentase Desa Mandiri (%)		
		Lingkungan Hidup Berkualitas	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	6	50
		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	a) Ketahanan Energi		
			- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.300	6.100
			- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	233	150
			b) Ketahanan Air		
			- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,1	2,63
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	40,39	100
Mewujudkan perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan berencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	dihitung kemudian	dihitung kemudian
			Percentase kawasan konservasi laut terhadap wilayah kelola laut	Dihitung kemudian	Dihitung kemudian
			Kualitas Lingkungan Hidup		
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	83,69	85,26
			b) Pengelolaan Sampah		

<b>Misi</b>	<b>Sasaran Pokok</b>	<b>Arah Pembangunan</b>	<b>Indikator Utama Pembangunan</b>	<b>Target</b>	
				<b>Baseline 2025</b>	<b>Target 2045</b>
			- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	0,05 (2022)	84,49
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	30,74 (2022)	100
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%)	28,97	5
	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	162,47	132,41 - 106,74
			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
			a. Kumulatif	97,39	100
			b. Tahunan	85,82	100



### 5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Seram Bagian Barat

Arah kebijakan transformasi Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan sinkronisasi dengan arah kebijakan transformasi RPJPD Provinsi Maluku dan RPJPN. Arah kebijakan transformasi bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola dan landasan transformasi. Arah kebijakan transformasi dijalankan sepanjang pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 berdasarkan kerangka kerja di dalam arah kebijakan setiap periode. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan transformasi berada dalam kerangka penguatan fondasi pembangunan pada periode 1, akselerasi pembangunan pada periode 2, daya saing daerah pada periode 3 dan daya saing berkelanjutan pada periode 4.

**Tabel 5. 3 Arah Kebijakan Transformasi**

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
1	Transformasi Sosial	<p>Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.</p> <p>Percepatan penurunan stunting terutama dengan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, serta percepatan eliminasi malaria.</p> <p>Peningkatan akses pelayanan kesehatan berbasis gugus pulau melalui sistem rujukan kepulauan (termasuk RS perairan), penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) yang disinergikan dengan moda transportasi lainnya, penguatan telemedicine serta sistem sister hospital dengan RS di wilayah lain.</p> <p>Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan</p>

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses dan afirmasi 3T.
		Pendampingan daerah kabupaten/kota dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
		Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis.
		Peningkatan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antarpulau dan pengadaan angkutan umum pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan kesehatan dan pendidikan.
		Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
		Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan dalam bidang perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata.
		Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menjangkau seluruh pulau-pulau berpenduduk.



No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas tenaga dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3.
		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri, pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata serta keterkaitan dengan DUDI.
		Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.
		Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi 3T melalui perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
		Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
		Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.
		Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
		Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.
		Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.
2	Transformasi Ekonomi	Pengembangan sentra-sentra industri berbasis komoditas unggulan perikanan tangkap, perikanan budidaya (rumput laut), dan perkebunan (pala, cengkeh, dan kelapa) dilengkapi dengan pusat riset, inovasi, dan teknologi (maritime science technopark dan industri galangan kapal, seaweed science technopark, dan coconut science technopark) di kawasan perkotaan, sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan desa-kota, dan kawasan pariwisata yang berkelanjutan.
		Pengembangan ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian antara lain pengembangan kawasan utama produsen perikanan secara berkelanjutan.
		Percepatan pengembangan lumbung ikan nasional, termasuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur-infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan.
		Optimalisasi potensi pertambangan dan gas alam secara berkelanjutan.
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
		Peningkatan keterkaitan IKM dan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif termasuk pembiayaan dan pemasaran, penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
		Penguatan pasokan energi ramah lingkungan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia.
		Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri.
		Pengembangan potensi pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) melalui pengembangan kawasan pariwisata premium (premium tourism), pariwisata lokal, dan ekonomi kreatif berbasis seni musik, kriya (tenun), serta seni pahat dan ukir kayu melalui penguatan strategi pemasaran serta peningkatan kapasitas pengelola dan masyarakat pelaku usaha.
		Optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan eksisting melalui peningkatan investasi dan pengembangan kota-kota pesisir yang



No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		<p>terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung sebagai pusat pertumbuhan wilayah.</p> <p>Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix)</p>



No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		<p>pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p>
		<p>Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</p>
		<p>Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.</p>
		<p>Peningkatan produktivitas BUMD.</p>
3	Transformasi Tata Kelola	<p>Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah.</p>

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
		Penguatan integritas partai politik.
		Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
		Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
		Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
		Penyusunan kebijakan afirmatif mengedepankan kontekstual kewilayahan untuk mendorong pembangunan wilayah.
		Regulasi untuk pengelolaan sumber daya kelautan.

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		<p>Penguatan monitoring program pembangunan melalui manajemen risiko terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai end user.</p> <p>Penguatan manajemen talenta (talent pool) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya.</p>
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<p>Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.</p> <p>Penguatan peran daerah dalam kerja sama antarnegara, terutama dengan negaranegara MSG (Melanesian Spearhead Group) dalam mendukung kedaulatan negara.</p> <p>Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan, dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.</p> <p>Penguatan pengendalian inflasi daerah.</p> <p>Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.</p>
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<p>Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.</p> <p>Pelestarian dan pengembangan jalur rempah sebagai peradaban budaya</p>



No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		masyarakat Mendorong pemanfaatan energi surya, panas bumi, angin, air, dan biomassa/biofuel dengan mengembangkan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik serta pengembangan smart grid dan sistem terisolasi (isolated grid) kepulauan, termasuk untuk menopang kebutuhan energi pada pusat-pusat pertumbuhan baru.
		Pemanfaatan cadangan energi hidrokarbon secara berkelanjutan.
		Pelestarian dan penguatan tradisi budaya serta norma hukum adat masyarakat melalui penguatan ikatan antarkelompok masyarakat, pelibatan tokoh adat/agama sebagai mitra utama pemerintah.
		Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui perlindungan dan rehabilitasi wilayah tangkapan air, riset dan inovasi sistem, dan teknologi pertanian rendah karbon, serta penyiapan kawasan sentra produksi pangan.
		Transmigrasi sebagai basis pertanian untuk kemandirian pangan lokal dengan pengembangan produk pangan (tanaman padi, sagu, dan hortikultura tanaman sayuran/olerikultura).
		Strategi khusus untuk adaptasi perubahan iklim (di antaranya sea level rise di wilayah pesisir dan gelombang laut tinggi) salah



No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		satunya melalui penguatan sarana prasarana (green infrastructure dan nature-based solutions), dan tata kelola risiko.
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana.
		Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang.
		Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan koneksi spesies yang dilindungi.
		Pengurangan risiko kebencanaan lain melalui sistem peringatan dini kebencanaan Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan tokoh adat dan agama.
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia terutama pada masyarakat adat melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
		Mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yaitu: (i) pembangunan tumpungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat. (ii) pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk mendukung kemandirian pangan lokal. (iii) normalisasi sungai yang melintas perkotaan; serta (iv) perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.
		Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
		Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
		Penjangkauan terhadap masyarakat di pulau terluar yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.
6	Implementasi Transformasi	Perluasan jaringan internet dan komunikasi berkecepatan tinggi yang menjangkau seluruh daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan inovasi dan teknologi digital dalam pengembangan sektor unggulan.
		Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem
		Penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut.



No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.
		Peningkatan konektivitas intrapulau dan intrakepulauan, antarwilayah Maluku, dan antarwilayah Maluku dengan wilayah lain melalui pembangunan pelabuhan transit hub domestik dan pusat logistik di antaranya Pelabuhan Ambon, pengembangan konektivitas feeder angkutan laut, serta pengembangan bandara utama (Bandara Pattimura), bandara perairan, dan seaplane sesuai kondisi geografis termasuk untuk mendukung pariwisata, serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.
		Pemanfaatan ALKI III, III B, dan III C secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.
		Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.
		Penyelesaian koridor konektivitas Trans Maluku, dan Trans pada pulau-pulau afirmasi serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.
		Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di kota-kota besar dan sedang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang seperti Ambon.
		Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahtaan bencana dan iklim Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah kepulauan dan afirmasi
		Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan
		Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.
		Pemenuhan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif, serta

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		pengelolaan sampah yang terpadu sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
		Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan
		Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum
		Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.
		Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
		Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.
		Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang) 10 persen residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan 100 persen sampah terangkut dan terolah di



No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
		fasilitas pengolahan sampah (minimal 35 persen melalui daur ulang).
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
		Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
		Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.



## BAB VI PENUTUP

Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang berisi cita-cita besar Kabupaten Seram Bagian Barat ke depan. Dokumen ini disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, top-down, bottom-up dan politik yang baik. Dokumen ini juga disusun dengan memperhatikan pendekatan tematik, holistik, intergratif dan spasial. Penyusunan dokumen RPJPD dijalankan melalui sebuah riset. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, *focus group discussion* (FGD), wawancara mendalam dan berbagai teknik pengumpulan data lainnya.

Analisis terhadap data capaian pembangunan jangka panjang periode sebelumnya dijalankan dengan metode dan konsep yang baik, sehingga melahirkan rumusan permasalahan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Rumusan permasalahan dan isu-isu strategis tersebut digunakan untuk merumuskan kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah ke depan.

Perumusan kondisi yang ingin dicapai didalam dokumen ini dijalankan dengan menggunakan metode *cascading* perencanaan jangka panjang untuk menjamin hubungan logis antara permasalahan dan isu-isu strategis dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok beserta indikatornya. Berbagai kondisi yang ingin dicapai tersebut harus dikawal dengan baik oleh pemerintah, masyarakat, swasta dan berbagai *stakeholders* lainnya. Kolaborasi dan inovasi sangat dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok yang telah ditetapkan.

RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2025-2045 menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat per periode selama dua puluh tahun ke depan. Indikator didalam RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2025-2045 harus dikawal didalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. Manajemen risiko sangat diperlukan untuk mengawal implementasi kebijakan jangka panjang didalam RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2025-2045. Manajemen risiko dapat digunakan untuk mengidentifikasi register risiko yang dihadapi didalam perencanaan jangka panjang Kabupaten Seram Bagian Barat.

Akhir kata, semoga dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2025-2045 ini bermanfaat, sehingga dapat digunakan sebagai panduan penyusunan kebijakan jangka menengah dan jangka pendek di Kabupaten

Seram Bagian Barat. Semoga dokumen perencanaan ini mampu menjadi pengungkit bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat ke depan. Amiin.

## **Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan menjadi peraturan atau pedoman yang harus dipedomani dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk periode tahun 2025-2045. Kaidah yang ada bertujuan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan rencana jangka panjang. Berikut adalah kaidah yang perlu diperhatikan dan dipedomani dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2025-2045:

1. Sebagai dokumen bersama, tanggung jawab untuk mendukung visi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2025-2045 merupakan kewajiban yang harus diemban oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Hal ini mencakup pelaksanaan kebijakan, program, dan aktivitas yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan setiap entitas;
2. Dokumen RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2025-2045 menjadi dokumen yang wajib dirujuk dan dipedomani dalam perumusan visi dan misi beserta program prioritas Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Perumusan kebijakan dan perencanaan organisasi di setiap Perangkat Daerah (PD) atau unit organisasi didalam struktur Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kewajiban untuk merujuk dan mempedomani dokumen RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2025-2045;
4. Keselarasan antara dokumen RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2025-2045 dengan dokumen perencanaan lainnya wajib dijaga konsistensinya melalui unsur Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang memiliki kewenangan dibidang perencanaan atau unit organisasi sesuai dengan peraturan;
5. Jika terdapat perubahan kondisi yang berpotensi memberikan dampak pada ketidakmungkinan mencapai cita-cita atau tujuan yang diinginkan dalam RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2025-2045 setelah penetapannya, maka perubahan pada RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2025-2045 dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Visi dan misi sebagai cita-cita dan tujuan yang ingin diwujudkan tidak dapat dilakukan perubahan, sedangkan penyesuaian dilakukan pada kebijakan, sasaran, indikator, dan target;



- b. Perubahan juga dapat dilakukan pada poin isu strategis yang disesuaikan dengan tren atau dinamika perkembangan zaman;
- c. Kebijakan yang dirasa masih relevan dan dinilai memiliki urgensi yang tinggi bagi Kabupaten Seram Bagian Barat dan termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dipedomani dalam penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 berbeda periodenisasinya dan/atau masa berlakunya berakhir lebih cepat dari masa berlaku RPJPD, seperti SDGs, RTRW, dan rencana sektoral lainnya, maka pemerintah daerah dapat tetap menggunakan kebijakannya tanpa harus melakukan perubahan dokumen RPJPD tahun 2025-2045;
- d. Proses revisi atau perubahan pada dokumen RPJPD harus dilakukan sesuai dengan regulasi atau aturan perundangan yang berlaku.



# BADAN PERENCANAAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT